

LAPORAN
Hibah Penelitian Strategis Nasional
Tahun Anggaran 2009



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MEKANISME *SURVIVAL* DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN
DI DAERAH EKSPLORASI MIGAS
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Peneliti:
Dr. Emy Susanti, MA

Anggota:
Dra. Sutinah, MS
Drs. Bagong Suyanto, M.Si
Karnaji, S.Sos., M.Si

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009,
Sesuai Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang
Kegiatan Penelitian Strategis Nasional
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

UNIVERSITAS AIRLANGGA
OKTOBER 2009

LAPORAN
Hibah Penelitian Strategis Nasional
Tahun Anggaran 2009



KKP
KK-2
LP-110/10
Sus
M

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**MEKANISME *SURVIVAL* DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN
DI DAERAH EKSPLORASI MIGAS
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Peneliti:
Dr. Emy Susanti, MA

Anggota:
Dra. Sutinah, MS
Drs. Bagong Suyanto, M.Si
Karnaji, S.Sos., M.Si

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009,
Sesuai Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang
Kegiatan Penelitian Strategis Nasional
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

UNIVERSITAS AIRLANGGA
OKTOBER 2009

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian **MEKANISME *SURVIVAL* DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI DAERAH EKSPLORASI MIGAS DI PROVINSI JAWA TIMUR**
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap Dr. Emy Susanti Hendrarso, MA
 - b. Jenis Kelamin Perempuan
 - c. NIP 131 406 097
 - d. Pangkat/Golongan Lektor Kepala/IV-A
 - e. Jabatan Pembina
 - f. Bidang Keahlian Gender dan Pembangunan
 - g. Fakultas/Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi
 - h. Perguruan Tinggi Universitas Airlangga

Tim Peneliti

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi
1	Dra. Sutinah, MS	Sosiologi Pembangunan	FISIP
2	Drs. Bagong Suyanto, M.Si.	Masalah Kemiskinan	FISIP
3	Karnaji, S.Sos., M.Si.	Sosiologi Ekonomi	FISIP

3. Masa Pelaksanaan Penelitian 8 Bulan
4. Anggaran Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)



Dekan FISIP Unair

Drs. I. Basis Susilo, MA
NIP. 130 937 977

Surabaya, 13 November 2009
Ketua Peneliti

Dr. Emy Susanti Hendrarso, MA
NIP. 131 406 097



Mengetahui,
Ketua LPPM Unair

Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA, drh.
NIP. 131 837 004

3. Dekan FISIP Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
4. Bupati Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Gresik, dan Sidoarjo yang telah memberikan ijin dan membantu memfasilitasi proses pengumpulan data di lapangan.
5. Para mahasiswa Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga yang telah dengan tekun membantu proses pengumpulan data di lapangan.
6. Para responden di berbagai lokasi penelitian yang dengan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang kami butuhkan.

Kami berharap hasil studi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan program aksi yang lebih kontekstual untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan miskin di daerah industri migas.

Terima kasih.

Surabaya. Oktober 2009

Hormat Kami,

Tim Peneliti

RINGKASAN

MEKANISME *SURVIVAL* DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI DAERAH EKSPLORASI MIGAS DI PROVINSI JAWA TIMUR (Emy Susanti, Sutinah, Bagong Suyanto, dan Karnaji, 2009: 131).

Bagi perempuan, pembangunan, industrialisasi dan kegiatan eksplorasi migas di mana pun, tak terkecuali di wilayah Propinsi Jawa Timur sesungguhnya selalu akan melahirkan sejumlah dilema. Di satu sisi industrialisasi dan eksplorasi migas diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan pintu terobosan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan perempuan. Tetapi, di sisi yang lain industrialisasi dan investasi berbagai kekuatan komersial di sektor pertambangan migas ternyata tak jarang malah melahirkan proses marginalisasi, kerusakan ekologis dan tidak berkesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan yang seringkali memang menjadi korban pertama dari proses perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Tujuan studi ini, selain mengkaji dampak perkembangan industrialisasi migas dan mekanisme *survival* yang dikembangkan perempuan untuk menyaingi tekanan perubahan, juga sekaligus mencoba merumuskan program dan upaya pemberdayaan perempuan miskin di daerah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur.

Dalam studi ini yang menjadi subyek penelitian adalah para perempuan yang dikategorikan miskin oleh komunitas lokal, yang bertempat tinggal di desa tempat berlangsungnya industri eksplorasi migas di wilayah yang diteliti, yaitu di Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. Jumlah responden penelitian ini secara keseluruhan ditentukan sebanyak 400 perempuan.

Studi sebagaimana dilaporkan menemukan bahwa di tengah keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan kungkungan nilai-nilai patriarkhis yang bias gender, kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk terlibat di kegiatan produktif cenderung terbatas, meski dari segi ekonomi peran perempuan dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga terbukti fungsional, dan bahkan sangat strategis. Industrialisasi yang semula diharapkan akan dapat membawa perubahan baru dan melahirkan peluang kerja yang lebih terbuka bagi perempuan, ternyata tidak banyak berpengaruh. Bahkan, ada indikasi, setelah dikembangkan kegiatan industrialisasi migas, justru posisi sebagian perempuan miskin makin tersisih.

Upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan peran perempuan miskin di wilayah eksplorasi migas harus diakui bukanlah hal yang mudah. Meskipun berbagai kajian telah membuktikan bahwa perempuan miskin memiliki daya tahan dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha berskala mikro atau usaha di sektor informal yang tangguh, tetapi akibat "beban ganda" yang mereka tanggung menyebabkan ruang gerak dan peluang perempuan untuk lebih maju menjadi terhambat. Di balik kisah sebagian perempuan miskin yang mampu mengembangkan kegiatan produktif sekaligus menanggung beban ganda di ranah domestik, di berbagai daerah eksplorasi migas yang diteliti tidak sedikit perempuan miskin yang mengaku kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya akibat tidak didukung pendidikan, ketrampilan, dan modal yang memadai, di samping karena masih kuatnya budaya patriarkhis yang berlaku di kalangan keluarga miskin.

Untuk memberdayakan dan mengembangkan peran perempuan miskin, selain harus dilakukan secara terpadu, juga harus menyentuh semua aspek yang menjadi akar masalah kerentanan dan ketidakberdayaan perempuan miskin. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, studi ini menemukan paling-tidak ada lima arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan dikembangkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur jika berkeinginan untuk meningkatkan peran kewirausahaan perempuan di daerah eksplorasi migas, yaitu: (1) pengembangan fasilitas modal usaha dan aset produksi bagi perempuan miskin, (2) mengembangkan peluang-peluang usaha baru bagi perempuan miskin, (3) pelatihan dan peningkatan kualitas SDM perempuan miskin, (4) perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, dan (5) pemberdayaan sosio-kultural dan pembebasan perempuan miskin dari berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan.

Membantu, melindungi dan memberdayakan perempuan miskin agar tidak mengalami proses marginalisasi akibat pembangunan industri migas, tidak hanya membutuhkan pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari penduduk lokal yang miskin dan rentan dimarginalisasi, tetapi juga harus dipahami posisi mereka sebagai perempuan yang acapkali masih terbelenggu oleh nilai-budaya yang sifatnya patriarkhis.

Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan miskin, terutama di daerah eksplorasi migas, yang dibutuhkan sebetulnya bukan sekadar kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib usaha mikro yang diteluni perempuan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini masih dialami perempuan.

Bagi pengelola atau pemilik industri migas yang saat ini tengah melangsungkan kegiatan eksplorasi sesungguhnya akan sangat bijak jika sejak awal telah memikirkan dan memasukkan isu-isu perempuan lokal dan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program-program CD (*Community Development*) yang mereka rancang dan tengah dikembangkan. Tanpa fokus khusus yang berpihak kepada perempuan miskin, niscaya kegiatan eksplorasi migas yang sedang berlangsung hanya akan melahirkan pemiskinan dan peminggiran perempuan dari dinamika dan proses pembangunan yang tengah berlangsung di wilayah tempat tinggal mereka (*).

SUMMARY

SURVIVAL MECHANISM AND POOR WOMEN EMPOWERMENT IN OIL-GAS EXPLORATION AREAS AT EAST JAVA PROVINCIAL (Emy Susanti, Sutinah, Bagong Suyanto, Karnaji, 2009: 131)

For women, development, industrialization, and oil-gas exploration activity in anywhere, including in East Java Provincial, will result in dilemma. Industrialization and oil-gas exploration, on one side, expected to be the way out and threshold to anticipate poor relief and women retardation. On the other side, industrialization and investment in this oil-gas field can resulted in marginalization process, ecology damage and deviate with local community's need, especially for women that become the first victim from the process.

The aim of this study, besides studying the effect of oil-gas industrialization and survival mechanism that developed by women to anticipate the pressure of change, it also to formulate the programs and efforts in empowering poor women around oil-gas exploration area in East Java.

Within this study, the subject of research is women that categorized poor by local community, stayed on the villages around exploration area, that is, in Tuban, Sidoarjo, Bojonegoro, and Gresik regions respectively. The total amount of respondents is 400 women.

The study found that in the limitation of education, skill and gender-biased patriarchal values, the chance for women to involve in production activity tends limited, although from economic perspective, they are, functionally and strategically, buffers family economy. Industrialization that expected to be brought a new change and make open work chance for women, actually not bring new implication. There is an indication that they are more even marginalized.

Efforts to empower and develop the role of poor women in oil-gas exploration area are known not easy. Although some studies shows that the poor women has survival and able to run and develop micro-business or work on informal sector, but because the "dual burden" that they bear, they hampered. Behind the success story of some poor women that able to develop productive activity and bear the dual burden domestically, in some areas of researched-oil-gas, many poor women has difficulties to develop their potency because lack of education, skill, capital, and patriarchal values.

To empower and develop the role of poor women, it is need a comprehensive attempt that touching all aspects of poor women problems. Based on the field result, this study found at least five policies that need to develop and consider. The government of East Java if wants to increase the role of women entrepreneurship on oil-gas exploration area should (1) develop capital and production assets for poor women, (2) develop new chance, (3) research and increase the human resources quality for them, (4) protect and empower micro-business, and (5) empower socio-cultural and release the poor women from gender discrimination that limited their move.

For managers or the owners of oil-gas industry that until now doing exploration, it is very wise to think and consider the issues of local women and gender

as an integrated part of Community Development program that you designed and developed. Without special focusing on poor women, their exploration only make women more poor and marginalized from the development dynamic in their areas.

Daftar Isi

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

	Hal.
Prakata	i
Ringkasan	iii
Summary	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	5
BAB II INDUSTRIALISAI, PEMBANGUNAN DAN GENDER: KERANGKA ANALISIS	6
1. Faktor Pendorong.....	7
2. Dampak Perubahan	8
3. Industrialisasi dan Dampaknya	11
4. Posisi Perempuan Dalam Pembangunan	13
5. Pendekatan Pembangunan	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
1. Tujuan	20
2. Manfaat Penelitian	20
BAB IV METODE DAN PROSEDUR YANG DITEMPUH	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	25
1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	25
1.1. Letak Geografis	25
1.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	26
1.3. Ketenagakerjaan	30
1.4. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	40
2. Profil Perempuan Miskin di Daerah Industri Migas	43
2.1. Suhulah (45 Tahun)	44
2.2. Siti Aisyah (35 Tahun)	45
2.3. Karminah (40 Tahun)	48
2.4. Dasmini (80 Tahun)	51
2.5. Mulyani (29 Tahun)	53
2.6. Kholilah (27 Tahun)	55
2.7. Aminah (45 Tahun)	59
2.8. Solihah (50 Tahun)	63
2.9. Siti Muntahan (28 Tahun)	67
2.10. Rahayu (31 Tahun)	69
3. Peran Perempuan Miskin Dalam Kegiatan Domestik dan Produktif	72
3.1. Perempuan Miskin di Wilayah Eksplorasi Migas	73

3.2. Kondisi Ekonomi	76
3.3. Dampak Perkembangan Industri Migas	81
3.4. Peran Perempuan di Sektor domestik dan Pablik	88
4. Kendala Pengembangan Usaha	91
4.1. Kondisi dan prospek Usaha yang Ditekuni Perempuan Miskin	93
4.2. Kendala Pengembangan Usaha yang Ditekuni Perempuan Miskin	98
4.3. Jenis Bantuan yang Dibutuhkan	101
5. Mekanisme Survival	106
6. Upaya Pemberdayaan Perempuan	120
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	124
1. Kesimpulan	125
2. Saran: Kebijakan dan program	126
Daftar Pustaka	130
Kuesioner	

Daftar Tabel

		Hal.
Table 1	Lokasi Penelitian dan Jumlah Responden	23
Table 2	Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 200-2005	27
Table 3	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2003-2007.....	32
Table 4	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Jatim Tahun 2003-2007	34
Table 5	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Mencari Pekerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005	36
Table 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2003-2007 (persen)	38
Tabel 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 dan 2007 (persen)	41
Tabel 8	Karakteristik Perempuan Miskin di Daerah Eksplorasi Migas (N=200, Dalam %)	74
Tabel 9	Kondisi Ekonomi Keluarga Perempuan Miskin di Daerah Eksplorasi Migas (N=200, Dalam %)	77
Tabel 10	Akibat Positif yang dirasakan Keluarga Reponden Pasca Pembangunan Industri Migas	81
Tabel 11	Lapangan Kerja atau Usaha yang Tumbuh di Daerah Responden Pasca Pembangunan Industri Migas	82
Tabel 12	Keterampilan yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Perempuan Miskin	83
Tabel 13	Peluang Responden Memasuki Lapangan Kerja Baru yang Muncul Pasca Pembangunan Industri Migas	84
Tabel 14	Ketersediaan Lapangan Kerja dan Keuntungan Pembangunan Industri Migas Bagi Perempuan	85
Tabel 15	Peluang Perempuan Miskin dalam mengembangkan Kegiatan Produktif Pasca Pembangunan Industri Migas	86
Tabel 16	Faktor-faktor yang Menghambat Peluang Perempuan Miskin Mengembangkan Kegiatan usaha Pasca Pembangunan Industri Migas	87
Tabel 17	Akibat Negatif yang Menimpa Keluarga Responden Pasca Pembangunan Industri Migas	88
Tabel 18	Kondisi Peran Responden di Kegiatan Produktif maupun Domestik Sejak Adanya Industri Migas	89
Tabel 19	Peran Perempuan dan Suami dalam Menjalankan Usaha yang Ditekuni Pasca Pembangunan Industri Migas (N=168)	90
Tabel 20	Pihak yang Berperan Melaksanakan Pekerjaan Domestik Pasca Pembangunan Industri Migas	91
Tabel 21	Kondisi Usaha yang Ditekuni Responden Pasca Pembangunan Industri Migas (Dalam Persentase; N=200)	95

Tabel 22	Prospek Usaha atau Pekerjaan yang Ditekuni Responden, Asal Modal dan Tingkat Kebutuhan Terhadap Bantuan Pemerintah (Dalam %, N=200)	97
Tabel 23	Kendala-kendala yang Menghambat Pengembangan Usaha Reponden (Dalam %; N=200)	99
Tabel 24	Jenis Bnatuan yang Dibutuhkan Untuk Membuka dan Mengembangkan Usaha (Dalam %; N=200)	103
Tabel 25	Usaha yang Mungkin Dikembangkan Untuk Kelangsungan Usaha Pasca Pembangunan Industri Migas (Dalam %; N=200)	105
Tabel 26	Pihak yang Diminta Bnatuan Ketika Responden Menghadapi Masalah yang Berkaitan Dengan Urusan Publik (dalam %; N=200)	109
Tabel 27	Pihak yang Diminta Bantuan Ketika Responden Menghadapi Masalah yang berkaitan Dengan Urusan Domestik (Dalam %; N=200)	110
Tabel 28	Strategi yang Dikembangkan Ketika Menghadapi tekanan Kebutuhan hidup (Dalam %; N=200)	114
Tabel 29	Usaha yang Dilakukan Responden Dalam rangka Menghadapi Proses Perubahan Pasca Pembangunan Industri Migas (Dalam %; N=200)	117
Tabel 30	Keinginan Perempuan Miskin Untuk Mengembangkan Kegiatan Usaha (Dalam %; N=200)	121
Tabel 31	Isu Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan Miskin di Wilayah Eksplorasi Migas di Provinsi Jawa Timur	127

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Bagi perempuan, pembangunan, industrialisasi dan kegiatan eksplorasi migas di mana pun, tak terkecuali di wilayah Propinsi Jawa Timur sesungguhnya selalu akan melahirkan sejumlah dilema. Di satu sisi industrialisasi dan eksplorasi migas diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan pintu terobosan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan perempuan. Tetapi, di sisi yang lain industrialisasi dan investasi berbagai kekuatan komersial di sektor pertambangan migas ternyata tak jarang malah melahirkan proses marginalisasi, kerusakan ekologis dan tidak berkesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan yang seringkali memang menjadi korban pertama dari proses perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di sebuah wilayah, terlebih di wilayah pedesaan seringkali mengancam posisi dan bahkan merubah total peran perempuan, baik peran produktif maupun peran reproduktif yang selama ini mereka kembangkan. Ketika industrialisasi mulai masuk berikut semua pranata sosial yang menyertainya, maka dapat dipastikan sejumlah perempuan niscaya akan kehilangan wilayah kelolanya, dan bahkan bukan tidak mungkin akan mematikan peran produktif perempuan. Padahal, kekuasaan manusia akan alat reproduksinya yang merupakan wilayah kelolanya akan sangat besar pengaruhnya terhadap akses-akses yang lain, seperti akses politik, informasi, dan akses pengambilan keputusan serta hubungan-hubungan sosial (Susmiyati, dalam Jurnal Perempuan No. 37, 2003: 8).

Secara garis besar, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industrialisasi, kelola perempuan, dan meningkatnya beban kerja perempuan, yang tak kalah mencemaskan adalah terjadinya proses marginalisasi perempuan, yang ujung-ujungnya akan diikuti pula dengan terjadinya proses depolitisasi peran perempuan. Di wilayah-wilayah yang

memiliki potensi sumber daya alam yang menarik minat investor, seperti sumber migas sudah tentu perubahan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan akan lebih dini terjadi dan lebih cepat karena dihela masuknya industrialisasi dan para pendatang. Posisi dan latar belakang perempuan di pedesaan yang acapkali kurang berpendidikan, dan tak berkeahlian, seringkali membuat mereka harus tersisih dari iklim persaingan di bidang ketenagakerjaan.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, saat ini sejumlah daerah yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam migas adalah Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Di Kabupaten Bojonegoro, tambang minyak dilaporkan termasuk kawasan Blok Cepu, tetapi yang paling banyak dilaporkan ada di kawasan Bojonegoro, yakni di Banyuwir dan Jambaran di Kecamatan Ngasem, Sukowati dan Kemuning yang ada di Kecamatan Bojonegoro. Potensi migas yang ada di Bojonegoro diprediksi sekitar 198 triliun rupiah, belum termasuk hasil penjualan gas. Pengelolaan migas di Kabupaten Bojonegoro ini ditangani oleh Exxon Mobil Indonesia dengan sistem bagi hasil dengan Pertamina, sedangkan Petro China sebagai operator lapangan. Di Kabupaten Tuban dan Lamongan, potensi migas yang ada memang tidak sebesar yang ada di Bojonegoro. Tetapi, meskipun demikian pengelolaannya tetap menarik minat para investor.

Di Provinsi Jawa Timur, kegiatan eksplorasi migas sudah mulai dilakukan sejak tahun 2005, sedang dan terus berjalan hingga kini. Layaknya kegiatan industrialisasi yang lain, operasional eksplorasi migas di sejumlah kabupaten di Jawa Timur ini sudah barang tentu akan melahirkan sejumlah perubahan baru, dan karena itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian baru pula di kalangan masyarakat lokal sekitar lokasi eksplorasi. Bagi kaum perempuan, agar mereka tidak menjadi korban dan tersisih dari dinamika perubahan yang terjadi di kawasan eksplorasi migas ini, tentu ada sejumlah hal yang harus dilakukan dan dikembangkan agar penetrasi industrialisasi pertambangan migas itu tidak menimbulkan proses marginalisasi dan alienasi kaum perempuan.

Di bidang kewirausahaan, secara obyektif harus diakui bahwa peran perempuan sebetulnya cukup menonjol, dan bahkan kinerja mereka cenderung lebih baik daripada laki-laki (lihat: Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, No. 2 Oktober 2003). Di sektor perdagangan tradisional, di sektor informal, dan industri kecil, peran perempuan seringkali terbukti sangat strategis, baik sebagai tenaga kerja produksi, pemasaran atau

juga di bidang pengelolaannya. Tetapi, yang menjadi masalah: ketika kebijakan pembangunan acapkali tidak berpihak kepada perempuan dan konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat seringkali pula menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat, maka jangan heran jika perubahan yang timbul akibat industrialisasi kemudian malah memojokkan peran perempuan.

Secara teoritis, ketika kegiatan industrialisasi hanya mengeksploitasi sumber daya alam, dan tidak melakukan reinvestasi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan, maka dapat dipastikan akan terjadi sejumlah perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya –yang bukan hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat dan peran strategis kaum perempuan setempat. Secara garis besar, sejumlah perubahan yang rawan terjadi dan menimpa perempuan di kawasan eksplorasi migas adalah:

Pertama, kehadiran perusahaan dan kekuatan komersial di wilayah eksplorasi migas, niscaya akan melahirkan perubahan struktural yang memaksa kaum perempuan melakukan reposisi atas peran-peran kewirausahaan mereka. Di wilayah manapun, industrialisasi niscaya akan menyebabkan terjadinya perubahan karena didorong tiga faktor, yaitu proses komersialisasi, infiltrasi dan invasi para pendatang, dan proses difusi.

Kedua, kehadiran industrialisasi dan eksplorasi migas niscaya akan melahirkan pergeseran dan perubahan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya adat-istiadat, tradisi, hukum adat, norma lokal, ritus, gaya hidup, dan bahkan nilai-nilai budaya yang menjadi kerangka acuan berpikir dan hidup masyarakat lokal. Sebuah komunitas atau masyarakat desa yang semula hidup dalam suasana yang personal, niscaya mereka cepat atau lambat akan melakukan proses adaptasi –di mana sebagian kaum perempuan mungkin berhasil, tetapi sebagian perempuan yang lain mungkin gagal sehingga terpaksa harus tersisih dari kehidupan baru yang lahir karena dihela industrialisasi.

Ketiga, kehadiran industrialisasi dan eksplorasi migas dalam beberapa kasus acapkali pula melahirkan potensi pergesekan, dan bahkan konflik yang sifatnya terbuka, karena adanya harapan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika di sebuah wilayah yang relatif belum berkembang, hadir sebuah perusahaan multinasional dengan seluruh pranata yang dimilikinya. Mulai dari soal rekrutmen pegawai, keeksklusifitas gaya hidup

para pendatang, pranata kerja, dan sebagainya jelas perusahaan itu memiliki kriteria dan mekanisme tersendiri, yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat, khususnya kaum perempuan yang kebanyakan secara sosial belum memiliki kemampuan dan basis sosial yang memadai. Pertemuan dua subkultur yang berbeda dalam sebuah proses perubahan sosial dan budaya—terlebih antara kultur dunia industri dan kultur masyarakat lokal, yang acapkali dinilai tidak paralel dengan kepentingan dunia industri—tidak mustahil akan potensial memicu terjadinya gesekan bila tidak dikelola dengan baik.

Berkaca dari pengalaman di masa lalu, kini telah disadari bersama bahwa industrialisasi dan kegiatan eksplorasi migas di wilayah manapun, mau tidak mau harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada komunitas lokal. Artinya, perhitungan-perhitungan yang sifatnya rasional-ekonomi yang biasa dikembangkan kekuatan komersial harus berjalan seiring dengan tanggungjawab sosial yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Seperti dikatakan Gadis Arivia (2003), bahwa di era otonomi daerah seperti sekaang ini, benar-benar dibutuhkan paradigma baru di mana setiap industri pertambangan diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan untuk sampai ke tahap di mana tingkat kesejahteraannya mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya (lihat: Jurnal Perempuan No. 27, 2003: 5).

Studi sebagaimana dilaporkan, selain mengkaji dampak perkembangan industrialisasi migas dan mekanisme *survival* yang dikembangkan perempuan untuk menyalasi tekanan perubahan, juga sekaligus mencoba merumuskan program dan upaya pemberdayaan perempuan miskin di daerah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur. Studi ini penting dilakukan, karena sebagai salah satu kelompok masyarakat yang terkategori marginal, posisi perempuan di daerah eksplorasi migas tergolong rentan dan rawan untuk menjadi korban eksploitasi dan proses marginalisasi yang dipicu terjadinya industrialisasi. Tanpa didukung komitmen dan program intervensi yang tepat dikhawatirkan, kegiatan industrialisasi yang berkembang di daerah eksplorasi migas nantinya hanya akan melahirkan proses marginalisasi yang merugikan peran dan eksistensi perempuan.

2. Permasalahan

Secara garis besar, permasalahan dan fokus kajian penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan rinci bagaimana mekanisme *survival* perempuan miskin, serta bagaimana model dan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan miskin (dan keluarganya) di tengah berlangsungnya industrialisasi migas di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Secara khusus, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran tentang peran perempuan miskin dalam kehidupan domestik rumah tangganya yang berada di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana gambaran tentang potensi dan peran perempuan miskin dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana bentuk jaringan sosial dan strategi yang dikembangkan oleh perempuan miskin dalam upaya mempertahankan hidup keluarganya yang berada di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana model dan program pembangunan yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan miskin dalam kegiatan rumah tangga, kegiatan sosial maupun kegiatan produktif di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur? (*)

BAB II

INDUSTRIALISASI, PEMBANGUNAN DAN GENDER: KERANGKA ANALISIS

Mengkaji proses perubahan sosial-budaya dan dampak industrialisasi pertambangan yang terjadi di sebuah wilayah atau komunitas lokal seperti yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya, paling-tidak harus berfokus pada tiga hal. Pertama, adalah bagaimana mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya percepatan perubahan yang dihele industrialisasi terhadap peran perempuan di sektor domestik maupun publik. Kedua, bagaimana menggambarkan mekanisme adaptasi atau mekanisme *survival* yang dikembangkan perempuan menyiasati tekanan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, mengkaji potensi apa saja yang dimiliki perempuan dalam rangka menyongsong industrialisasi yang terjadi di sekitarnya.

Di Indonesia, banyak studi telah membuktikan bahwa di berbagai daerah, dalam satu-dua dekade terakhir umumnya telah mengalami kecepatan perubahan yang luar biasa dan mendasar dalam perekonomian, pemerintahan, dan moralitas yang berlangsung sejalan dengan tanggapan masyarakat lokal terhadap tekanan-tekanan baru dan sikap mereka untuk memanfaatkan peluang baru yang muncul (Li, 2002: xiv-xv). Artinya, yang namanya masyarakat lokal, termasuk perempuan kini tidak lagi dapat dipahami semata hanya sebagai kelompok masyarakat yang bodoh, yang mempertahankan cara hidup tradisional yang sangat berbeda, dan terbelakang, serta secara geografis dan politik jauh dari pusat pemerintahan. Tetapi, mereka kini adalah bagian dari proses perubahan dan pembangunan yang terjadi di masyarakat, dan bahkan harus ditempatkan sebagai subjek perubahan dan pembangunan itu sendiri. Kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang menafikan eksistensi budaya dan pranata lokal, serta mematikan peran perempuan bukan saja akan melahirkan resistensi sosial, tetapi ujung-ujungnya niscaya akan bersifat kontra-produktif.

1. Faktor Pendorong

Secara teoritis, perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada suatu komunitas lokal yang dirambah proses industrialisasi –tak terkecuali di Propinsi Jawa Timur– pada dasarnya terjadi karena didorong tiga faktor, yaitu proses komersialisasi, perluasan birokrasi pemerintah, dan proses difusi. Komersialisasi di satu pihak mendorong tumbuhnya pola-pola hubungan rasional, kontraktual dan bahkan kalkulatif yang sedikit-banyak didasarkan pada nilai tukar uang. Sedangkan, perluasan birokrasi bukan saja ditandai dengan terjadinya proses nasionalisasi yang makin tersentralistik, tetapi juga proses modernisasi yang makin intensif —yang sedikit-banyak mengabaikan eksistensi budaya tradisional dan pranata masyarakat lokal.

Sementara itu yang dimaksud dengan proses difusi adalah penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Proses difusi sendiri berlangsung baik dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Difusi terjadi manakala terjadi kontak sosial. Difusi selalu merupakan proses dua-arah, namun bersifat selektif. Sebuah kelompok menerima beberapa unsur budaya dari kelompok lainnya, dan pada saat bersamaan kelompok itu menolak unsur-unsur budaya itu menolak budaya dari kelompok lain tersebut. Difusi biasanya disertai dengan modifikasi tertentu terhadap unsur-unsur serapan.

Dalam praktek: dengan asumsi bahwa keberadaan budaya dan pranata komunitas lokal dinilai tradisional, kuno, tidak efisien, menghambat pembangunan, dan merupakan indikator keterbelakangan, maka sering terjadi dalam sebuah proses rekayasa social, peran dan fungsi nilai, adat-istiadat lokal, lembaga adat, dan pranata-pranata setempat kemudian ditransformasikan atau sama sekali dihilangkan demi keberhasilan pembangunan nasional yang *notabene* lebih menitikberatkan keberhasilan pada aspek ekonomi dan ukuran-ukuran yang bersifat kontraktual.

Faktor-faktor yang dinilai penting dan perlu ditransformasikan ke dalam kehidupan warga komunitas lokal umumnya adalah nilai-nilai baru yang mendorong semangat berkompetisi, etos wirausaha, bantuan modal usaha, dan teknologi modern. Dalam konteks ini, peran birokrasi dan negara –plus kekuatan komersial yang berdiri di belakangnya-- umumnya adalah sebagai motor penggerak modernisasi, yaitu mulai dari

peran sebagai penyedia dana untuk membiayai program modernisasi, melaksanakan, serta mengamankan proyek modernisasi yang mereka rencanakan.

Sedangkan khusus untuk kekuatan komersial —dalam hal ini kepentingan pemilik modal dan dunia industri— umumnya lebih banyak berperan sebagai pengeksploitasi dan pengeksploitasi sumber-sumber yang seharusnya menjadi hak milik komunitas lokal, yang sedikit-banyak kemudian menempatkan mereka sebagai pihak yang harus berhadapan dengan kepentingan komunitas setempat. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika di sebuah wilayah pedesaan hadir sebuah perusahaan multinasional dengan seluruh pranata yang dimilikinya. Mulai dari soal rekrutmen pegawai, eksklusifitas gaya hidup para pendatang, pranata kerja, dan sebagainya jelas perusahaan itu memiliki kriteria dan mekanisme tersendiri —yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat yang kebanyakan secara sosial belum memiliki kemampuan dan basis sosial yang memadai. Tidak mustahil terjadi, pada saat kedua komunitas yang berbeda ini kemudian saling bertemu dan berinteraksi, maka pergesekan, resistensi sosial dan bahkan konflik yang sifatnya terbuka sekali pun niscaya akan potensial muncul.

2. Dampak Perubahan

Selama ini sebetulnya banyak studi telah dilakukan untuk mengkaji proses dan berbagai dampak sosio-budaya yang ditimbulkan selama berlangsungnya kegiatan industrialisasi dan modernisasi di berbagai wilayah pedesaan. Bagi penganut teori modernisasi, perubahan umumnya memang dipandang sebagai sebuah proses alamiah yang mesti dilalui oleh komunitas mana pun, dan jika dalam proses transisi itu terjadi ketegangan, maka secara alamiah niscaya akan dapat diatasi oleh proses adaptasi dan penyesuaian yang sifatnya gradual. Pendek kata, di mata penganut teori modernisasi, perubahan sosial adalah sebuah proses yang dipandang fungsional dan karena itu tak perlu terialu dirisaukan, karena masyarakat dengan segala potensinya untuk selalu menjaga keseimbangan niscaya akan selalu mampu melewati proses perubahan itu demi kemajuan dan kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Apakah benar demikian?

Sebagian ahli yang merupakan penganut teori strukturalis konflik, mereka umumnya memiliki pandangan yang bersifat diametral dan kontradiktif dengan penganut

teori modernisasi. Di mata mereka, kegiatan pembangunan dan gelombang modernisasi atau proses perubahan yang direkayasa dari “pusat” dengan bahasa dunia industri bukan sekadar mendorong terjadinya peningkatan produktivitas masyarakat lokal, tetapi sesungguhnya juga menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial secara dramatis dan massif di berbagai komunitas. Hayami dan Kikuchi (1987), misalnya mencatat, akibat gelombang modernisasi —seperti komersialisasi, rasionalisasi, tekanan penduduk dan teknologi baru— dalam banyak hal telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting pada masyarakat lokal. Isolasi geografis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologis secara pasti mulai tercabik, dan di ujungnya komunitas desa yang semula lembut, personal, harmonis, kolektif dan humanistik pelan-pelan berubah menjadi komunitas yang individualistik, serba kontraktual, terpolarisasi dan sekaligus makin kritis.

Secara umum, kita bisa melihat akibat berbagai kegiatan “pembangunan” di berbagai komunitas yang semula berciri *ruralisme* dan *pluralisme*, pelan namun pasti makin bergeser dan bahkan berubah ke arah *urbanisme* dan *unitarisme* (Soemardjan, 1990: 11). Kawasan pedesaan dan wilayah pedalaman yang semula sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor pertanian dan berpegang kuat pada adat yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan (*ruralisme*), kini cenderung makin individualistik di dalam aneka-ragam profesi non-agraris, dan peran adat pun biasanya hanya menonjol pada kegiatan seremonial atau upacara yang tak memiliki kekuatan untuk mengontrol perilaku warga (*urbanisme*).

Identitas dan kekhasan masing-masing komunitas lokal makin lama juga makin pudar. Desa dan wilayah pedalaman yang semula hidup dengan segala perbedaan atau kebhinekaannya (*pluralisme*), kini secara administratif dan birokratis cenderung makin seragam karena campur tangan negara (*unitarisme*). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5/1979 mengenai Pemerintah Desa yang menghendaki kesamaan dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa di seluruh Indonesia adalah pemicu pertamakali dimulainya penyeragaman kegiatan pembangunan di pedesaan secara nasional.

Di atas kertas dan menurut kalkulasi yang matematis, demi efisiensi, stabilitas, dan ketertiban administratif, kegiatan pembangunan yang serbasama dan tersentralistik mungkin benar diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas birokrasi. Melalui campur

tangan yang intensif dari negara, benar pula bahwa proses pembangunan akan berjalan lebih massal dan cepat. Namun, campur tangan negara yang cenderung otoriter dan bersifat sangat sentralistis dalam pelaksanaan kebijaksanaan dikhawatirkan di saat yang bersamaan juga akan melahirkan berbagai masalah. Loekman Soetrisno (1984), jauh-jauh hari telah menyatakan (dan sekaligus mengingatkan) bahwa peran negara yang terlampau besar dan luas dikhawatirkan akan menyebabkan negara menjadi kurang peka dan merasa bahwa sudah menjadi hak dari aparat negara untuk membatasi warga masyarakat memilih alternatif dalam pembangunan. Bagaimana pun, kita tidak bisa menutup mata bahwa upaya penyeragaman kegiatan pembangunan nasional yang melalaikan eksistensi adat-istiadat, kepercayaan, dan budaya lokal cenderung akan menimbulkan ketegangan daripada kelancaran pelaksanaannya. Banyak bukti menunjukkan, proses pembangunan yang dilakukan semata dari "pusat" acap justru melahirkan kericuhan di tingkat lokal.

Di sisi yang lain, proses perubahan masyarakat yang semata karena dihela industrialisasi bukan cuma menyebabkan terjadinya kesenjangan dan polarisasi sosial, tetapi juga menyebabkan masyarakat lokal seolah teralienasi dari proses perubahan sosial-budaya yang dialami dan terjadi di wilayahnya. Diakui atau tidak, selama ini, yang namanya kepentingan pemilik modal umumnya mereka lebih banyak berorientasi kepada negara —melayani penguasa melalui pola hubungan bisnis yang mengandalkan *patronase*— dan sebaliknya acapkali kurang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, dan bahkan ditengarai justru malah merampasi hak-hak adat masyarakat lokal, sehingga bisa dimaklumi jika kemudian terjadilah apa yang disebut *cultural counter movement* maupun aksi-aksi protes yang sifatnya terbuka. Proses perubahan dan industrialisasi yang menafikan keberadaan komunitas lokal, dan cenderung lebih banyak terekspresi sebagai proses transplantasi daripada sebagai proses transformasi niscaya hanya akan melahirkan ketegangan sosial, bersifat a-historis dan merugikan warga masyarakat lokal.

Secara teoritis, proses industrialisasi dan kebijaksanaan pembangunan yang lahir dan serba dikendalikan oleh negara niscaya bukan cuma menelikung pranata-pranata komunitas desa yang tradisional, tetapi dalam banyak kasus juga makin menambah beban kemelaratan golongan miskin desa dan mengakibatkan merebaknya polarisasi sosial di kalangan masyarakat desa dan wilayah pedalaman.

Manning (1986), misalnya, mencatat sejak tahun enampuluhan —bersamaan dengan mulai merebaknya proses modernisasi dan pembangunan nasional—, ternyata di Indonesia justru muncul berbagai kontradiksi. Pengangguran, setengah pengangguran, dan kemiskinan baik di kota maupun di desa tidak berkurang secara berarti, sekali pun telah tercapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ada kesan kuat bahwa hasil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu saja, sehingga menimbulkan kesenjangan. Bahkan, kesenjangan yang terjadi bukan hanya antara kaya dan miskin dalam masyarakat, namun juga antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti sudah dikaji para ahli, kesenjangan antar kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah memburuk sejak dibukanya perekonomian pedesaan ke arah ekonomi pasar. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan.

3. Industrialisasi dan Dampaknya

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu akibat timbulnya industrialisasi adalah terbentuknya suatu komunitas baru atau perubahan yang begitu cepat dari suatu komunitas yang telah ada. Oleh karena itu industri selalu didirikan di suatu tempat yang berdekatan dengan sumber tenaga dan bahan mentah. Dengan kata lain bahwa keberadaan industri tidak mungkin tumbuh tanpa adanya dukungan komunitas atau masyarakat di sekitarnya.

Hubungan yang bersifat koeksistensi yang terjadi antara industri dan komunitas atau masyarakat sekitar timbul karena berbagai alasan. Alasan pertama yang dirasakan sejak awal berdirinya industri adalah kebutuhan industri akan tenaga kerja. Artinya industri membutuhkan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan dapat masuk setiap hari secara tepat dan terutama tidak memiliki mata pencaharian selain industri tersebut. Alasan kedua, hubungan koeksistensi antara industri dan masyarakat adalah bahwa pasar menjadi pasar yang besar bagi produk industri. Alasan ketiga adalah industri membutuhkan masyarakat sebagai sumber jasa khusus, seperti sarana transportasi yang cocok untuk membawa bahan mentah dari daerah lain atau mengangkut produknya ke tempat lain (Schneider, 1986).

Mengingat hubungan koeksistensi industri dan komunitas itu sangat penting, maka pengembangan masyarakat lokal dalam kegiatan industrialisasi, termasuk kegiatan eksplorasi migas tidak dapat dipandang sebelah mata. Artinya bahwa pengembangan masyarakat di sekitar industri merupakan kewajiban bagi setiap industri atau perusahaan. Lebih-lebih pada industri minyak dan gas yang merupakan sumber devisa besar bagi pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa di Indonesia Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001 telah diberlakukan. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut ada suatu perubahan positif jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum adanya UU Migas yang baru itu, yakni terkait dengan program pengembangan masyarakat atau *Community Development* (CD).

Jika sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, pengembangan masyarakat lebih bersifat sukarela dari perusahaan dengan pertimbangan keberlangsungan usaha di tengah masyarakat sekitar tambang, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pengembangan masyarakat itu hukumnya wajib. Sebagaimana tercantum secara jelas dalam Bab VIII Pasal 40 Ayat 3, 4, 5 dan 6, dari UU Migas No.22/2001 di mana ditegaskan, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Artinya, melalui mekanisme pasar tersebut, terhadap Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang tidak melaksanakan kewajiban dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat, maka dapat diberikan sanksi baik bersifat administratif maupun pemberian sanksi lainnya.

Sejak pasca reformasi, diakui atau tidak ada kecenderungan baru yang muncul, yaitu semakin tingginya kesadaran terhadap pemberdayaan masyarakat. Bahkan sejak proses pembahasan di tingkat Rancangan Undang-Undang pun telah berkembang semangat mengenai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat setempat atau sekitarnya untuk ikut serta dapat memperoleh manfaat dari adanya suatu kegiatan usaha minyak dan gas, sehingga hasil dari minyak dan gas bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh pihak luar.

Bersamaan dengan otonomi daerah (otda), maka diakui atau tidak muncul suatu kesadaran bahwa oprasionalisasi tambang migas dan termasuk pula tambang mineral

lainnya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi tambang. Perusahaan tambang migas khususnya, kini harus menyusun suatu program *community development* (CD) mulai dari misi, sasaran, strategi, tahap implementasi dan koordinasi. Sementara itu, sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam program *community development* (CD), kebanyakan perusahaan lebih memfokuskan pada tiga sektor, yaitu sektor ekonomi UKM (Usaha Kecil Menengah), sektor pendidikan, dan kesehatan.

Tentang pilihan fokus kegiatan mana yang dikembangkan perusahaan, sudah tentu tergantung pada kesepakatan atau pembicaraan tiga pihak, yakni manajemen perusahaan, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat. Yang penting, dengan cara membangun kesepakatan sejak awal antara perusahaan dan masyarakat, diharapkan tidak akan ada keluhan dari masyarakat bahwa program pengembangan masyarakat yang dijalankan terkesan mubazir atau dipaksakan. Pemda juga senang karena dibantu dalam hal peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Di sektor ekonomi tidak sedikit perusahaan migas yang mengembangkan industri rumah (*home industry*). Dengan demikian, berarti bahwa program pengembangan masyarakat semakin penting artinya untuk keberlangsungan industri migas dan tambang lainnya maupun masyarakat di sekitar industri tersebut.

4. Posisi Perempuan Dalam Pembangunan

Di manakah sebetulnya posisi perempuan dalam pembangunan, termasuk ketika di sebuah wilayah dikembangkan industrialisasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat sekilas paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan di hampir semua negara di dunia. Paradigma pembangunan yang dominan dan dianggap telah mapan adalah paradigma pembangunan yang hanya megutamakan faktor ekonomi, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lain seperti aspek-aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menunjukkan angka yang tinggi, justru semakin memperlebar jurang kemiskinan (terutama pada kelompok perempuan). Kenyataan menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum secara merata dapat dinikmati. Artinya pembangunan belum memberi manfaat secara adil baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Pembangunan yang dianggap “netral” (tanpa membedakan laki-laki dan perempuan) dan diharapkan dapat memberi efek manfaat yang sama kepada semua warga, justru memberi kontribusi munculnya ketidaksamaan dan ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan istilah kesenjangan gender (*gender gap*) dan berakibat timbulnya permasalahan gender (*gender issues*).

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan itu misalnya dapat dilihat dari:

- Masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha terutama di sektor formal;
- Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja;
- Pembagian kerja yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan telah terlibat dalam pekerjaan produksi. namun kerja kerja reproduksi di dalam rumah tetap dianggap sebagai tanggung jawab perempuan;
- Posisi perempuan di wilayah sosial dan politik masih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
- Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarga. namun perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga, dan dianggap tenaga cadangan (sekunder).

Dalam kajian gender, kepentingan perempuan untuk memperbaiki posisi/statusnya dalam masyarakat menjadi semakin terganggu jika kesulitan ekonomi ekonomi menekan mereka. Sebab itu mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan menjadi keharusan dengan alasan obyektif yaitu perbaikan perekonomian (*economic performance*) sekaligus alasan subyektif, yaitu demi keadilan ekonomi dan kesetaraan gender. Oleh karenanya, menjadi kewajiban bagi pemerintah dan khusus bagi pengambil kebijakan untuk secara sengaja melakukan tindakan khusus (*special measures*) dengan mempertimbangkan kondisi spesifik perempuan yang ditujukan untuk memperbaiki statusnya.

Kenapa perempuan perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pembangunan? Bila dalam keadaan normal saja perempuan telah terperangkap dalam situasi marginal (seperti buta aksara, pendidikan rendah dan dalam budaya diam) yang merupakan cerminan dari kemiskinan sosial. maka dalam masyarakat yang mengutamakan industri dengan teknologi tinggi jelas hal itu akan makin memperparah kondisi tersebut. Apalagi dengan adanya industri minyak dan gas di mana tenaga kerja yang terserap adalah laki-laki dan memiliki kemampuan yang tinggi yang *notabene* juga dari luar masyarakat sekitar industri, maka kelompok perempuan yang memiliki karakteristik spesifik dalam struktur ekonomi social akan semakin terpuruk kehidupannya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kelompok perempuan yang telah mendominasi kelompok miskin permanen merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan dan paling mudah terkena hantaman jika perubahan kondisi ekonomi negatif terjadi dalam masyarakat.

Fakta bahwa posisi perempuan yang sangat potensial baik sebagai kelompok miskin permanen sekaligus kelompok yang rentan terhadap kemiskinan tiba-tiba sudah semestinya menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan terutama untuk melakukan tindak khusus yang ditujukan pada kelompok perempuan tersebut. Jika benar bahwa Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001 telah diberlakukan, mestinya juga memperhatikan kelompok perempuan yang *notabene* masuk kategori miskin. Oleh karena itu orientasi kebijakan semacam ini sangat diperlukan untuk menciptakan peluang sosial yang memungkinkan kelompok perempuan terlibat dalam proses pengembangan ekonomi.

Secara lebih tegas Mosser (1991) mengemukakan bahwa kondisi khusus perempuan yang buta aksara, teknologi, dan tidak biasa bicara meskipun untuk dirinya sendiri ini membutuhkan suatu pendekatan yang mengadopsi *community development* di atas. Mosser (1991) memberikan jalan keluar dengan temuannya tentang kebutuhan spesifik perempuan yang dirumuskan dalam kebutuhan praktis gender (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari) dan kebutuhan strategis gender (untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat). Klasifikasi tersebut didasarkan pada temuan sebagai kaitan dengan adanya peran majemuk perempuan yaitu peran reproduksi (berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik) peran produktif (peran ekonomi di sektor publik), dan peran sosial (peran komunitas).

Oleh karena itu, program pembangunan khususnya untuk kelompok perempuan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik perempuan tersebut. Hal ini berarti bahwa desain atau rencana program pembangunan khususnya untuk perempuan harus memenuhi kebutuhan spesifik perempuan baik kebutuhan praktis maupun strategis gender. Meskipun orientasi utama dalam program pembangunan pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan kebutuhan strategis guna mencapai terwujudnya kesetaraan gender untuk jangka panjang, namun bukan berarti pemenuhan kebutuhan praktis tidak penting, sebab pemenuhan kebutuhan praktis justru sebagai dasar dan sarana terpenuhinya kebutuhan strategis gender.

5. Pendekatan Pembangunan

Di berbagai negara dunia ketiga terutama sejak dua dekade terakhir, telah mengembangkan suatu kebijakan, program dan proyek yang secara khusus dirancang untuk membantu perempuan. Namun, sampai sejauhmana perencanaan itu telah memenuhi kebutuhan gender perempuan, maka perlunya penelaahan konsep yang mendasari berbagai pendekatan kebijakan tersebut. Ada lima pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan kesejahteraan. Ada tiga asumsi yang mendasari pendekatan kesejahteraan ini. Pertama, perempuan dianggap lebih sebagai penerima pasif daripada sebagai subyek pembangunan. Kedua, peran pengasuhan (*motherhood*) merupakan peran yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat. Ketiga, mengasuh anak adalah peran perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Pendekatan ini dianggap berorientasi pada keluarga, dengan pusat perhatian pada kelompok perempuan dalam peran produktif, serta mengasumsikan laki-laki memiliki peran produktif, hubungan ibu-anak sebagai pusat perhatian mereka. Implementasi pendekatan ini adalah pemberian bantuan cuma-cuma secara top down dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi pendekatan ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan praktis gender yang berkaitan dengan peran reproduksi perempuan. Penekatan ini mengidentifikasi perempuan sebagai persoalan daripada sebagai sumberdaya. Oleh karena pendekatan ini menggunakan metode *top down* dalam pelaksanaannya, maka pendekatan ini justru menimbulkan ketergantungan perempuan dan tidak membantunya untuk lebih mandiri. Meskipun demikian pendekatan

kesejahteraan ini lebih populer karena aman secara politis, tidak mempersoalkan peran tradisional yang diterima perempuan dalam pembagian kerja secara seksual. Akan tetapi dengan asumsi-asumsi tersebut justru mengesampingkan peran perempuan dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pembangunan yang besar dan menyediakan dana pembangunan dalam proporsi yang signifikan (Mosse, 1996: 198).

Kedua, pendekatan keadilan. Pendekatan ini menyadari bahwa perempuan adalah peserta aktif dalam proses pembangunan. Sebab melalui peran reproduktif dan produktif, perempuan memberi sumbangan yang penting, meskipun sumbangan tersebut acapkali tidak diakui bagi pertumbuhan ekonomi. Asumsi pokok pendekatan ini adalah bahwa strategi-strategi ekonomi seringkali berdampak negatif pada kaum perempuan, dan karena itu kaum perempuan harus dilibatkan dalam proses pembangunan dengan meningkatkan akses dan kesempatan kerja, sehingga pendekatan ini menyadari akan kebutuhan praktis gender terutama dalam memperoleh pekerjaan.

Buvinic (1986) menjelaskan bahwa fokus utama pendekatan ini adalah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan publik, pribadi maupun dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi. Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa asal usul subordinasi kaum perempuan tidak hanya dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di lokasi pasar (*market place*), sehingga pendekatan ini lebih mementingkan kemandirian ekonomi sebagai wujud keadilan. Pendekatan ini berusaha mengurangi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pembagian kerja secara seksual, maka pendekatan keadilan ini juga memenuhi kebutuhan strategis gender. Program-program keadilan ini diidentifikasi sebagai persamaan hak. Ide pokoknya adalah pengabaian peran perempuan dalam proses pembangunan, karena itu perlu suatu proses redistribusi, dimana kaum laki-laki harus membagi sedemikian rupa sehingga kaum perempuan dari semua tingkatan sosial ekonomi memperoleh manfaat, dan laki-laki di semua tingkatan dapat mengurangi kekuasaannya, bahkan jika perlu melalui diskriminasi positif.

Ketiga, pendekatan anti kemiskinan. Pendekatan anti kemiskinan atau *anti poverty approach* melihat bahwa ketidakadilan ekonomi antara laki-laki dan perempuan tidak dikaitkan dengan subordinasi, tetapi berkaitan dengan kemiskinan, karena itu perhatiannya bergeser dari upaya mengurangi ketidaksamaan pendapatan. Menurut

Buvinic (1983) pendekatan ini merupakan versi lain dari pendekatan keadilan, yang timbul sebagai akibat keengganan lembaga-lembaga pembangunan untuk melakukan campur tangan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah terbentuk dalam masyarakat tertentu.

Pusat perhatian pendekatan ini pada anti kemiskinan peran produktif perempuan. Hal ini mengacu pada anggapan bahwa penghapusan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang perlu adanya peningkatan produktifitas perempuan di rumah tangga berpenghasilan rendah. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa akar kemiskinan perempuan dan ketimpangannya dengan laki-laki disebabkan lemahnya kepemilikan tanah dan kepemilikan modal secara pribadi, dan diskriminasi seksual pada pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebebasan untuk memperoleh kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan di kalangan perempuan kelas bawah dengan membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi (akses terhadap sumberdaya produktif). Perhatian utama pendekatan ini adalah pada kebutuhan strategis, terutama pada program KB untuk mengurangi kelahiran, program pendidikan dan ketenagakerjaan.

Keempat, pendekatan efisiensi. Tekanan pendekatan efisiensi, bergeser dari perempuan ke pembangunan, dengan asumsi bahwa meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan di negara dunia ketiga, secara otomatis terkait dengan keadilan. Menurut pendekatan ini, pembangunan hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan (Mosse, 1996: 206). Asumsi bahwa partisipasi ekonomi dapat meningkatkan status perempuan dan berkaitan dengan keadilan telah dikritik secara luas, seperti halnya pengidentifikasian beberapa faktor pokok yang menghambat partisipasi perempuan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan teknologi yang kurang produktif. Maguire (1984) berpendapat bahwa pergeseran dari sumberdaya manusia yang ada untuk pembangunan disia-siakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Sementara apa yang disebut industri pembangunan menyadari bahwa perempuan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, namun betapa pun hal itu bukan lantas berarti bahwa pembangunan meningkatkan perempuan.

Kelima, pendekatan *empowerment* (penguatan diri). Pendekatan ini berkembang sebagai akibat adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan awal *Women In Development* (WID) seperti pendekatan keadilan, karena dianggap dikooptasikan terhadap pendekatan

arti kemiskinan dan efisiensi. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan keadilan, tidak hanya asal usulnya, melainkan juga dalam sebab-sebab, dinamika dan struktur penindasan perempuan yang diusutnya sebagai strategi, yang bermaksud merubah posisi perempuan di dunia ketiga.

Pendekatan ini berdasarkan asumsi dasar yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan pembangunan sebagaimana yang mendasari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini berusaha mengidentifikasi kekuasaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal perempuan. Pendekatan ini tidak menekankan pada "status" perempuan secara relatif terhadap laki-laki, seperti pendekatan keadilan tetapi berupaya memberikan kekuasaan kepada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat.

Perbedaan penting antara pendekatan *empowerment* dengan pendekatan keadilan adalah pada cara, di mana pendekatan *empowerment* berupaya untuk menncapai kebutuhan strategis gender secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis gender. Beda dengan pendekatan keadilan yang melakukan pendekatan konfrontasi, pendekatan *empowerment* membangun basis kebutuhan praktis gender sebagai basis bagi landasan yang kuat untuk mencapai kebutuhan strategis gender (*).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah:

1. Memetakan kondisi kehidupan perempuan miskin dan situasi problematik yang dihadapi serta pergeseran peran perempuan di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi potensi dan peran perempuan miskin dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur.
3. Merumuskan model pembangunan dan program prioritas sebagai masukan kebijakan pembangunan untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan miskin di wilayah eksplorasi migas di Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Penelitian

Studi sebagaimana dilaporkan penting untuk dilaksanakan dan memiliki manfaat sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan kepentingan untuk merumuskan model pembangunan dan strategi pemberdayaan yang benar-benar kontekstual untuk mendorong pengembangan potensi perempuan miskin dalam kegiatan ekonomi produktif. Seperti diketahui, industrialisasi, termasuk kegiatan eksplorasi migas seringkali merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya proses marginalisasi masyarakat lokal, terutama perempuan. Namun demikian, di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, kegiatan eksplorasi migas dan perubahan yang berlangsung di wilayah itu sebetulnya juga melahirkan peluang-peluang dan kesempatan kerja baru bagi perempuan.

Berbagai kesempatan kerja di usaha mikro, sektor industri kecil, pekerja rumahan, dan sejenisnya adalah peluang kerja yang menarik bagi perempuan, bukan saja secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Di tengah keterbatasan pendidikan dan kungkungan nilai-nilai patriarkhis yang bias gender, kesempatan kerja yang ada di usaha mikro bagi

perempuan adalah sebuah jalan keluar yang reliastis. Kendati dalam kehidupan sehari-hari perempuan acapkali masih dibebani dengan tugas-tugas domestik, tetapi itu semua tidak menyurutkan peran perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan.

Kedua, berkaitan dengan makin kuatnya desakan dari berbagai pihak bahwa industrialisasi yang masuk ke wilayah manapun seyogianya tidak melahirkan distorsi dan marginalisasi penduduk lokal, terutama perempuan miskin. Industrialisasi yang menyebabkan tersisihnya penduduk lokal, termasuk perempuan, niscaya hanya akan melahirkan resistensi yang dapat mengancam kelangsungan industri yang bersangkutan di masa depan. Namun demikian, untuk memberi kesempatan bagi perempuan miskin memainkan peran yang strategis dalam pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, tentu yang dibutuhkan adalah model pemberdayaan dan strategi yang benar-benar kontekstual dan kesediaan untuk menempatkan perempuan sebagai subyek pembangunan (*).

BAB IV

METODE DAN PROSEDUR YANG DITEMPUH

Penelitian yang tengah dilaporkan ini pada dasarnya adalah sebuah penelitian deskriptif-kualitatif yang dimaksudkan tidak hanya untuk memetakan situasi problematik yang dihadapi perempuan miskin pasca perkembangan industri migas di Provinsi Jawa Timur, tetapi juga sekaligus menyusun model dan program prioritas untuk memberdayakan perempuan miskin dalam bidang pengembangan ekonomi produktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kajian secara mendalam dan rinci mengenai berbagai hal yang diteliti dan sekaligus menghasilkan kajian praksis yang dapat digunakan sebagai masukan kebijakan pembangunan.

Dalam studi ini, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini ada 2 (dua) tingkat. Pertama, unit analisis tingkat institusi. Dalam arti mencoba mengkaji berbagai kebijakan yang menjadi *concern* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan perempuan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah di daerah industri migas di Provinsi Jawa Timur. Kedua, unit Analisis di tingkat individu, yakni perempuan miskin yang terkena dampak akibat pembangunan dan industrialisasi migas di 4 (empat) wilayah yang diteliti, yaitu di Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik.

Sebagai sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kedalaman dan pemetaan masalah secara rinci, maka yang menjadi subyek penelitian secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, sejumlah informan kunci dan informan non subyek, antara lain adalah aparatur birokrasi yang diasumsikan memahami arah perkembangan dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa Kepala Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Wawancara dilakukan seputar RPJMD dan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, untuk memperoleh data yang dianalisis pada tingkat individu, maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para perempuan yang dikategorikan

miskin oleh komunitas lokal, yang bertempat tinggal di desa tempat berlangsungnya industri eksplorasi migas di wilayah yang diteliti, yaitu di Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. Para perempuan miskin yang diteliti di sini menjadi Informan Subyek.

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan, yaitu data sekunder dan data primer telah dikumpulkan melalui dua cara. Pertama, data sekunder berupa data statistik telah dicoba dikumpulkan dari BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan data dari hasil kajian yang telah dilakukan Perguruan Tinggi dan lembaga yang relevan.

Kedua, data primer telah dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menggunakan 2 (dua) macam teknik, yaitu:

Pertama, melakukan survey lapangan dengan dipandu satu perangkat kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jumlah responden penelitian ini secara keseluruhan ditentukan sebanyak 400 perempuan, dan mereka semua dipilih dari 4 kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Sidoarjo sebagai wilayah yang diasumsikan terkena imbas kegiatan pertambangan migas tersebut.

Kedua, melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) pada sejumlah informan kunci dan informan subyek, khususnya perempuan miskin yang terlibat dan terkena imbas kegiatan industrialisasi migas di Provinsi Jawa Timur. Wawancara mendalam ini perlu dilakukan, sebab studi ini tidak hanya mencari profil perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, tetapi juga berusaha mengkaji dampak industrialisasi dan kegiatan eksplorasi migas terhadap pergeseran peran perempuan, baik di sektor domestik maupun publik.

Tabel 1
Lokasi Penelitian dan Jumlah Responden

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah
Bojonegoro	Bojonegoro	Campur Rejo	50
Tuban	Suko Tuban	Nggandu	50
Gresik	Ujung Pangkah	Ujung Pangkah Wetan	50
Sidoarjo	Porong	Candi Puri	50
Jumlah			200

Kriteria perempuan miskin yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) termasuk perempuan miskin atau dari keluarga miskin, (2)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Kependudukan merupakan modal (dasar) dalam pembangunan termasuk Provinsi Jawa Timur. Sebagai komponen aktif pelaksana pembangunan, penduduk memerlukan sentuhan tersendiri sehingga menjadi semakin berkualitas dan siap jika memasukan masyarakat. Siap dan mampu berperan dalam pembangunan. Sumber daya manusia inilah yang sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan masyarakat itu sendiri. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus meningkat kendati dengan tingkat pertumbuhan yang tetap terkendali. Jumlah penduduk yang besar jumlahnya tanpa ada upaya pengembangan kualitas justru menjadi beban bagi pembangunan.

Salah satu dimensi kependudukan yang cukup penting adalah data menurut kelompok umur. Dari karakteristik kelompok umur dapat diketahui mana yang termasuk tenaga kerja produktif termasuk di dalamnya penduduk yang masih pada usia sekolah. Kelompok lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelompok usia kerja. Karakteristik penduduk berdasarkan usia akan mempermudah merumuskan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan dibidang pendidikan dan lapangan kerja.

1.1. Letak Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang berada di ujung Timur. Secara geografis terletak antara 7,12' hingga 8,48' Lintang Selatan dan 111,0' sampai dengan 114,4' Bujur Timur. Secara garis besar wilayah Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian, yaitu Jawa Timur daratan, kira-kira sebanyak 90 persen dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan sisanya adalah kepulauan Madura dengan luas sekitar 10 persen.

Dari permukaan dataran Provinsi Jawa Timur dapat juga dibedakan menjadi tiga, yaitu dataran tinggi, sedang dan rendah. Dataran tinggi adalah wilayah yang berada

dengan ketinggian rata-rata lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi sebagian besar berupa kawasan pegunungan. Sedangkan dataran sedang adalah wilayah yang mempunyai ketinggian sekitar 45 -100 meter di atas permukaan laut. Sementara itu dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian di bawah 45 meter di atas permukaan air laut.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur kurang lebih 46.428.57 km² terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Geografis Provinsi Jawa Timur terletak sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan di sebelah Timur dengan Pulau Bali. Sedangkan di sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kecenderungan jumlah penduduk di berbagai tempat termasuk di Jawa Timur adalah mengalami peningkatan, kendati angka pertumbuhan penduduk di tiap daerah dapat dikatakan relatif. Angka pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tahun 2006-2007 sebesar 0.84%. Angka pertumbuhan ini lebih kecil dibanding tahun 2002-2006, yang menunjuk angka 1.06%. Beberapa daerah yang menunjukkan angka pertumbuhan penduduk diatas 2% adalah Kabupaten Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kota Probolinggo.

Data statistik terakhir terekam bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 mencapai sebanyak 37.070.731 jiwa. Sedangkan menurut data hasil proyeksi penduduk berdasarkan P4B pada tahun 2004 sebanyak 36.353.527 jiwa, sementara itu pada tahun sebelumnya (pada tahun 2003), sebanyak 36.206.060 jiwa dengan proporsi 50.9 persen penduduk perempuan dan 49.1 persen laki-laki. Berarti penduduk provinsi Jawa Timur tahun 2004 meningkat sebesar 0.41% dibanding tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2002 yaitu sebesar 35.930.460 jiwa. Sedangkan proyeksi penduduk tahun 2007 meningkat menjadi 37.794.003 jiwa.

Tabel 2
Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005

Kabupaten/Kota	Luas Area [km ²]	Kepadatan Penduduk					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
01. Pacitan	1342,42	399	401	403	407	410	413
02. Ponorogo	1271,78	632	634	637	642	646	651
03. Trenggalek	1205,22	554	557	560	566	571	574
04. Tulungagung	1046,22	913	918	924	934	941	948
05. Blitar	1588,79	696	699	704	712	718	720
06. Kediri	1386,05	1.057	1.064	1.074	1.089	1.100	1.105
07. Malang	2979,41	782	785	792	804	812	820
08. Lumajang	1790,9	555	558	562	568	573	578
09. Jember	2477,68	896	901	906	914	920	926
10. Banyuwangi	5782,68	265	266	268	270	272	273
11. Bondowoso	1560,1	452	454	457	462	465	467
12. Situbondo	1638,81	377	379	381	385	388	390
13. Probolinggo	1599,93	642	648	654	662	669	676
14. Pasuruan	1150,75	1.218	1.234	1.248	1.272	1.291	1.300
15. Sidoarjo	634,39	2.538	2.652	2.715	2.818	2.898	2.947
16. Mojokerto	692,15	1.379	1.399	1.421	1.457	1.485	1.504
17. Jombang	903,9	1.287	1.297	1.309	1.328	1.342	1.364
18. Nganjuk	1224,33	835	840	848	861	870	877
19. Madiun	1010,86	648	650	653	657	661	661
20. Magetan	688,82	902	901	902	902	903	904
21. Ngawi	1295,98	646	648	652	657	662	664
22. Bojonegoro	2307,06	522	526	530	537	542	548
23. Tuban	1839,94	581	585	589	596	600	602
24. Lamongan	1669,56	736	740	746	756	763	767
25. Gresik	1191,19	876	890	903	924	941	959
26. Bangkalan	1259,54	695	703	716	736	751	767
27. Sampang	1233,36	668	676	688	709	725	741
28. Pamekasan	792,3	923	934	948	970	987	1.004
29. Sumenep	1998,54	513	517	521	529	535	539
Kota							
71. Kediri	63,4	3.973	3.975	3.989	4.012	4.029	4.081
72. Blitar	32,57	3.777	3.787	3.806	3.836	3.859	3.910
73. Malang	110,06	6.925	6.974	7.014	7.078	7.126	7.196
74. Probolinggo	56,66	3.503	3.534	3.570	3.627	3.670	3.714
75. Pasuruan	35,29	4.955	5.008	5.066	5.159	5.231	5.257
76. Mojokerto	16,46	6.749	6.804	6.906	7.071	7.197	7.233
77. Madiun	33,23	5.102	5.100	5.117	5.144	5.164	5.220
78. Surabaya	326,36	8.112	8.125	8.197	8.270	8.325	8.335
79. Batu	92,78	1.873	1.910	1.939	1.994	2.041	2.065
Jawa Timur	46.428,57	774	780	787	798	807	814

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2008 dan Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur tahun 2007

Sementara hasil proyeksi penduduk berdasarkan P4B untuk tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Surabaya setidaknya tahun 2001-2007 memiliki jumlah penduduk terbesar dibanding kabupaten/kota yang lain. Pada tahun 2004 penduduk kota Surabaya sebanyak 2.675.158 jiwa. Sementara pada tahun sebelumnya (2003) jumlahnya sebanyak 2.660.381 jiwa dengan proporsi penduduk perempuan sebesar 50,5 persen dan laki-laki sebesar 49,5 persen. Pada tahun 2007 mencapai sebanyak 2.720.156 jiwa.

Dimensi lain dari kependudukan adalah soal kepadatan. Kepadatan penduduk menunjukkan hubungan antara batas geografis suatu daerah jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Dengan kata lain kepadatan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administratifnya. Bisa jadi suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sama dengan daerah lainnya belum tentu memiliki tingkat kepadatan yang sama. Karena itu jumlah penduduk di suatu daerah tidak selalu berkorelasi positif dengan kepadatannya. Jumlah penduduk di suatu daerah sangat tinggi akan memiliki tingkat kepadatannya rendah, jika daerahnya lebih luas dibanding daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kepadatan yang terjadi akan mengiringinya, yaitu semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa kepadatan dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir (2002-2007) kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur terus menerus merangkak naik. Pada tahun 2002 angka kepadatan penduduk di Jawa Timur mencapai sebanyak 774 orang per kilometer persegi. Pada tahun-tahun berikutnya semakin menanjak naik. Angka kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai sebanyak 807 orang perkilometer persegi. Pada tahun 2007 angka kepadatan meningkat menjadi 814 perkilometer persegi. Semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat vital seperti penyediaan ruang atau spasial untuk tempat tinggal yang layak.

Peningkatan penduduk tanpa diikuti dengan penyediaan berbagai kebutuhan manusia yang termasuk primer akan dapat semakin menurunkan kualitas kehidupan itu sendiri. Selain itu juga akan semakin menurunkan kualitas lingkungan, manakala kebutuhan akan spasial tidak disediakan. Kawasan-kawasan kumuh akan lahir diberbagai

tempat seiring dengan kepadatan penduduk yang tidak diikuti dengan penyediaan berbagai fasilitas untuk kelangsungan kehidupan manusia.

Pada tahun 2007 angka kepadatan penduduk Jawa Timur sebanyak 814 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan ini meningkat dibanding pada tahun sebelumnya (2006), yaitu sebanyak 807 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu pada tahun 2002 kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai sebanyak 774 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan ini selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1997 angka kepadatannya mencapai 716 jiwa per kilometer persegi. Berturut-turut tahun 1998 sebesar 720 jiwa per kilometer persegi, tahun 1999 sebesar 725 jiwa per kilometer persegi, tahun 2000 sebesar 732 jiwa per kilometer persegi, dan tahun 2001 sebanyak 738 jiwa per kilometer persegi.

Pada umumnya tingkat kepadatan yang tinggi dapat ditemukan di daerah perkotaan dibanding dengan pedesaan. Dengan kata lain di daerah perkotaan umumnya lebih padat dibanding dengan pedesaan. Kota masih tetap menjadi daya tarik siapapun untuk mendatanginya. Sampai saat ini kota masih menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga peluang pekerjaan jauh lebih bervariasi dibanding pedesaan.

Data penduduk akhir tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 8 daerah kota semuanya memiliki angka kepadatannya yang lebih tinggi dibanding kabupaten. Angka kepadatan paling tinggi terdapat di kota Surabaya, yaitu mencapai sebesar 8.335 jiwa per kilometer persegi. Kemudian berturut-turut disusul, daerah kota Mojokerto sebesar 7.233 jiwa per kilometer persegi. Sementara angka kepadatan tertinggi daerah kabupaten akhir tahun 2007 mencapai sebesar 2.947 jiwa per kilometer persegi yang terdapat di kabupaten Sidoarjo. Sebaliknya angka kepadatan paling rendah terdapat di kabupaten Banyuwangi. Kawasan kabupaten yang berada di ujung Timur provinsi Jawa Timur memiliki angka kepadatan hanya sebesar 273 jiwa per kilometer persegi.

Tingginya jumlah penduduk dan kepadatannya di Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari karakter sebagai kota besar. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar yang sekaligus sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang untuk merintis dan berusaha melakukan mobilitas sosial baik di bidang

pekerjaan, pendidikan dan penghasilan. Daya tarik kota Surabaya antara lain disebabkan menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan industri serta pendidikan.

Komposisi penduduk berdasarkan umur memiliki arti penting dalam banyak hal. Seperti telah banyak dipahami secara umum, komposisi penduduk terbagi menjadi tiga. Kategori di bawah 14 tahun adalah usia sekolah atau anak-anak. Karena itu kelompok usia ini tergolong tenaga kerja yang tidak produktif. Kategori kedua antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun tergolong usia produktif. Bagi pegawai negeri atau tentara/polisi usia ini termasuk masa aktif, belum masuk usia pensiun.

1.3. Ketenagakerjaan

Masalah pengangguran masih tetap memerlukan perhatian tersendiri seiring dengan pertumbuhan penduduk dan masuknya angkatan kerja baru ke dalam busa pasar kerja. Pasang-surut perkembangan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesempatan kerja yang tersedia akan juga meningkat, sehingga angka pengangguran otomatis akan menurun. Tetapi, lain soal ketika pertumbuhan ekonomi mulai kehilangan gairah, dan industri goyah karena harus berhadapan dengan kenaikan biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga BBM.

Diduga angka pengangguran meningkat pasca kebijakan kenaikan BBM. Sejak pemerintah memutuskan menarik sebagian subsidi harga BBM, maka sejak itu pula kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya mulai kembali goyah. Akibat imbas kenaikan harga BBM tidak sedikit berdampak pada industri-industri yang sebelumnya dapat secara rutin memproduksi akhirnya harus menata ulang kegiatannya. Bahkan, tidak sedikit industri yang terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan karyawannya karena membengkaknya biaya operasional yang tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan. Sementara ada industri lain yang terpaksa mengurangi kegiatannya, dengan konsekwensinya tidak merumahkan pekerja tetapi hanya mengurangi jam kerja.

Terlepas siapa yang harus dipersalahkan, akibat yang nyata dari kenaikan harga BBM untuk saat ini adalah semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang

menganggur. Di sisi lain jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk pasaran kerja tidak dapat dihentikan atau dikendalikan secara maksimal. Sementara itu, lapangan kerja formal yang dapat menyerap penduduk usia kerja jumlahnya amat terbatas atau tidak sebanding. Akibat lebih lanjut adalah tingkat rasio antara tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja semakin tinggi.

Konsep Angkatan Kerja (AK) adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti dan sebagainya) serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Konsep bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam dengan catatan dilakukan berturut-turut dan tidak terputus oleh kegiatan lainnya. Sementara itu mencari kerja adalah kegiatan yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Definisi bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu secara terus-menerus.

Definisi pengangguran yang dipakai dalam Susenas adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan tapi mau bekerja jika ada peluang atau tidak mencari pekerjaan/tidak mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.,

Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja.

Tabel 3

**Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 - 2007**

No	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pacitan	316,460	305,920	300,521	330,137	378,537
2	Ponorogo	445,371	451,169	497,443	468,608	554,251
3	Trenggalek	354,370	344,842	354,941	374,758	417,543
4	Tulungagung	508,841	486,161	531,931	534,171	604,983
5	Blitar	567,980	574,269	572,288	606,166	614,546
6	Kediri	788,924	745,085	750,360	796,032	772,922
7	Malang	1,231,540	1,181,482	1,259,054	1,279,359	1,301,797
8	Lumajang	532,221	486,987	499,662	521,408	511,142
9	Jember	1,047,362	1,011,870	1,070,765	1,097,415	1,203,627
10	Banyuwangi	814,456	751,529	844,909	826,917	849,316
11	Bondowoso	372,867	356,703	375,894	382,079	391,158
12	Situbondo	311,789	311,571	328,767	328,461	366,130
13	Probolinggo	503,447	484,928	523,402	560,305	599,031
14	Pasuruan	717,090	695,667	735,403	736,039	807,235
15	Sidoarjo	805,936	778,088	883,936	861,788	910,851
16	Mojokerto	466,161	462,204	493,878	526,852	542,104
17	Jombang	529,003	500,757	558,123	591,884	649,418
18	Nganjuk	515,615	500,339	507,514	538,051	556,881
19	Madiun	324,051	326,824	331,297	348,509	354,140
20	Magetan	344,862	334,246	350,387	370,108	405,597
21	Ngawi	406,884	410,216	440,371	446,764	501,899
22	Bojonegoro	607,207	582,619	624,993	676,677	683,781
23	Taban	579,550	555,320	550,814	555,197	575,255
24	Lamongan	660,179	619,545	647,526	679,677	649,878
25	Gresik	490,226	510,478	496,246	546,661	580,863
26	Bangkalan	422,509	368,553	416,383	467,954	436,230
27	Sampang	421,764	384,825	335,975	420,146	454,440
28	Pamekasan	378,879	416,354	359,248	414,836	433,768
29	Sumenep	585,722	597,832	594,818	648,746	627,933
71	Kota Kediri	121,262	125,084	124,205	131,347	133,460
72	Kota Blitar	56,986	57,383	57,910	58,559	67,767
73	Kota Malang	344,452	359,122	381,128	382,224	401,545
74	Kota Probolinggo	84,098	86,165	92,097	89,970	103,856
75	Kota Pasuruan	74,700	76,306	81,621	82,996	83,381
76	Kota Mojokerto	51,192	51,920	56,004	59,341	58,167
77	Kota Madiun	72,073	76,311	78,883	87,352	31,744
78	Kota Surabaya	1,242,221	1,234,865	1,340,682	1,330,417	1,355,335
79	Kota Batu		86,699	91,945	93,612	97,413
	JAWA TIMUR	18.098.250	17.690.238	18.591.324	19.244.959	20.117.924

Sumber: Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 2007

Perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir (2003-2007) tampak selalu mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2005 ke tahun 2006. Jumlah penduduk Jawa Timur usia 15 ke atas pada tahun 2003 sebanyak 18.097.118 jiwa. Kalau dilihat per kabupaten/kota, pada tahun 2003 ini jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas paling tinggi terdapat di kota Surabaya sebanyak 1.276.239 jiwa. Kemudian disusul kabupaten Malang sebanyak 1.226.094 jiwa dan kabupaten Jember sebanyak 1.045.200 jiwa.

Data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 2007 mendasarkan angkatan kerja pada penduduk usia di atas 15 tahun. Dari dasar ini maka di Jawa Timur tahun 2007 terdapat sebanyak 20.117.924 jiwa penduduk yang termasuk angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2006). Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mencapai sebanyak 19,244,959 jiwa, sedangkan pada tahun 2005 berjumlah sebanyak 18.591.324 jiwa.

Dilihat per kabupaten/kota tahun 2007 jumlah angkatan paling tinggi dapat ditemukan di kota Surabaya, yaitu sebanyak 1.355,335 orang. Jumlah angkatan tahun 2007 ini lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 (1,330,417) jiwa. Data tahun 2007, kalau dilihat dari angka angkatan kerja di Jawa Timur terlihat di kota Surabaya masih terdapat sebesar 6.74%. Sementara itu di kabupaten Malang masih terdapat sebanyak 1.301.797 angkatan kerja atau sebesar 6,47% dan di kabupaten Jember sebesar 1.203.627 angkatan kerja atau sebesar 5.96%. Sebaliknya angka angkatan kerja paling rendah di tingkat kota Madiun sebesar 0.16% (31.744 orang). Sedangkan di tingkat kabupaten angka angkatan kerja paling rendah dapat ditemukan di Madiun sebanyak 354.140 orang atau sebesar 1,76%.

Ketiga kota/kabupaten (Surabaya, Malang dan Jember) memiliki daya magnet sendiri-sendiri sehingga dapat menarik kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk datang. Kota Surabaya misalnya merupakan kota terbesar di Jawa Timur merupakan magnet tersendiri bagi siapa saja. Sebagai kota besar, Surabaya memiliki fasilitas lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Kebutuhan ekonomi, misalnya untuk mengadu nasib mencari pekerjaan, kota Surabaya seakan tidak pernah jenuh.

Demikian juga kebutuhan akan pendidikan di kota Surabaya dan juga dua kabupaten lainnya terdapat fasilitas yang lebih dari memadai.

Tabel 4

Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Jatim Tahun 2003 - 2007

No	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pacitan	298.558	310.056	294.871	318.309	368.230
2	Ponorogo	406.232	438.680	465.210	437.018	527.879
3	Trenggalek	330.656	337.258	303.165	352.074	397.023
4	Tulungagung	466.401	470.583	508.163	498.651	578.821
5	Blitar	517.910	562.443	547.600	572.053	586.673
6	Kediri	714.990	730.765	721.975	731.335	704.194
7	Malang	1.116.831	1.153.849	1.200.668	1.178.977	1.217.965
8	Lumajang	494.589	483.826	484.507	479.714	486.022
9	Jember	973.615	1.016.761	1.051.718	971.975	1.136.549
10	Banyuwangi	757.325	745.150	817.152	765.811	800.072
11	Bondowoso	352.112	364.454	368.891	370.329	376.867
12	Situbondo	289.765	314.652	316.083	308.664	346.232
13	Probolinggo	470.542	478.043	509.564	529.480	578.168
14	Pasuruan	661.676	688.990	704.409	670.600	744.900
15	Sidoarjo	715.788	748.923	803.915	780.786	795.443
16	Mojokerto	426.198	445.379	462.964	484.737	505.891
17	Jombang	469.687	479.239	509.713	535.462	604.130
18	Nganjuk	461.603	486.157	483.243	496.530	520.022
19	Madiun	284.297	304.853	306.748	308.419	318.332
20	Magetan	318.695	332.091	342.763	347.148	383.696
21	Ngawi	368.727	411.970	413.936	405.157	469.731
22	Bojonegoro	556.067	565.316	593.075	617.708	645.000
23	Tuban	523.501	555.019	518.628	517.550	539.387
24	Lamongan	612.287	620.906	626.510	617.708	608.876
25	Gresik	449.019	483.270	477.796	503.589	533.554
26	Bangkalan	392.144	355.368	393.724	408.625	401.777
27	Sampang	400.072	386.306	378.495	402.380	445.435
28	Pamekasan	351.737	417.634	353.289	390.117	414.647
29	Sumenep	550.590	614.386	589.978	606.353	607.368
30	Kota Kediri	100.200	118.444	112.499	115.330	117.209
31	Kota Blitar	48.053	54.260	51.520	52.651	62.180
32	Kota Malang	291.987	333.276	339.250	327.519	356.286
33	Kota Probolinggo	74.110	81.351	82.974	80.745	93.036
34	Kota Pasuruan	66.048	73.319	73.845	71.776	73.930
35	Kota Mojokerto	43.898	50.102	49.560	53.264	51.219
36	Kota Madiun	60.039	70.334	68.116	73.920	69.114
37	Kota Surabaya	1.109.650	1.208.334	1.247.365	1.201.594	1.198.240
38	Kota Batu	-	83.208	85.952	85.406	87.323
	JAWA TIMUR	16.525.698	17.374.955	17.689.834	17.669.660	18.751.421

Sumber : Analisis Indikator Data Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2007

Adanya selisih antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja, berarti terdapat kategori mencari pekerjaan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, di Jawa Timur jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terus menanjak naik. Data ini juga dapat dibaca bisa jadi lapangan pekerjaan semakin tetap bahkan semakin berkurang atau sempit sementara di sisi lain angkatan kerja terus bertambah jumlahnya. Problem penduduk yang mencari pekerjaan ini merupakan masalah yang tidak mudah untuk ditangani secara cepat. Di saat krisis belum pulih benar, maka masalah penduduk yang mencari kerja menjadi masalah tersendiri di masa-masa mendatang.

Sementara itu data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 2007 melihat tenaga kerja tidak berangkat dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, tetapi berusia 15 tahun ke atas. Karena itu data yang tersaji untuk menggambarkan penduduk yang bekerja atau sebaliknya mencari kerja didasarkan pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam kurun waktu lima tahun (2003-2007) penduduk Jawa Timur berusia 15 tahun ke atas yang bekerja cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2007 pencari kerja mencapai sebanyak 18,751,421 jiwa. Berturut-turut angka penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja tahun 2003 (16.525.698 jiwa), tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 17.374.955 jiwa, tahun 2005 sebanyak 17.689.834 jiwa, tahun 2006 menurun menjadi 17.669.660 jiwa dan tahun 2007 semakin meningkat menjadi 18.751.421 jiwa. Angka paling tinggi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2007 dapat ditemukan di kota Malang, yaitu sebanyak 1.217.965 jiwa. Selain itu kota Surabaya menempati urutan nomor dua terbanyak penduduk yang bekerja, yaitu sebanyak 1.198.240 jiwa.

Sebaliknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja umumnya dapat ditemukan di kota dibanding di kabupaten. Tahun 2007 penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak bekerja terendah terdapat di kota Mojokerto, sebanyak 51.219 jiwa atau sebesar 0,27%. disusul kota Blitar sebanyak 62.180 jiwa (0,33%) dan Kota Madiun sebanyak 69.114 jiwa (0,37%). Sedangkan di kabupaten, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja paling rendah terdapat di kabupaten Madiun sebanyak 318.332 jiwa atau sebesar 1,70%. di susul kabupaten Situbondo sebanyak 346.232 jiwa atau sebesar 1,85%.

Tabel 5

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Mencari Pekerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 - 2005

No	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
30.	Sampang	4.686	10.097	11.347	17.766	9.005
31.	Pacitan	5.211	6.550	8.663	11.828	10.307
32.	Bondowoso	5.788	6.181	10.772	11.750	14.291
33.	Kota Kediri	16.700	13.174	12.855	16.017	16.251
34.	Pamekasan	12.191	13.661	9.538	24.719	19.121
35.	Situbondo	9.707	8.917	15.913	19.797	19.898
36.	Trenggalek	9.659	19.057	25.180	22.684	20.520
37.	Sumenep	11.728	6.303	10.868	42.393	20.565
38.	Probolinggo	12.904	24.741	19.044	30.825	20.863
39.	Magetan	12.620	16.973	11.126	22.960	21.901
40.	Lumajang	16.608	21.520	20.105	41.694	25.120
41.	Tulungagung	22.615	33.881	28.960	35.520	26.162
42.	Ponorogo	21.871	29.764	36.986	31.590	26.372
43.	Blitar	28.055	33.248	30.283	34.113	27.873
44.	Ngawi	22.484	14.345	30.664	41.607	32.168
45.	Bangkalan	13.696	24.812	26.682	59.329	34.453
46.	Madiun	27.669	34.023	27.683	40.090	35.808
47.	Tuban	33.797	22.472	37.458	37.647	35.868
48.	Mojokerto	21.847	33.027	35.644	42.115	36.213
49.	Nganjuk	34.391	31.128	29.208	41.521	36.859
50.	Bojonegoro	27.503	38.747	37.977	58.209	38.781
51.	Lamongan	21.866	21.807	27.417	61.969	41.002
52.	Jombang	39.351	40.121	53.618	56.422	45.288
53.	Gresik	22.121	46.577	23.331	43.072	47.309
54.	Banyuwangi	24.939	34.923	36.106	55.106	49.244
55.	Pasuruan	27.288	34.858	38.191	65.439	62.335
56.	Jember	32.362	36.945	29.782	125.440	67.078
57.	Kediri	43.542	40.625	35.761	64.697	68.728
58.	Malang	67.234	78.804	70.653	100.382	83.832
59.	Sidoarjo	59.722	63.385	88.234	81.002	115.408
60.	Kota Blitar	6.890	5.362	6.916	5.908	5.587
61.	Kota Malang	40.053	40.402	45.344	54.705	45.259
62.	Kota Probolinggo	6.838	9.065	9.974	9.225	10.820
63.	Kota Pasuruan	5.844	5.849	8.530	11.220	9.451
64.	Kota Mojokerto	5.428	5.257	6.950	6.077	6.948
65.	Kota Madiun	9.482	9.887	11.463	13.432	12.630
66.	Kota Surabaya	85.404	88.470	106.060	128.823	137.095
67.	Kota Batu		5.512	6.871	8.206	10.090
	JAWA TIMUR	870.094	1.011.170	1.082.224	1.575.299	1.366.503

Sumber : Analisis Indikator Data Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2007

Konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Konsep Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang dalam angkatan kerja.

Kendati terlihat ada kecenderungan peningkatan penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan tetapi terdapat penurunan dari tahun 2006 ke tahun 2007. Pada tahun 2007 penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan sebanyak 1.366.503 jiwa, sementara pada tahun sebelumnya berjumlah sebanyak 1.575.299 jiwa. Kalau dilihat pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 berjumlah sebanyak 870.094 jiwa, tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.011.170 jiwa dan tahun 2005 meningkat lagi menjadi sebanyak 1.082.221 jiwa.

Apabila dilihat perkabupaten/kota jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan paling tinggi terdapat di kota Surabaya. Dari data ini semakin memperkuat kesan bahwa kota besar seperti Surabaya masih menjadi magnet tersendiri bagi penduduk untuk datang mengadu nasib, terutama untuk alasan ekonomi atau mencari pekerjaan. Kendati kemilau keindahan kota dapat menjadi bumerang bagi setiap orang ketika nasib baik untuk mendapat pekerjaan tidak kunjung tiba. Bagi orang yang sudah terlanjur berada di kota pada umumnya akan malu bila tidak berhasil di kota.

Sebagian penduduk yang sudah terlanjur di kota akhirnya memilih bertahan. Akibatnya menjadi beban kota karena tergolong sebagai pengangguran. Terlihat bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan di kota Surabaya paling tinggi dibanding kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu berjumlah sebanyak 157.095 jiwa atau sebesar 11,50%. Sementara itu kabupaten Sidoarjo menempati urutan kedua setelah kota Surabaya, yaitu sebanyak 115.408 jiwa atau sebesar 8,45%.

Tabel 6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 – 2007 (persen)

	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Lumajang	69,54	69,21	66,96	64,91	64,29
2.	Bangkalan	70,81	64,68	70,29	69,86	64,75
3.	Gresik	64,54	66,85	63,17	64,74	65,77
4.	Jombang	62,61	62,85	65,35	64,65	66,21
5.	Jember	62,96	66,74	69,05	65,12	66,36
6.	Madiun	62,72	67,02	68,74	67,15	66,44
7.	Tuban	70,47	73,80	67,95	65,20	66,65
8.	Sidoarjo	62,93	64,55	67,28	63,20	66,97
9.	Kediri	68,65	70,99	69,81	68,80	67,32
10.	Lamongan	71,19	71,22	71,67	69,68	67,98
11.	Bojonegoro	65,32	66,83	66,98	68,23	68,13
12.	Nganjuk	65,47	68,27	67,03	65,98	68,86
13.	Bondowoso	69,76	71,28	70,90	69,13	69,87
14.	Malang	65,81	71,47	72,24	69,24	69,90
15.	Blitar	67,54	71,32	68,38	69,36	70,04
16.	Banyuwangi	69,41	70,92	73,45	68,11	70,44
17.	Mojokerto	65,49	68,07	67,26	66,94	70,66
18.	Ngawi	64,13	68,31	68,62	66,74	71,64
19.	Pasuruan	69,40	71,07	10,01	66,35	71,97
20.	Situbondo	64,96	69,61	68,74	65,90	72,42
21.	Sampang	76,36	72,91	67,67	70,32	73,14
22.	Probolinggo	65,80	66,34	67,81	69,81	73,46
23.	Pamekasan	72,28	81,07	70,58	72,18	73,62
24.	Sumenep	72,87	78,66	77,72	75,82	75,41
25.	Ponorogo	66,02	70,27	73,11	67,12	75,70
26.	Tulungagung	70,31	71,38	72,55	70,57	75,85
27.	Trenggalek	69,84	70,57	70,16	70,09	77,65
28.	Magetan	69,99	74,21	72,99	73,03	78,32
29.	Pacitan	76,84	77,90	73,91	75,27	83,67
	Kota					
30.	Madiun	56,49	59,37	63,64	64,62	56,65
31.	Malang	57,62	62,38	64,86	61,71	60,47
32.	Pasuruan	57,65	64,46	64,78	61,94	60,96
33.	Surabaya	61,95	65,46	66,77	63,42	62,01
34.	Mojokerto	61,46	65,93	65,86	64,70	62,98
35.	Probolinggo	57,20	62,04	63,73	58,46	63,36
36.	Kediri	63,73	69,15	67,69	66,58	64,53
37.	Blitar	61,89	64,24	63,61	60,54	65,61
38.	Batu	-	66,27	66,78	67,35	66,10
	JAWA TIMUR	66,64	69,20	69,17	70,41	68,99

Sumber : Analisis Indikator Data Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2007

Sementara itu di Sampang dan Pacitan merupakan dua kabupaten yang menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan terendah, masing-masing berjumlah 9.005 jiwa dan 10.307 jiwa. Di dua kabupaten ini bukan berarti lebih baik kondisinya –jumlah pencari kerja paling sedikit– dibanding kota Surabaya atau kabupaten Sidoarjo, tetapi sebagian besar jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sudah hengkang dari kampung halamannya.

Berdasarkan data Analisis Indikator Data Makro Provinsi Jawa Timur tahun 2007 terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2007 menurun dibanding 2006 maupun tahun 2006. Tahun 2007 TPAK di Jawa timur mencapai sebesar 68,99%, sementara tahun 2006 sebesar 70,41% dan tahun 2006 sebesar 69,20%. Data seperti ini dapat juga menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia di atas 15 tahun yang menganggur atau tidak bekerja. Kalau melihat lebih detail perkabupaten/kota tampak bahwa kabupaten Pacitan menunjukkan angka TPAK tertinggi, yaitu sebesar 83,67%. Sebaliknya di kabupaten Lumajang menunjukkan angka sebesar 64,29%. Sedangkan di tingkat kota terlihat bahwa Madiun menempati urutan terendah angka TPAK sebesar 56,65% dan kota Batu tertinggi dengan angka TPAK sebesar 68,99%.

Sementara itu angka tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003-2007) terlihat fluktuatif. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran di Jawa Timur mencapai 6,79%. Angka pengangguran terbuka tahun 2007 ini lebih kecil dibanding pada tahun 2006 yang mencapai sebesar 8,19%. Kendati demikian, jika dibanding pada tahun-tahun berikutnya, angka pengangguran terbuka baik tahun 2006 atau 2007 lebih tinggi. Berturut-turut tahun 2003 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,81%, tahun 2004 meningkat menjadi 5,72% dan tahun 2005 meningkat menjadi 5,82. Per daerah angka tingkat pengangguran terbuka lebih banyak terdapat di kota dibanding kabupaten. Per kabupaten/kota tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tertinggi terdapat di Kota Madiun, yaitu sebesar 15,45%, sebaliknya terendah terdapat di Sampang, yaitu sebesar 1,98%.

1.4. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah termasuk provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Hanya saja ketika menghitung pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB ADHK yang di dalamnya sudah dihilangkan faktor kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Ketika krisis (ekonomi) menimpa Negara Indonesia, berimbas juga pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sebelum adanya krisis kondisi ekonomi di Jawa Timur masih tergolong stabil. Kestabilan posisi ekonomi Jawa Timur dapat dilihat pada Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 1997 yang tergolong besar, yaitu mencapai sebesar 5,02%. Tetapi pertumbuhan ekonomi sebesar itu tidak bertahan lama. Akibat krisis yang mulai berlangsung pertengahan tahun 1997, dampaknya sangat terasa pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998. Pada tahun ini (1998) alih-alih pertumbuhan ekonomi dapat bertahan seperti tahun sebelumnya, justru menurun drastis hingga di bawah nol persen. Atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami posisi minus. Dalam bahasa statistik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 1998 mengalami kontraksi hingga 16,22%. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,22%. Untuk kasus tahun 1998 ini barangkali di daerah-daerah lain mengalami kondisi yang tak jauh berbeda. Memasuki pada tahun 1999 mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi negatif kendati belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 1999 angka pertumbuhan ekonomi memang belum sebesar tahun sebelum adanya krisis. Tahun 1999 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur hanya mencapai sebesar sebesar 1,21%. Usaha-usaha pemerintah untuk kondisi perekonomian terus dilakukan. Lambat-laut kondisi perekonomian menunjukkan tanda-tanda ke arah yang semakin baik. Usaha yang dilakukan pemerintah rupanya tidak sia-sia. Hasil perekonomian yang semakin baik dapat dilihat pada angka pertumbuhannya termasuk di Jawa Timur.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2003 dan 2007 (persen)

	Tahun 2003 dan 2007 (persen) Kabupaten/Kota	2003	2007
01.	Pacitan	2.55	4.24
02.	Ponorogo	4.26	5.21
03.	Trenggalek	3.41	4.84
04.	Tulungagung	5.23	6.34
05.	Blitar	4.77	5.76
06.	Kediri	2.46	3.94
07.	Malang	4.53	6.13
08.	Lumajang	4.08	5.79
09.	Jember	4.15	5.57
10.	Banyuwangi	4.41	5.43
11.	Bondowoso	3.39	5.40
12.	Situbondo	4.54	5.58
13.	Probolinggo	4.39	5.54
14.	Pasuruan	5.00	6.28
15.	Sidoarjo	5.36	6.69
16.	Mojokerto	4.78	6.25
17.	Jombang	5.50	6.25
18.	Nganjuk	5.11	6.44
19.	Madiun	3.33	4.96
20.	Magetan	3.79	5.08
21.	Ngawi	3.32	4.98
22.	Bojonegoro	4.27	6.72
23.	Tuban	3.97	5.19
24.	Lamongan	4.15	5.53
25.	Gresik	5.62	7.45
26.	Bangkalan	4.22	5.40
27.	Sampang	3.16	4.74
28.	Pamekasan	3.64	4.68
29.	Sumenep	3.52	4.29
	Kota		
30.	Kediri	5.33	3.88
31.	Blitar	5.57	6.56
32.	Malang	5.23	6.54
33.	Probolinggo	4.51	6.39
34.	Pasuruan	5.00	6.25
35.	Mojokerto	6.33	6.85
36.	Madiun	4.71	5.93
37.	Surabaya	5.11	6.91
37.	Batu	5.28	6.76
	Jawa Timur	4.78	6.05

Sumber: Analisis Indikator Makro Propinsi Jawa Timur Tahun 2007

Pada tahun 2000 angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai sebesar 3,26%. Kendati tidak lagi tumbuh negatif, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2000 ini masih jauh dari harapan kalau dibanding angka sebelum krisis (tahun 1996). Angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai sebesar 3,76%, sementara tahun 2002 terus meningkat hingga mencapai sebesar 3,80%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus beranjak naik hingga data tahun 2005. Tahun 2003 angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus naik dibanding tahun 2003, yaitu menjadi sebesar 4,78%. Pada tahun 2004 angka pertumbuhan semakin naik menjadi 5,83%, sementara tahun 2005 semakin meningkat lagi menjadi sebesar 5,69% dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar 6,05%.

Data dari Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 2007 misalnya dapat dicermati pertumbuhan ekonomi Jawa Timur per sektor. Pada tahun 2007 misalnya dapat dilihat ada sektor-sektor mana yang tumbuh secara positif dan sebaliknya sektor-sektor mana yang tumbuh secara negatif. Kenyataan yang cukup memprihatinkan adalah sub sektor kehutanan. Selama empat tahun terakhir (2003-2007) sub sektor kehutanan terus menerus mengalami pertumbuhan negatif.

Telah diketahui bersama pasca krisis, masyarakat tanpa kendali menebang hutan tanpa peduli akibatnya. Selain menebang kayu-kayu rimbun di hutan-hutan di berbagai tempat, kemudian tidak sedikit membagi tanah-tanah yang tidak ada lagi kayunya menjadi areal pertanian. Mengembalikan hutan yang telah ditebang membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Karenanya tidak mengherankan jika pertumbuhan sub sektor kehutanan dalam waktu empat tahun terakhir (2003-2007) masih tetap negatif. Pada tahun 2002 angka pertumbuhan sub sektor kehutanan mencapai sebesar -4,05%. Pada tahun berikutnya, angka pertumbuhan sub sektor kehutanan semakin parah, yaitu sebesar -31,42%. Pada tahun 2004 angka pertumbuhan sub sektor kehutanan semakin membaik kendati masih tetap negatif, yaitu -19,74%. Sementara pada tahun 2005 sub sektor kehutanan menunjukkan pertumbuhan semakin baik, yaitu sebesar 14,69%. Selain sub sektor

kehutanan, pada tahun 2005 yang menunjukkan angka pertumbuhan negatif adalah sub sektor gas kota, sebesar -3,58%.

Kendati masih ada sub sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi negatif, angka pertumbuhan ekonomi masih tetap tumbuh positif dan semakin meningkat hingga tahun 2005. Angka pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Jawa Timur berasal dari sub sektor angkutan penyeberangan, sebesar 22,00%. Kemudian disusul sub sektor alat angkutan mesin dan peralatannya sebesar 12,77%

Jika dilihat laju pertumbuhan per kabupaten/kota maka pada tahun 2007 terdapat beberapa kota dan kabupaten yang menunjukkan angka lebih tinggi dibanding Jawa Timur. Beberapa kota yang menunjukkan laju pertumbuhan di atas Jawa Timur antara lain Gresik, kota Surabaya, Batu, Bojonegoro, Sidoarjo, Blitar, Malang (baik kota maupun kabupaten), Nganjuk, Probolinggo, Tulungagung, Pasuruan baik kota maupun kabupaten, Jombang, Mojokerto.

Angka laju pertumbuhan ekonomi tertinggi per kabupaten/kota terdapat di Gresik. Pada tahun 2007 angka laju pertumbuhan ekonomi di Gresik sebesar 7,45%. Kendati Gresik menunjukkan laju angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007, tetapi angka itu masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (2006).

2. Profil Perempuan Miskin di Daerah Industri Migas

Di daerah industri migas, baik itu di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo atau di Gresik, kisah tentang perempuan yang menjalani kehidupan di sektor domestik maupun publik sesungguhnya tidak berbeda dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Di lingkungan masyarakat yang patriarkhis, peran perempuan acapkali harus menanggung berbagai beban sebagai ibu maupun sebagai bagian dari masyarakat marginal yang terpaksa hidup di tengah tekanan beban kemiskinan.

Nama-nama perempuan yang dilaporkan dalam bab ini adalah contoh dari sebagian perempuan di daerah industri migas yang menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan proses perubahan sosial yang terjadi di wilayahnya. Sebagian perempuan bisa menyisati perubahan itu, dan bahkan memperoleh manfaat yang positif

bagi diri maupun keluarganya. Tetapi sebagian yang lain, tak jarang justru tergerus oleh perubahan sosial yang terjadi, sehingga kehidupannya menjadi makin terpuruk.

2.1. Suhulah (45 Tahun)

Ibu Suhulah (45 tahun), perempuan dari Desa Ujung Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki lima orang anak hasil dari pernikahannya dengan seorang buruh pabrik. Keluarga Ibu Suhulah berpenghasilan 600 ribu sebulan, dan dengan beban tanggungan sebanyak 5 orang anak tentu tidak banyak yang bisa diperbuat. Penghasilan yang tergolong kecil itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang harganya terus melambung, sementara tidak ada sumber pemasukan lain yang bisa diharapkan.

Pasca pembangunan industri migas yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, kondisi ekonomi keluarga Ibu Suhulah sama saja tidak ada perubahan. Dengan berdirinya pabrik Migas Hezz di sekitar rumahnya semenjak tahun 2001, tidak banyak memberikan keuntungan yang berarti bagi kehidupan ekonomi keluarga Ibu Suhulah. Pasca pembangunan pabrik migas Hezz, menurut Ibu Suhulah memang dalam batas-batas tertentu mampu menumbuhkan lapangan kerja atau usaha baru, di antaranya bekerja menjadi buruh pabrik, seperti suaminya ataupun di di sektor perdagangan (dengan membuka toko atau warung). Tetapi yang disayangkan Ibu Suhulah adalah tenaga kerja yang diserap kebanyakan berasal dari luar daerahnya, dan kebanyakan pekerja laki-laki, sehingga ada kesan proporsi pegawai berjenis kelamin perempuan kurang mendapatkan prioritas. Menurut Ibu Suhulah, hal ini terjadi mungkin dikarenakan tenaga kerja yang ada di desa rata-rata memiliki pendidikan yang rendah dan kurang pengalaman kerja di sektor industri migas, sehingga cepat atau lambat terjadilah proses marginalisasi penduduk lokal karena profil mereka *missmatch* dengan kebutuhan dunia industri migas yang serba modern.

Di desa Ujung Pangkah Wetan, peran perempuan pasca berdirinya industri migas umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Ibu Suhulah, perempuan di desanya mayoritas hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, sementara jika ada yang bekerja, mayoritas hanya bermata pencaharian sebagai buruh tani.

Pekerjaan-pekerjaan seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan menyetrিকা adalah pekerjaan yang sering beliau perankan dalam kesehariannya, kemudian untuk mengurus anak saja yang sering dibantu oleh suaminya.

Ibu Suhulah mengatakan bahwa sudah menjadi tugas seorang istri untuk melayani dan mengurus keperluan suami dan anak dalam sehari-harinya. Ibu Suhulah juga mengikuti beberapa kegiatan yang ada di desanya, di antaranya pengajian, PKK dan arisan kampung. Untuk arisan kampung sendiri menurut beliau juga dapat memberikan pemasukan keluarga dikarenakan dalam tiap enam bulan sekali setiap ibu-ibu yang mengikuti arisan mendapat jatah uang arisan sebanyak sekali, meskipun dalam tiap minggunya harus membayar uang arisan.

Kemudian bilamana dalam menjalani kehidupan seharinya-harinya, ibu Suhulah sering sekali meminta tolong kepada orang tuanya, khususnya kepada sang Ibu dikarenakan beliau tinggal satu rumah dengan orang tua perempuannya tersebut. Beliau sering meminta tolong untuk mengasuh anak. Selain meminta tolong kepada orang tua perempuannya. Ibu Suhulah terkadang juga beberapa kali meminta tolong kepada tetangga atau kerabatnya, semisal dalam hal meminjam uang untuk biaya kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun demikian dalam mengatasi permasalahan ketika mengalami kesulitan ekonomi. Ibu Suhulah lebih sering melakukan kegiatan penghematan dalam pengeluaran sehari-harinya. dan bila usaha tersebut gagal maka Ibu Suhulah baru meminjam uang kepada tetangga atau kerabat.

2.2. Siti Aisyah (35 Tahun)

Bojonegoro saat ini terkenal dengan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, bahkan menurut Siti Aisyah yang berumur 35 Tahun, sumber minyak bumi yang tersedia tidak akan habis hingga kurang lebih 250 tahun. Siti Aisyah adalah seorang warga perempuan yang tinggal di Desa Campurejo yang jarak desa ke sumber minyak atau perusahaan minyak sangatlah dekat kurang lebih 1 Km. Ibu yang mempunyai 2 anak ini bekerja di industri rumah tangga yaitu industri pembuatan tempe yang dilajalkan oleh keluarga dan tetangganya sejak lama. Ibu Siti beserta suaminya bertugas sebagai penjual tempe dan kedua orang tuanya bertugas sebagai pembuatnya. Dari pekerjaan

tersebut dia dan suaminya perbulan dapat memperoleh hasil hingga kurang lebih Rp.1.500.000,-. Hasil yang dirasa saat ini pas-pasan.

Ibu Siti Aisyah menceritakan tentang berbagai peristiwa yang terjadi semenjak perusahaan minyak tersebut berdiri. Perusahaan minyak tersebut dikelola oleh badan kerjasama operasi (*JOB/Joint Operating Body*) Pertamina-Petrochina East Java. Perusahaan tersebut berdiri sekitar tahun 1998 dan mulai aktif beroperasi pada awal tahun 2000-an hingga sekarang. Banyak perkembangan yang terjadi pasca perusahaan tersebut berdiri, seperti halnya pada pembangunan desa yang lama kelamaan menjadi semakin maju baik seperti pembangunan jalan, pengairan, pelayanan kesehatan, keamanan warga, pendidikan.

Dalam bidang pembangunan jalan, dapat terlihat pada jalan utama desa yang telah berubah sedikit menyamakan para pengendara, dan tidak seperti dulu yang masih berupa jalan macadam. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari kerjasama perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Ibu Siti juga menceritakan bahwa per tahun perusahaan tersebut mengucurkan dan kepada pemerintah daerah sebesar kurang lebih 5 Milyar rupiah, yang kemudian uang tersebut dibagikan ke tingkat, kecamatan, desa, dan RT. Pada akhirnya para ketua RT memanfaatkannya untuk acara warga dan pembangunan. Dana yang diterima RT kurang lebih Rp.10.000.000.

Untuk bidang pendidikan, perusahaan minyak Pertamina-Petrochina juga memberikan beasiswa kepada para siswa yang memiliki prestasi yang bagus dalam sekolahnya, dan kemudian bagi para pengajar, baik itu pengajar SD, TK, maupun pengajar ngaji yang tidak terikat dengan institusi pemerintahan selalu memperoleh bonus tahunan dari perusahaan tersebut sebesar kurang lebih Rp.400.000,- pemberian hadiah tersebut membuat para pengajar perempuan maupun wanita memiliki semangat dan motivasi dalam menjalankan semua tugasnya.

Terakhir yang dapat dicontohkan adalah kerjasama dalam bidang kesehatan. Perusahaan bersama pemerintah tingkat kecamatan dan desa juga rutin melaksanakan pengecekan kesehatan gratis dan juga pemberian obat=obatan gratis, yang terlaksana dalam waktu satu tahun 3 kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dari tanggung

jawab perusahaan terhadap pencemaran yang menerpa warga yang berdekatan dengan perusahaan tersebut.

Ibu Siti juga memiliki rasa takut kepada perusahaan tersebut. Beliau dan juga keluarga masih merasa trauma akan peristiwa bencana yang pernah menimpanya dan juga seluruh warga kecamatan Bojonegoro. Bencana yang terjadi adalah bencana gempa bumi yang cukup kuat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2006. Bencana tersebut juga terkenal dengan bencana ledakan sumur minyak Bojonegoro. Selain itu warga juga dicemaskan oleh sebuah ledakan kembang yang disusul kebakaran dengan bola api sangat besar yang menjulang ke langit, selain itu disertai juga dengan suara gemuruh yang terdengar hingga radius sekitar tujuh kilometer. Pencemaran udara yang mengandung gas beracun pada waktu itu juga sungguh menyesakkan warga di sekitar perusahaan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, perusahaan memberikan uang santunan kepada warga sebesar kurang lebih Rp. 50000 hingga Rp. 1.500.000 per jiwa.

Dalam peristiwa tersebut, terdapat dua warga Campurejo yang terpaksa harus menjalani rawat inap di RS Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, diduga akibat menghirup gas beracun yang dikeluarkan dari lokasi sumur minyak yang terbakar itu. Menyusul setelah itu, warga di sekitar sumur minyak Sukowati banyak yang menghirup bau busuk yang menyengat dan sebagian diantaranya menjadi pusing-pusing dan langsung muntah-muntah, sebelum akhirnya beberapa saat kemudian terdengar bunyi ledakan dan ada kebakaran dengan suara bergemuruh. Warga sekitar sumur minyak Sukowati kemudian diungsikan ke arah selatan dan timur, sebagian lainnya ke arah utara. Kesibukan terjadi di lokasi sumur minyak Sukowati. Selain puluhan petugas Petrochina bersiaga, tiga unit mobil pemadam kebakaran (PMK) Pemkab Bojonegoro dan PT Bentoel, disiagakan di lokasi sumur, selain mobil ambulans.

Peristiwa yang menelan 1 korban jiwa tersebut membuat para warga Kecamatan Bojonegoro merasa ketakutan dan trauma, takut bahwa peristiwa tersebut akan terulang lagi dan bahkan akan menjadi peristiwa lumpur Lapindo Perong. Berbagai bantuan dan kerjasama yang telah diterima warga hingga saat ini mungkin belum dirasa cukup, karena hingga saati ini warga masih merasakan berbagai macam dampak buruk dari adanya perusahaan tersebut, seperti pencemaran udara dan pencemaran suara. Selain itu hingga

saat ini Ibu Siti khususnya masih belum merasakan adanya kebijakan yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan desa. Dalam segi penerimaan pekerjaan saja, tidak ada satupun perempuan asli daerah tersebut yang diterima menjadi karyawan perusahaan tersebut. Selain itu kurangnya kerjasama dalam hal pemberdayaan usaha keluarga seperti yang telah dijalani ibu Siti sekeluarga yaitu usaha Tempe.

Keberadaan perempuan di desa tersebut, tetap sama saja seperti dulu, hingga ada perbedaan itu hanya dalam bidang pendidikan, di mana perempuan sekarang dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tempo dulu. Selain itu juga dalam bidang pekerjaan, perempuan sekarang lebih dapat menepati pekerjaan di bidang public dan bukan hanya bidang domestic saja. Keberadaan Ibu Siti sendiri dapat dicontohkan bahwa dia dapat menjalankan dua pekerjaannya baik itu di sektor domestik maupun publik. Di sektor domestik berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur segala kebutuhan keluarga, dan bekerja di sektor public menjadi penjual tempe sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

2.3. Karminah (40 Tahun)

Ibu Karminah yang saat ini berusia 40 tahun merupakan salah satu warga desa Rahayu kecamatan Sooko Tuban, di mana salah satu lokasi pengeboran gas bumi dilakukan. Perusahaan yang melakukan pengeplorasi gas alam di daerah beliau adalah Petro China yang sudah cukup lama beroperasi di daerah tersebut. Ibu yang memiliki 5 anak ini sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa, suami beliau bekerja di pengeboran gas bumi tersebut sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp. 2.000.000 tiap bulan, sehingga dengan penghasilan sebesar itu beliau bisa menyetor penghasilan suaminya untuk ditabung. Dengan adanya anggota keluarga beliau yang bekerja di industri tersebut, tentunya industri pengeboran gas bumi ini membuat kondisi ekonomi keluarga beliau menjadi lebih baik daripada sebelum adanya industri. Selain penghasilan keluarga yang meningkat, industri ini juga membuat lingkungan tempat tinggal beliau menjadi lebih ramai karena banyaknya pendatang ataupun karena lalu lintas kegiatan industri. Namun dibalik semua keuntungan tersebut ada juga sisi negatifnya, sisi negative

ini berkaitan dengan seringkali ada kebocoran pipa ataupun ketika listrik yang ada di industri tersebut mati menimbulkan bau yang tidak enak.

Dengan adanya industri ini tentu ada pekerjaan lain yang diakibatkan oleh ramainya pendatang, salah satunya adalah banyaknya toko atau warung di lingkungan tempat tinggal bu Karminah. Dan peluang bu Karminah untuk ikut menjalankan usaha tersebut sebenarnya cukup besar ditambah dengan adanya kebebasan dari suami, namun beliau merasa tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk berdagang juga terbatasnya dana jika ingin membuka kos-kosan bagi pendatang yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu aktivitas beliau mengurus anak dan keluarga juga membuat beliau merasa kesulitan jika harus menjalankan dua peran sekaligus. Dengan adanya pembangunan industri ini, tidak membawa perubahan apapun berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tetap bekerja dan mengurus masalah-masalah public sedangkan perempuan tetap bekerja di sector rumah tangga (domestik). Namun dalam keluarga bu Karminah peran suami dan istri cukup berimbang. dalam arti dalam semua keputusan yang melibatkan urusan keluarga bu Karminah tetap dilibatkan oleh suami.

Berkaitan dengan keikutsertaan beliau dalam kegiatan sosial keagamaan, sebagian besar kegiatan tersebut beliau ikuti seperti diantaranya pengajian, PKK dan arisan. Namun diantara ketiga kegiatan tersebut yang paling sering beliau ikuti adalah pengajian karena menurut beliau hal itu bisa menambah pengetahuan beliau tentang agama, tapi jika dikaitkan dengan kegiatan manakah yang bisa mendukung mekanisme *survival* beliau menyatakan bahwa arisan yang dapat membantu beliau. Hal ini karena bagi beliau arisan sama juga dengan tabungan sebab bisa dijadikan penopang, namun bedanya jika tabungan bisa diambil sekehendak kita maka arisan tidak bisa.

Ketika memiliki masalah yang berkaitan dengan sektor publik beliau seringkali mengandalkan bantuan kepada orang tua, anak serta kerabat juga tidak jarang kepada tetangga dan teman di kegiatan sosial keagamaan yang memiliki hubungan cukup dekat dengan beliau. Hal yang sama juga berlaku ketika beliau memiliki masalah yang berkaitan dengan sector domestic, dimana paling banyak beliau sangat mengharapkan bantuan dari orang tua, anak serta kerabat beliau. Sedangkan kiat-kiat yang dilakukan

oleh bu Karminah ketika menghadapi masa-masa sulit adalah dengan melakukan penghematan-penghematan serta terkadang berhutang pada orang yang beliau rasa mampu membantu kesulitan beliau baik dengan bunga maupun tanpa bunga. Namun tidak selalu orang-orang yang beliau andalkan bisa membantu beliau sehingga cara terakhir yang kadang beliau lakukan adalah dengan menjual barang-barang berharga yang beliau miliki. Penghematan yang biasanya keluarga beliau lakukan seringkali berkaitan dengan penghematan dalam belanja, hal ini biasanya beliau lakukan ketika suami belum menerima gaji dan tidak ada sisa penghasilan lagi. Atau ada keperluan mendadak yaitu ketika anak sakit ataupun yang lain.

Namun beliau tidak berniat untuk membuka usaha yang dapat membantu ekonomi keluarga karena menurut beliau, ia tidak memiliki banyak ketrampilan yang bisa digunakan untuk dapat memulai usaha. Selain itu jika berwiraswasta beliau menyatakan tidak memiliki jaringan pemasaran yang cukup dan lokasi usaha yang ada juga tidak memungkinkan karena banyaknya pesaing. Karena tidak bu Karmiati tidak berminat untuk membuka usaha yang mungkin bisa membantu menambah penghasilan suaminya tentu bu Karminah tidak membutuhkan bantuan pemerintah sebagai pendukung modal.

Meskipun beliau tidak berpikiran untuk membuat usaha saat ini dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, namun beliau tidak menutup kemungkinan suatu saat pendirian beliau akan berubah seiring dengan perkembangan pekerjaan suami beliau. Hal ini karena suami beliau bekerja di perusahaan pengeboran gas alam tersebut berdasarkan sistem kontrak sehingga jika suatu saat ada perampingan karyawan ada kemungkinan suami beliau tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, namun tentu bu Karminah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Namun jika hal itu memang terjadi maka kemungkinan bu Karminah akan ikut bekerja karena tentunya penghasilan keluarga akan jauh berkurang dan tidak lagi mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan ditambah dengan membiayai sekolah keempat anak beliau. Jika memang hal itu yang terjadi, beliau memilih untuk bekerja di luar sector industri migas juga bekerja di luar sector pertanian karena memang beliau tidak memiliki ketrampilan untuk mengolah sawah dan tidak ada peluang untuk bekerja di sector pertambangan selain itu resiko yang ditanggung jika bekerja di perusahaan tersebut menurut beliau juga cukup besar.

2.4. Dasmini (80 Tahun)

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa minyak bumi yang cukup luas di Indonesia, salah satu perusahaan yang ikut mengeksplorasinya adalah Exxon Mobile yang sudah cukup lama mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasinya. Salah satu ladang pengeksplorasian di kabupaten ini ada di desa Ploso Lanang kecamatan Bojonegoro. bu Dasmini merupakan salah satu warga yang tinggal di desa ini dan beliau juga cukup banyak mengetahui tentang aktivitas perusahaan eksplorasi tersebut. ibu yang kini telah berusia 80 tahun ini menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga beliau tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah ada pembangunan industri migas tersebut. hal ini karena secara langsung beliau tidak ikut merasakan manfaat dari adanya industrimigas ini di lingkungan tempat tinggal beliau.

Ibu yang memiliki 8 orang anak ini sehari-harinya bekerja sebagai petani, dengan rata-rata penghasilan keluarga yang dimiliki sebesar Rp.750.000,00. Pembangunan industri migas tersebut memang bagi beliau seakan tidak memberikan pengaruh apapun mengenai pemberdayaan wanita karena terkait dengan pekerjaan tidak ada satupun pekerjaan yang dibutuhkan tenaga wanita di industri migas ini. Warga desa yang ikut bekerja di perusahaan tersebut juga tidak banyak itupun semuanya laki-laki dan hampir semuanya bekerja disektor keamanan perusahaan. termasuk keponakan beliau yang juga bekerja sebagai anggota keamanan di perusahaan migas tersebut sehingga jika dilihat dari sisi ekonominya adanya industri tersebut dapat menambah penghasilan keluarga.

Dengan adanya industri migas ini, tentunya membawa beberapa akibat bagi masyarakat maupun lingkungan tempat tinggal beliau. Beberapa usaha yang bermunculan karena adanya industri migas ini adalah berkembangnya sector perdagangan seperti warung maupun toko. sector jasa dalam hal ini adalah kos-kosari. dengan banyaknya peluang usaha baru yang ada tersebut bu Damiami menyatakan bahwa beliau memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam perkembangan usaha-usaha tersebut namun karena terbatasnya tenaga yang beliau miliki sebab factor usia membuat beliau tidak begitu ingin

ikut ambil bagian didalamnya selain itu anak-anak beliau juga sudah dewasa dan memiliki penghidupan sendiri. Selain itu karena tidak bersekolah bu Damiati tidak bisa membaca dan kemampuan beliau juga berhitung juga terbatas dan hal ini jugalah yang mendasari beliau tidak berganti pekerjaan. Selain factor usia yang sudah tidak muda lagi, beban pekerjaan domestic juga menjadi kendala tersendiri bagi bu Damiati untuk dapat terjun ke dalam usaha-usaha yang bermunculan akibat dari adanya pembangunan industri tersebut.

Dengan adanya industri migas ini membuat banyak pendatang yang juga bekerja di tempat tersebut, namun yang disayangkan bu Damiati adalah terbatasnya warga yang bekerja ditempat tersebut sehingga tidak heran jika banyaknya pendatang tersebut menimbulkan kecemburuan sosial serta merupakan saingan baru bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di tempat industri tersebut. Setelah ada industri tersebut bu Damiati menyatakan tidak ada pergeseran apapun berkaitan dengan peran beliau khususnya maupun wanita dilingkungan tempat tinggal beliau, wanita tetap saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan laki-laki yang lebih peran disektor public.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial-keagamaan, hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut yang ada di desa Ploso lanang beliau ikuti diantaranya pengajian, PKK dan arisan namun diantara ketiganya yang paling sering beliau ikuti adalah pengajian. Berkaitan dengan mekanisme *survival* yang diterapkan, bantuan yang sering beliau harapkan untuk urusan domestic adalah anak. Anak juga menjadi tumpuan harapan beliau yang utama ketika menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan sector domestic selain yang lainnya baik itu kerabat, tetangga maupun teman beliau di organisasi-organisasi sosial yang beliau ikuti.

Dalam hal pekerjaan atau usaha selama ini beliau hanya mengandalkan modal dari kantong beliau sendiri, barulah jika beliau benar-benar mengalami kesulitan yang sangat, baru beliau akan meminta bantuan dari anak ataupun kerabat beliau yang dirasa mampu membantu. Namun tentunya tidak selalu pihak-pihak yang dimintai pertolongan mampu menolong sehingga beliau juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi usaha lama karena memang beliau sebelum maupun sesudah ada industri beliau tidak beralih pekerjaan dan tidak berniat untuk berganti

pekerjaan. Sedangkan bantuan yang beliau harapkan adalah bantuan dalam hal permodalan serta peralatan untuk dapat mendukung pekerjaan beliau sebagai petani, modal ini berkenaan dengan pengadaan benih dan pupuk yang terjangkau sehingga hasil panen yang didapatkan dapat lebih besar dari modal yang dikeluarkan untuk menanam padi seperti yang selama ini sering beliau alami.

Selama ini ketika bu Damiati mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal yang sering beliau lakukan adalah menambah jam kerja, berhutang baik dengan atau tanpa bunga serta melakukan berbagai penghematan. penambahan jam kerja ini mengacu pada aktivitas tambahan yang beliau lakukan di sawah, biasanya hal ini berwujud dengan mengambil pekerjaan menggarap sawah orang lain dan beliau mendapatkan upah. Biasanya beliau bekerja di sawah orang lain pagi hari dan sore harinya beliau baru mengerjakan sawahnya sendiri. Sedangkan berkaitan dengan mekanisme survival yang lain biasanya bu Damiati mengurangi alokasi dana untuk belanja tentu konsekuensinya adalah hanya mendapatkan lauk yang sederhana. Sedangkan biasanya yang sering menjadi tumupan beliau ketika mengalami kesulitan uang adalah kerabat dan tetangga beliau yang beliau rasa mampu membantu beliau.

Untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi karena adanya pembangunan industri penambangan migas ini hanya dengan meningkatkan produksi dari usaha lama. Hal ini karena hanya pekerjaan petani saja yang menjadi keahlian beliau dan keluarga. Peningkatan usaha ini dapat dilakukan dengan menggunakan bibit yang baik dan pupuk yang memadai, namun itu semua tidak akan bisa beliau penuhi jika tidak ada bantuan dari orang lain, paling tidak anak beliau.

2.5. Mulyani (29 Tahun)

Mulyani adalah seorang ibu rumah tangga dari desa Campurejo, kecamatan Bojonegoro, kabupaten bojonegoro. Beliau hidup bersama sang anak bernama dian yang telah berusia 23 tahun. Dian mengalami gangguan mental, tumbuh menjadi remaja putrid yang tak normal. Dian terlahir sempurna sebelumnya seperti layaknya anak-anak yang lain. Namun ketika ditinggal sang ayah 12 tahun yang lalu kemudian dia mengalami depresi mental yang cukup berat hingga membuatnya berada dalam keadaan seperti

sekarang ini. Ayahnya bemama yanto yang dahulunya adalah ayah yang baik, loyal terhadap keluarga berubah menjadi ayah yang gila terhadap perempuan setelah dirinya sukses menjadi pembisnis. Ibu mulyani dengan mudah kemudian dicampakkan, dan akhirnya ditinggalkan dengan telak cerai dari pengadilan agama. Sebagai wanita, tentunya ibu mulyani tak berdaya dan tak dapat melakukan apa-apa pada waktu itu. Namun dalam hati kecilnya selalu ada rasa penyesalan dan kecewa telah membuat nasib anaknya menjadi seperti yang sekarang ini.

Sebelas tahun sudah beliau membanting tulang membesarkan anaknya dalam kondisi tak normal sendirian. Banyak ejekan dari lingkungan sekitar atas kondisi anaknya dan kondisi dirinya sendiri yang kini telah menjadi seorang janda korban kebiadaban laki-laki. Namun hal ini tak membuatnya menjadi jera, hilang tenggelam dalam keputusan. Beliau tetap tegar menjalani kehidupan ini demi sang buah hati. Beliau tak mau berada dalam keadaan terpuruk karena nantinya itu akan berpengaruh terhadap kesehatan putrinya.

Dengan bekerja serabutan sebagai tukang cuci ataupun sebagai pedagang tauge di pasar, dilakoninya dengan ikhlas. Beliau yakin kalau kesabaran akan dibalas dengan kenikmatan. Malam hari beliau merendam kacang hijau yang diharapkan paginya bisa dijual di pasar dalam bentuk tauge. Semyua dilakukannya sendiri karena memang kacang hijau yang beliau rendam setiap harinya tidak terlalu banyak, maksimal hanya mencapai 3 kilogram saja. Pagi harinya harus disortir dari kuli-kulit kacang hijau supaya diperoleh tauge dengan kualitas bersih. Setelah semuanya selesai, baru beliau berangkat ke pasar untuk menjual hasilnya. Jarak pasar dari rumahnya juga cukup jauh mencapai 1 kilometer ditempuhnya dengan berjalan kaki saja karena tidak mempunyai ongkos untuk naik angkutan. Dijualnya sendiri tauge itu di pasar tanpa adanya bantuan orang lain maupun melalui agen. Beliau berpendapat kalau melalui agen labanya terlalu pelit tidak setara dengan perjuangannya membuat bahan tauge tersebut. Keuntungan dari penjualan tauge inipun juga tidak terlalu banyak, setiap hari keuntungan rata-rata mencapai angka Rp. 4000 saja. Beliau berjualan hanya sampai setengah hari saja, tidak sampai melampau waktu dzuhur. Bukan karena dagangan sudah habis, namun beliau juga harus mengejar rizeki dari pekerjaan lain yang menantinya dirumah yaitu sebagai buruh cuci.

Beliau selalu menjemput bola untuk menjadi buruh cuci. Dihampirinya rumah-rumah warga lain untuk dapat menggunakan jasanya sebagai tenaga meringankan beban rumah tangga yaitu mencuci. Ada saja yang menggunakan jasa ibu Mulyani setiap harinya, tak kurang dari 2 orang menggunakan jasa ibu Mulyani untuk mencuci. Beliau menetapkan tarif Rp. 2000 setiap kilogram baju yang dicucinya. Rata-rata setiap harinya mendapatkan uang Rp 6000. Jika digabungkan dengan pendapatannya berdagang, rata-rata setiap harinya mencapai Rp 10.000 yang bila diakumulasikan setiap bulannya mencapai Rp. 300.000. Ini bukan angka pendapatan yang tinggi, karena banyak kebutuhan yang harus beliau penuhi setiap bulannya. Apalagi untuk kebutuhan obat bagi anaknya, setiap bulan mencapai Rp.500.000. Untuk itu ibu Mulyani harus bekerja lebih keras lagi guna memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan anaknya.

Tak jarang jika setiap bulannya demi memenuhi kekurangan kebutuhan keluarganya beliau harus berhutang kepada saudara yang lain atau biasanya jika terlalu kepepet maka beliau akan berhutang kepada rentenir dengan bunga yang mencekik leher. Namun semuanya dilakukan demi kenutuhan anaknya. Tidak mungkin lagi kabutuhan pembe;lian obat bagi anaknya ditunda-tunda lagi, biar bagaimanapun harus dipenuhi dalam keadaan ada ataupun tak ada uang.

Beliau sangat mengharapkan bantuan modal dari pemerintah serta pelatihan keterampilan. Karena sebenarnya beliau tidak memiliki potensi di keterampilan di bidang apapun. Ketika nanti beliau mendapatkan bantuan dari pemerintah, keinginan beliau adalah membuka alternative usaha baru. Beliau merasa usaha yang ditekuninya sekarang tidak banyak memberikan potensi terhadap peningkatan perekonomian keluarganya. Yang terpenting bagi beliau adalah kebahagiaan anaknya. Beliau rela melakukan apapun demi anaknya. Bahkan beliau rela selamanya hidup mengabdikan kepada anaknya karena di dunia ini harta berharga yang dimilikinya adalah anaknya. Begitu pula anaknya hanya bisa mengharapkan kasih sayang dari ibunya, bukan dari orang lain.

2.6. Kholilah (27 Tahun)

Seorang perempuan warga desa Pangkah Wetan, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik yang memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki suami

bernama awaludin (32 tahun) serta seorang anak yang telah menginjak usia 10 tahun. Ibu Kholilah berpendidikan terakhir SME sedangkan suaminya berpendidikan terakhir SLTP. Beliau menikah 10 tahun yang lalu yang tidak direstui oleh orang tua ibu Kholilah karena pernikahan tersebut diawali dengan hamilnya ibu Kholilah diluar nikah. Hal ini yang sampai sekarang menjadi perdebatan antara ibu Kholilah beserta suaminya.

Suami ibu Kholilah adalah seorang supir truk yang sering diperbantukan banyak pabrik untuk membawa truknya demi kepentingan perusahaan. Terkadang sampai ke luar kota sehari-hari meninggalkan anak beserta istrinya dirumah demi mendapatkan segenggam uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun tak banyak penghasilan yang diperoleh oleh bapak awaludin, rata-rata satu minggu hanya mencapai Rp. 150.000, itu saja kalau tenaganya banyak dibutuhkan oleh orang lain. Namun jika tidak ada orang yang menggunakan jasanya biasanya pak awal (begitu biasanya beliau dipanggil) terpaksa menjadi supir sebuah persewaan mobil. Lumayan jika dibuat untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Memang tak ada keahlian lain pak awal selain mengendarai mobil, jadi beliau tak bisa berpindah ke pekerjaan lain yang lebih layak karena disamping kemampuan minim, pendidikan beliau juga tidak cukup untuk bekal melamar pekerjaan yang lebih baik lagi.

Istrinya juga tak mempunyai keahlian apapun, selain keahlian berdagang yang diturunnya dari orang tua. Maklumlah sebenarnya ibu Kholilah adalah keturunan dari keluarga yang berada, ayahnya seorang pedagang perhiasan di kota Surabaya. Namun karena kecerobohan ibu Kholilah dalam bergaul, akhirnya ibu Kholilah hamil dahulu sebelum menikah dan kebetulan sang ayah tak menyetujui hubungannya dengan pak awal karena pak awal dahulunya dikenal sebagai remaja yang sering kluntang kluntung kesana kemarui gak jelas, tak memiliki pekerjaan pula. Namun inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh ibu Kholilah, barang siapa menabur dialah yang akan menuainya dikemudian hari. Hal inilah yang terjadi pada ibu Kholilah sekarang. Orang tuanya tak pernah sekalipun menjenguknya di gresik, jangankan menjenguk ibu Kholilah, menjenguk cucunya pun tak pernah dilakukan. Mungkin bagi sang ayah perbuatan ibu Kholilah sungguh membuat aib bagi keluarga sehingga sulit untuk dimaafkan. Apapun alas an orang tua ibu Kholilah, ibu Kholilah yakin bahwa orang tua selalu melakukan

yang terbaik bagi anaknya. Mungkin dengan kejadian demikian membuat ibu Kholilah dan pak awal sadar bahwa dahulu beliau banyak melakukan kesalahan, terutama tidak menghormati orang tua. Mungkin kehidupan yang tengah mereka jalani sekarang ini adalah himbauan dari sang maha kuasa untuk selalu ingat dengan kesalahan dan tak akan mengulangi kesalahan lainnya di kemudian waktu.

Lama kelamaan pak awal mengalami kejenuhan berprofesi sebagai supir. Kesehatannya mulai menurun dan ibu Kholilah tak tega melihat sang suami berada dalam keadaan yang demikian. Apalagi ketika ibu Kholilah melihat putra semata wayangnya yang masih kecil yang tentunya masih banyak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ibu Kholilah lantas merelakan untuk pak awal meninggalkan profesinya sebagai supir, walaupun sebenarnya masih belum terfikir untuk mencari alternative pekerjaan lain. Sempat pada waktu itu pak awal melamar sebagai satpam di perusahaan migas di dekat rumahnya, namun pekerjaan tersebut hanya memberikan kontrak kepada pak awal selama 6 bulan kerja yang mendapatkan gaji Rp. 7000.000 setiap bulannya. Lumayanlah karena tidak harus bekerja banting tulang sampai meninggalkan keluarga untuk mencari uang. Cukup dengan shift pagi dan shift malam saja pak awal mendapatkan upah yang menurut dia maksimal.

Setelah pak awal keluar dari pekerjaannya karena kontrak sudah selesai, ibu Kholilah pun mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan pada perusahaan yang sama, namun sayangnya tidak dibuka lowongan untuk seorang perempuan. Terima saja nansib malang penolakan lamaran dari perusahaan, jika memang dirasa itu sudah menjadi jalannya.

Ibu Kholilah teringat dengan sisa tabungan dari penghasilan sang suami menjadi satpam dahulu. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, ibu Kholilah selalu irit dalam mengeluarkan uang bulanan. Bukan karena pelit, tapi lebih dibuat jaga-jaga siapa tahu suatu saat pasti dibutuhkan. Akhirnya dibutuhkan juga, dengan modal Rp. 500.00 waktu itu, ibu Kholilah mencoba untuk mempergunakannya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan jajanan anak-anak untuk dijual demi menyambung hidup. Dengan bermodalkan meja kecil yang setiap pagi dipajang diteras rumahnya dan ketika sudah malam hari dimasukkannya kembali ke dalam rumah, ibu Kholilah memulai usahanya.

Selain yang dijual adalah jajanan anak kecil, beliau juga menjual mie instan, gula dan beberapa kebutuhan kecil rumah tangga. Beliau berharap dengan modal pas-pasan dap menjual barang-barang yang memang memiliki nilai jual agar beliau tidak merugi.

Dari hasil jualannya itupun tak banyak mendatangkan keuntungan, bagaimana tidak dengan berdagang skala kecil tentu saja tak banyak mendatangkan keuntungan. Keuntungan bersih yang didupatkannya setiap hari rata-rata hanya mencapai Rp. 5000 saja. Padahal beliau adalah kepala rumah tangga yang harus menghidupi anak dan suaminya karena suaminya mengalami sakit-sakitan terus. Belum lagi mengenai biaya pendidikan sang anak, rasanya dengan penghasilan segitu mustahil bagi keluarga ibu Kholilah untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi. Malah dalam keputus asaan ibu Kholilah berujar “mungkin aku hanya mampu menyekolahkan anakku hingga tamat sd saja mbak,,gak kuat kalau sampai ke SMP. Biaya terlalu mahal...”

Tak jarang jika berada dalam keadaan krisis, dimana anak harus bayar sekolah, suami harus membeli obat, dan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ibu Kholilah memberanikan diri untuk menggadaikan barang ataupun utang uang ke tetangga. Walaupun kebanyakan tetangga memiliki nasib yang sama dengan ibu Kholilah, namun rasa solidaritas antar tetangga masih terjalin dengan baik. Masih sedikit beruntung ibu Kholilah memiliki tetangga yang demikian.

Walaupun dibebani dengan banyak urusan, sebagai kepala rumah tangga juga sebagai ibu rumah tangga, namun ibu Kholilah selalu berusaha untuk menjalankan perannya sebaik mungkin. Beliau mengurus suami beserta anaknya juga mengurus segala urusan rumah tangga mulai menyapu, memasak hingga mencuci. Semuanya dilakoni dengan ikhlas tanpa pamrih dan mengeluh sedikitpun karena beliau yakin jika suatu ujian pasti tak akan melewati kemampuan makhluknya, dan setiap ujian pasti memiliki jalan kluarnya sendiri.

Harapan ibu Kholilah dari pemerintah adalah bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Ibu Kholilah memiliki kemampuan dalam berdagang, sehingga sangat sia-sia jika tidak digunakan dengan baik. Cita-cita ibu Kholilah adalah membuka took agen makanan pokok seperti beras, gula, minyak dan mie. Menurut ibu Kholilah itulah usaha yang tepat untuk dikembangkan saat ini. selain berpotensi bidang

ini juga tak akan habis dimakan waktu setiap saat selalu dibutuhkan oleh siapapun. Dan Ibu Kholilah yakin kalau usaha ini juga akan bisa membantu tetangganya untuk menjadi tenaga kerja, entah sebagai pelayan took ataupun kuli angkut.

2.7. Aminah (45 Tahun)

Aminah adalah salah satu penduduk dari desa Rahayu Kabupaten Tuban. Umurnya saat ini 45 tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan ia sendiri adalah seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak. Pendidikan terakhirnya sampai di tingkat SD. Setelah lulus SD, ia tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan harus membantu orang tua bekerja di sawah.

Sebagai ibu rumah tangga, ia tidak mempunyai penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan lainnya. Keluarganya hanya mengandalkan penghasilan suaminya sebagai buruh tani yang sangat minim. Ditambah lagi adanya keempat anaknya yang juga butuh biaya. Keempat anaknya masih anak-anak dan belum ada yang ikut membantu suaminya untuk bekerja di sawah. Dengan penghasilan yang pas-pasan, maka keluarga mereka tidak mampu menyisihkan uang untuk ditabung karena tingginya pengeluaran yang ada, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

Pasca pembangunan industri migas di daerah tersebut, Ibu Aminah tidak merasakan perubahan signifikan terhadap ekonomi keluarganya. Beliau menyadari bahwa hal tersebut mungkin disebabkan oleh bidang pekerjaan suaminya sebagai buruh tani yang tidak ada kaitan dengan industri migas. Suaminya telah bekerja sebagai buruh tani jauh sebelum industri migas tersebut dibangun.

Pembangunan industri migas di daerah tersebut membawa dampak bagi Ibu Aminah dan keluarganya. Dampak yang paling dirasakan adalah terganggunya kesehatan keluarga. Pada saat-saat tertentu, industri migas akan membunyikan sirene pertanda bahwa ada proses dalam industri. Saat itulah kesehatan keluarga menjadi terganggu. Bau tidak enak tercium di tempat tinggalnya sehingga membuat ia dan keluarga, terutama anak-anaknya, menjadi pusing dan mual-mual. Hal yang sama juga dirasakan oleh tetangga Bu Aminah yang lain, dimana lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari industri

migas. Bu Aminah menceritakan bahwa sebenarnya pihak industri migas memberikan obat agar dapat mencegah gangguan kesehatan berupa mual dan pusing-pusing. Namun obat tersebut belum cukup untuk menghilangkan pusing dan mual-mual yang dialami. Sehingga ia dan keluarganya mau tak mau menahannya. Bau tersebut hanya akan tercium saat sirene berbunyi. Ketika sirene tidak berbunyi, maka bau tersebut tidak muncul. Dampak lain yang muncul adalah penghasilan suami yang sedikit meningkat. Pembangunan industri migas mempermudah akses bagi pemilik lahan sawah untuk menjual hasilnya ke luar desa. Adanya penghasilan suami yang meningkat, walaupun sedikit, tidak membuat ibu Aminah untuk ikut-ikutan bekerja di sawah membantu suami. Ibu Aminah lebih memilih untuk mengasuh keempat anaknya di rumah. Hal itu dilakukan atas perintah suami dimana suami dan bu Aminah sudah mempunyai kewajiban masing-masing dan dijalankan.

Bu Aminah tidak mempunyai keterampilan khusus seperti bertani, menjahit, usaha industri kecil, ataupun dalam hal administrasi. Keterampilannya hanya memasak. Namun hanya digunakan untuk memasak bagi keluarganya saja, bukan untuk dimanfaatkan sebagai suatu potensi usaha. Masakan yang mampu ia buat juga sekedar masakan ala rumah tangga dan tidak rumit. Selain itu, di desanya sedikit orang yang membuka warung makanan karena istri-istrilah yang memasak untuk suaminya sehingga tidak perlu membeli.

Menurut Ibu Aminah, usaha yang berkembang setelah adanya pembangunan industri migas adalah bertambahnya toko-toko kecil di sekitar desanya. Toko tersebut menjual bahan kebutuhan sehari-hari atau sekedar warung kopi. Toko dibuka di depan rumah pemiliknya. Sedangkan jenis usaha lain seperti kos-kosan, transportasi, tukang cuci, PRT, pertanian, industri kecil, dan pabrik tidak berkembang. Sama saja. Kalupun ada, pekerjaan tersebut lebih mengarah pada laki-laki. Kecuali tukang cuci dan PRT.

Ada salah satu anggota keluarga Ibu Aminah yang diterima bekerja di industri migas, yaitu adik laki-lakinya. Adiknya bekerja sebagai tenaga keamanan. Beliau menambahkan bahwa sangat sedikit warga yang dapat terserap di sana. Kalaupun ada, hanya bekerja sebagai tenaga keamanan ataupun supir. Dan setahu beliau hanya laki-laki

saja. Ia belum mengetahui apakah ada perempuan yang bekerja di sana, terutama keluarga dan tetangga di sekitar ia tinggal.

Kehadiran para pendatang pasca pembangunan industri migas merupakan hal yang tak terelakkan. Ibu aminah tidak memandangnya sebagai pesaing dalam mencari kerja. Karena pendatang bekerja di industri migas, bukan di sektor pertanian. Sedangkan keluarganya, lebih khususnya suaminya bekerja sebagai buruh tani, bukan merupakan bagian dari industri migas tersebut. Namun terkadang, rasa cemburu muncul karena pendatang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli.

Pembangunan industri migas tidak berdampak bagi ibu Aminah sebagai seorang perempuan. Ia malah merasa bahwa industri tersebut lebih menguntungkan laki-laki. Namun ia tidak banyak menuntut, karena tugasnya adalah di rumah. Ibu Aminah tidak berusaha mengembangkan usaha lain. Seperti membuka toko misalnya. Hal itu disebabkan karena keterbatasan modal. Penghasilan suaminya yang pas-pasan tidak memungkinkan untuk menjadikannya sebagai modal. Perempuan di lingkungan tempat tinggalnya tidak jauh berbeda. Hanya berda di rumah mengurus anak dan menjaga rumah tangga. Ada pula yang ikut bekerja sebagai buruh tani membantu para suami dan membuka toko kecil di depan rumah agar tetap bisa mengawasi anak.

Setelah adanya industri migas di daerah tersebut, suami tetap memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dalam urusan public dan domestic. Dalam usaha misalnya, suamilah yang menentukan jenis usaha. Dalam hal ini, suami yang bekerja sehingga ibu Aminah tidak perlu ambil pusing mengenai masalah pekerjaan. Namun pengelolaan keuangan dilakukan oleh bua Aminah dengan suaminya. Sedangkan dalam pekerjaan domestic, hampir semuanya dilakukan oleh ibu Aminah. Seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan menyetrika. Mengasuh anak dilakukan secara bersama-sama. Suaminya tidak lepas tangan dari tanggung jawab itu. Apalagi mereka mempunyai empat orang anak yang apabila hanya diurus oleh ibu Aminah akan sangat kerepotan. Pembangunan industri tidak member pengaruh terhadap pekerjaan domestic yang dilakukan ibu Aminah. Seandainya bu Aminah bekerja pun, kegiatan domestic dianggap tidak mengganggu karena sudah merupakan kewajiban seorang istri.

Untuk kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, ibu Aminah hanya mengikuti pengajian. Pengajian dilakukan seminggu atau dua minggu sekali di RT masing-masing. Ia tidak mengikuti arisan, karena mempertimbangkan keuangan keluarganya yang sangat pas-pasan. Kegiatan pengajian juga member manfaat untuk berkumpul dan bercengkerama sesama ibu-ibu tetangganya. Berumpul bersama ibu-ibu merupakan hal yang menyenangkan dan mengusir rasa jenuh.

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada urusan yang berkaitan dengan pekerjaan suaminya sebagai buruh tani. Terkait dengan itu, ibu Aminah kerap minta tolong kepada tetangga. Karena tetangga dianggapnya sebagai kerabat terdekatnya. Saat ada masalah dalam urusan pekerjaan rumah tangga, ibu Aminah juga kerap meminta pertolongan atau bantuan kepada tetangga di sekitar rumahnya atau kadang juga meminta anaknya untuk membantu. Namun ia jarang meminta pertolongan karena mampu mengurus sendiri pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaannya di rumah tangga dirasanya tidak berat. Karena rumah yang ia miliki sangat sederhana sehingga tidak memerlukan tenaga khusus untuk mengelolanya.

Pekerjaan suaminya yang hanya buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan membuat Ibu Aminah harus pandai-mandai mengatur keuangan dan pengeluaran rumah tangga. Saat situasi yang terhimpit, maka Ibu Aminah melakukan penghematan dan subsistensi. Penghematan tersebut tentunya sangat keras, karena sebelum penghematan keluarga mereka juga sudah sangat berhemat. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengurangi kualitas makan. Seperti hanya mengkonsumsi nasi dengan sambal. Pengurangan frekuensi makan tidak mungkin dilakukan karena dalam sehar mereka hanya makan dua kali dengan lauk seadanya. Ibu Aminah sangat menghindari hutang. Beliau berpikir bahwa mungkin saja beliau tidak dapat melunasi hutangnya karena keterbatasan pendapatan. Hutang merupakan alternative terakhir saat keluarganya tidak bisa lagi berhemat. Hutang dilakukan dengan tetangganya sendiri sehingga tidak perlu memikirkan masalah bunga. Ibu Aminah juga tidak pernah menggadaikan atau menjual barangnya untuk mendapatkan uang. Barang yang dimilikinya sangat terbatas sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pembangunan industri migas bagi Ibu Aminah tidak membuatnya terpacu untuk meningkatkan atau menambah keterampilan. Ia tetap menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dimana suaminya yang bekerja. Latar belakang pendidikannya yang hanya tamat di bangku SD juga turut menjadi sebab mengapa ia tidak mencoba menambah keterampilan.

Menurut Ibu Aminah, setelah pembangunan industri migas prospek usaha suaminya biasa saja. Buruh tani menuruti perintah pemilik tanah. Sehingga beliau berpikir bahwa yang harus memikirkan prospek pekerjaan di bidang pertanian adalah tuan tanah. Beliau menambahkan, biaya produksi sekali masa tanam tetap. Kenaikan harga pupuk dan pembasmi hama yang kadang menjadi mahal merupakan hal yang biasa dialami petani. Akses yang lebih mudah, membuat saingan bertambah namun hasil keuntungan yang diperoleh lebih sering menurun.

Sebenarnya, Ibu Aminah berminat jika ada bantuan pemerintah diberikan pada warga desa. Bantuan tersebut akan digunakan untuk membantu usaha suaminya. Ibu Aminah mengharapkan bantuan berupa permodalan serta peralatan bagi suaminya bekerja. Ia menginginkan mempunyai sawah sendiri sehingga nanti bisa dikelola oleh keluarganya. Sawah juga akan dijadikan modal untuk anak-anaknya di masa depan. Bantuan uang memang diinginkan. Namun uang akan cepat habis jika tidak digunakan secara bijak.

Jika ada kesempatan baginya untuk bekerja, ibu Aminah memilih untuk bekerja di luar industri migas. Seperti membuka toko sederhana di depan rumahnya. Ia tidak ingin berada jauh dari anak-anaknya. Dengan toko di depan rumah, membuatnya dapat mengawasi dan menjaga anak-anaknya.

2.8. Sholihah (50 Tahun)

Ibu Sholihah adalah salah seorang penduduk di Desa Ujung Pangkah, Gresik. Umumnya 50 tahun. Suaminya bekerja sebagai nelayan. Namun karena faktor usia, maka kegiatan melautpun mulai dikurangi. Saat ini ia tinggal dengan anaknya. Ia mempunyai empat orang anak. Sudah ada dua orang anaknya yang menikah. Sedangkan yang dua

orang masih sekolah dan tinggal bersamanya. Anaknya saat ini duduk di bangku SLTP dan sekolah dasar.

Bu Sholihah mengenyam pendidikan di bangku sekolah hingga tingkat SLTP. Orang tuanya dahulu tidak mampu untuk membiayainya lagi untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA. Selain itu, ia mempunyai saudara-saudara yang juga menjadi beban orang tua. Pekerjaannya saat ini adalah berdagang. Barang dagangannya adalah ikan laut yang dijual di pasar. Jumlahnya tak banyak. Beliau hanya menjual secukupnya untuk dapat makan dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Rata-rata pendapatannya dalam sebulan kurang lebih Rp. 500.000. dengan penghasilan demikian, Ibu Sholihah tidak dapat menyisihkan uang untuk ditabung. Karena hanya beliau yang bekerja dan harus membiayai anaknya. Suaminya tak banyak membantu karena sudah tidak aktif lagi mencari ikan.

Adanya pembangunan industri migas di dekat Ujung Pangkah tidak serta merta merubah ekonomi warga, termasuk ekonomi keluarga Ibu Sholihah. Bahkan menurutnya, keadaan ekonomi keluarganya sama saja dengan sebelum dibangunnya industri migas. Ia pun tidak berganti jenis pekerjaan, tetap menjual ikan laut.

Setelah pembangunan industri migas, ada beberapa dampak yang dirasakan oleh Ibu Sholihah. Dampak tersebut adalah usaha yang ditekuni mengalami kemunduran dan anaknya kadang terganggu kesehatannya. Usaha yang dimaksud mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Ibu Sholihah berdagang ikan laut. Ikan laut yang ia dagangkan jumlahnya menurun. Hal itu karena nelayan juga mengalami kemerosotan dalam hasil berlayarnya. Anggota keluarga Ibu Sholihah tidak ada yang terserap di industri migas. Kedua anak yang tinggal bersamanya masih sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftar bekerja di sana.

Bu sholihah tidak mempunyai keterampilan khusus seperti bertani, menjahit, industri kecil, ataupun dalam hal administrasi. Keterampilannya hanya memasak. Itupun hanya digunakan untuk mememasakkan anak-anaknya, bukan untuk dimanfaatkan sebagai suatu potensi usaha. Masakan yang ia masak pun terbatas pada jenis masakan sederhana yang umumnya bisa dimasak oleh para ibu-ibu.

Menurut Ibu Sholihah, di Ujung Pangkah tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti dalam sektor usaha. Yang dapat beliau rasakan adalah berkembangnya perdagangan seperti toko dan warung. Sedangkan untuk usaha di sektor-sektor jasa, seperti kos-kosan, transportasi, tukang cuci, PRT, pertanian, industri kecil, dan pabrik sama sekali tidak berkembang. Sama saja. Kalupun ada, pekerjaan tersebut lebih mengarah pada laki-laki. Kecuali tukang cuci dan PRT. Namun jumlah tukang cuci dan PRT juga sangat minim dibutuhkan. Peluang bekerja bagi perempuan sangat kecil.

Pembangunan industri migas juga membawa pengaruh lain, yaitu kehadiran para pendatang. Di Ujung Pangkah sendiri, jumlah pendatang hanya sedikit. Ada beberapa orang dari mereka yang diterima bekerja di industri migas. Penduduk desa Ujung pangkah tidak menganggap mereka pesaing dalam mencari kerja, karena warga Ujung Pangkah juga harus bersaing dengan desa tetangganya yang letaknya lebih dekat dengan industri migas. Namun terkadang muncul sebuah kecemburuan, dimana pendatang mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada penduduk asli.

Secara keseluruhan, bagi Ibu Sholihah, kehadiran industri migas tidak berpengaruh baginya. Baik sebagai warga maupun sebagai perempuan. Hal tersebut karena industri migas lebih banyak menyerap tenaga pria dengan keterampilan tertentu. Sedangkan Ibu Sholihah adalah seorang perempuan paruh baya yang tidak memiliki suatu kecakapan khusus. Selain itu, riwayat pendidikannya hanya sebatas SD sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di sana.

Dalam mengembangkan usahanya, Ibu Sholihah terbentur beberapa kendala. Terutama dalam bidang permodalan dan produksi. Sangat kecil kemungkinan usaha yang dilakoninya mendapatkan dukungan permodalan karena ia hanya berdagang/ menjual ikan laut yang tak seberapa jumlahnya. Untuk pemasaran pun juga masih terbatas pada tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Sedangkan bahan baku ikan laut ia dapatkan dari tetangganya yang nelayan.

Suami Ibu Sholihah tetap mempunyai peran dalam menentukan jenis usaha, pemasaran barang, dan juga pengelolaan keuangan. Untuk membeli bahan baku berupa ikan mentah, suami Ibu Sholihah ikut membantu karena mempunyai teman-teman yang

juga sebagai nelayan. Sedangkan pengelolaan keuangan dikelola secara bersama-sama oleh ibu Sholihah dan suami. Hal seperti ini sudah dilakukan mereka sejak dahulu.

Tak ubahnya seperti istri-istri lain, Ibu Sholihah mengerjakan semua pekerjaan domestic seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyetrika, dan juga mengasuh anak. Suaminya kadang-kadang membantu kalau ia kelelahan karena bekerja. Kegiatan domestic tersebut ia anggap sudah menjadi kewajiban istri. Ia harus mampu mengatur kegiatannya agar tidak mengganggu pekerjaannya. Terkadang anaknya juga ikut membantu pekerjaan domestic tersebut. Namun dengan rumah yang sangat sederhana, pekerjaan tersebut tidaklah terlalu merepotkan karena tidak banyak barang yang dikelola.

Di lingkungannya, ibu Sholihah juga mengikuti beberapa kegiatan sosial seperti pengajian, PKK, dan juga arisan. Kegiatan itu dilaksanakan di tingkat RT. Ia cukup aktif di kegiatan pengajian dan arisan. Arisan dimanfaatkannya seperti sebuah simpanan. Kedua kegiatan tersebut juga digunakan sebagai ajang berkumpul sesama ibu-ibu untuk berbagi cerita. Walaupun setiap hari bertemu, namun lebih menyenangkan ketika berkumpul dalam jumlah yang besar.

Saat menghadapi masalah atau sesuatu untuk kelangsungan usaha, Ibu Sholihah lebih sering meminta bantuan kepada tetangga. Tetangga adalah kerabat terdekat dan bisa diandalkan. Ketika ada kesulitan pada urusan domestic, ibu Sholihah juga meminta pertolongan pada tetangga. Di daerah tempat tinggalnya, sesama tetangga saling menolong selagi mereka mampu menolong.

Usahnya berdagang ikan laut, terkadang juga mengalami pasang surut, dimana hasil penjualan tidaklah seberapa. Ketika saat-saat itu terjadi, Ibu Sholihah melakukan beberapa usaha. Seperti berhutang kepada rentenir dengan resiko dikenakan bunga. Hal tersebut dipilih ketika tetangganya sudah tidak mampu lagi member hutang. Selain itu, Ibu Sholihah juga menambah jam untuk berdagang, melakukan berbagai penghematan dan mengencangkan ikat pinggang. Penghematan terutama dilakukan dalam hal konsumsi. Ibu Sholihah memilih jenis makanan yang sesuai dengan dana yang terbatas. Keluarga mereka hanya makan dua kali sehari. Kalau keadaan sudah sangat terjepit, makaterpaksa makan sekali sehari. Yang jelas, Ibu Sholihah tidak pernah

menggadaikan atau menjual barang-barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup karena barang yang dimilikinya pun terbatas. Jika dijual, maka ia tidak punya apa-apa lagi.

Pasca pembangunan industri migas, tak banyak hal yang dilakukan oleh Ibu Sholihah. Ia tidak menambah keterampilan, membuka usaha baru, ataupun menambah omzet usahanya. Seakali lagi, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan modal. Usaha yang ditekuninya pun tidak mengalami perubahan, sama saja seperti sebelum adanya pembangunan industri migas. Biaya produksi meningkat, pemasarannya tetap, jumlah pedagang ikan pun bertambah, keuntungan yang diperoleh pas-pasan bahkan cenderung menurun, dan modalnya terbatas.

Modal yang digunakan untuk membukan usaha berdagang berasal dari uang sendiri. Ibu Sholihah mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan pemerintah yang akan digunakannya untuk meningkatkan usaha berdagang ikannya. Jika pemerintah memberi bantuan, Ibu Sholihah sangat berminat untuk menerimanya. Bantuan tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha.

Kendala yang dirasa menghambat pengembangan usaha adalah permodalan. Seperti yang diktakan sebelumnya, modal yang dipakai oleh Ibu Sholihah berasal dari uangnya sendiri sehingga sangat terbatas. Lokasi usahanya pun terbatas di sekitar tempat tinggal Ibu Sholihah. Selain itu, keterampilan yang dimiliki juga tak seberapa.

Jika diberi kesempatan untuk bekerja atau mengembangkan usaha, maka Ibu Sholihah lebih memilih untuk bekerja di luar industri migas dan tetap berada di daerahnya saat ini. Misalnya saja membuka toko atau warung di depan rumahnya. Sehingga ia dapat mengurus suami, anak, dan menjaga rumahnya sekaligus tanpa harus berada jauh dari rumah.

2.9. Siti Muntahan (28 Tahun)

Bu Siti ini adalah salah satu warga yang tinggal di kawasan pengeboran yang dimiliki oleh indocina di kawasa tuban, meskipun bu Siti ini tidak bekerja di tempat pengeboran minyak negara tersebut namun beliau juga banyak mengetahui seluk beluk pengeboran itu muncul dan dampaknya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di

sekitar pengeboran tersebut berada. Ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih bayi ini ketika peneliti wawancarai hanyalah berpendidikan sampai tingkat SLTA saja. Suaminya memiliki pekerjaan yang dinilai Ibu Siti ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pria yang menemani sepanjang hidup Ibu Siti ini bekerja sebagai buruh tani di salah satu lahan pemilik tanah di sekitar daerahnya. Cita-cita Ibu Siti ketika dia sudah menikah, ingin sekali bekerja membantu suaminya, tetapi keinginan Ibu Siti ini harus dipendam dalam-dalam, karena beliau sendiri dilarang suaminya untuk bekerja. Model sistem patriarki seperti masih sangat kental di masyarakat sekitar rumah Ibu Siti. Keluarga Ibu Siti ini termasuk keluarga sejahtera 1. Dengan suami yang berpenghasilan Rp 20.000,- per hari Ibu Siti menerima kondisinya dengan ikhlas. Ibu Siti ini adalah tiga bersaudara yang semuanya lahir di Kota Tuban. Suami Ibu Siti ini adalah asli orang Tuban juga. Ibu Siti menikah ketika beliau masih berumur 18 tahun. Itu juga beliau masih sempat menamatkan pendidikan tingkat SLTA.

ketika ditanyai soal pengeboran migas ini, Ibu dengan berkulit coklat ini mengatakan bahwa pengeboran minyak ini sangat mengganggu ketentraman warga di sekitar sini, suara mesin diesel dan bau Co2 yang menyengat menjadi warga tidak nyaman, dan yang paling penting menurut beliau adalah tidak cocok untuk tumbuh kembang anak. Tetapi dibalik itu juga pengeboran minyak indocina ini juga sedikit memberikan CSRnya kepada warga, yaitu dengan memberikan pengobatan gratis setiap satu bulan sekali.

Ketrampilan yang dimiliki dan dikuasai oleh Ibu Siti ini hanyalah ketrampilan yang bersekitar rumah tangga saja seperti menjahit, memasak, dan mengasuh anak. Ketrampilan yang bergerak di sector industri kecil masih belum dimiliki oleh Ibu dengan memiliki anak laki-laki yang berumur 1,5 tahun ini. Berbagai kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan dan diikuti oleh Ibu Siti ini hanyalah pengajian rutin Ibu-ibu yang dilaksanakan setiap malam Jum'at saja. Walaupun suami Ibu Siti ini hanyalah seorang buruh tani saja. Tetapi beliau masih mempunyai tetangga ataupun kerabat-kerabat Ibu Siti yang sering sejkali membantu Ibu Siti ketika menghadapi masalah ataupun sedang membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidup keluarga Ibu Siti. Bantuan-bantuan yang sering diterima Ibu Siti biasanya adalah peminjaman uang yang tanpa menggunakan

bunga. Dengan begitu Ibu kelahiran tuban ini merasa hidupnya sedikit ringan. Ketika disinggung soal dana BLT, Ibu Siti tidak pernah mendapatkan dana BLT sama sekali.

Rata-rata penduduk disekita Ibu Siti memang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan hanya sedikit warga yang bekerja di pengeboran minyak tersebut. Mengenai hal tersebut beliau juga tidak banyak mengetahui kenapa justru orang yang berasal dari luar wilayah yang bisa bekerja di perusahaan pengeboran minyak tersebut, menurut beliau untuk perempuan sendiri tidak ada yang dipekerjakan di sector pengeboran tersebut.

Sepengetahuan Ibu Siti kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Rahayu, kec suko ini memang semuanya tidak merata, karena memang masih banyak kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan di kota besar. Jika disinggung soal bantuan dari pemerintah ataupun dari perusahaan pengeboran minyak tersebut, Ibu yang sedang menggunakan Jilbab warna coklat ini mengaku sangat membutuhkan sekali, bukan hanya bantuan semacam dana untuk kelangsungan keluarga miskin saja, tetapi juga ketrampilan yang dikhususkan kepada kaum perempuan. Beliau menginginkan bahwa kaum perempuan di pedesaan seharusnya juga diberdayakan, beliau Mengaku agar perempuan disini bisa lebih mandiri.

2.10. Rahayu (31 Tahun)

Perempuan di Indonesia umumnya dalam kehidupan sehari-hari lebih sering mengurus kesibukan domestic rumah tangga, tetapi ada beberapa di antara mereka yang juga melakukan kegiatan di sector publik dengan bekerja. Salah satunya adalah Ibu Rahayu, perempuan berusia dua puluh tujuh tahun asal dari Desa Rahayu, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Ibu Rahayu dalam kesehariannya selain mengurus anak, beliau juga mempunyai kesibukan lain yakni menjaga toko kelontong miliknya yang lokasi usahanya berada tepat di depan rumah yang beliau huni. Ibu Rahayu memiliki dua orang anak hasil dari pernikahannya, anak yang pertama berusia empat tahun, sementara anak yang kedua berusia dua tahun. Dalam seharinya, toko kelontong yang dikelola oleh beliau bisa menghasilkan omset kurang lebih seratus ratus ribu rupiah, dengan keuntungan bersih bekisar tiga ratus ribu rupiah dalam perbulannya. Menurut beliau hasil

keuntungan yang diterima digunakan untuk membantu pemasukan keluarga. Meskipun sang suami telah bekerja, namun menurut beliau tidak ada salahnya sebagai istri juga harus berperan dalam memberikan sumbangsih terhadap perekonomian keluarga. Sehingga dalam perbulannya, keluarga beliau dapat menyisihkan sebagian penghasilan yang mereka dapat untuk ditabung, menurut beliau meskipun uang yang ditabung tidak besar namun jika dilakukan secara rutin maka nantinya keluarga beliau dapat mempunyai simpanan yang bisa dijadikan pegangan dari segi materi dalam kehidupan keluarga beliau ke depannya.

Dalam kehidupan keluarga beliau pasca pembangunan industri migas yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, kondisi ekonomi keluarga beliau menjadi lebih baik. Dengan berdirinya pabrik Petrochina di sekitar rumahnya, banyak memberikan keuntungan yang berarti bagi kehidupan Ibu Rahayu khususnya dalam segi perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Sang suami yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani bersama beliau kini telah bekerja menjadi buruh karena diterima sebagai pegawai keamanan (*safety guard*) pabrik. Sehingga dengan penghasilan yang diterima suami lebih banyak dibanding saat bekerja menjadi buruh tani, Ibu Rahayu akhirnya dapat membuka toko kelontong yang modalnya merupakan hasil tabungan yang didapat dari sebagian penghasilan suaminya dan tabungan keluarga yang dimilikinya. Tidak itu saja Keadaan desanya menjadi ramai akibatnya omset yang dihasilkan toko kelontongnya semakin besar. Meskipun terkadang menurut Ibu Rahayu semenjak didirikan pabrik PetroChina di desa Rahayu, Kec. Suko juga memiliki dampak negative, diantaranya sering tercium bau tidak sedap yang berasal dari limbah pabrik dan saat malam terdengar suara deru mesin-mesin berat yang mengusik ketenangan suasana desa. Pasca pembangunan pabrik Petrochina menurut Ibu rahayu dapat menumbuhkan lapangan kerja atau usaha baru ,diantaranya seperti bekerja menjadi buruh pabrik, seperti suaminya ataupun di di sector perdagangan (dengan membuka toko atau warung). Tetapi yang disayangkan ibu Rahayu adalah tenaga kerja yang diserap kebanyakan berasal dari luar daerahnya, menurut beliau hal ini terjadi mungkin dikarenakan tenaga kerja yang ada di desa memiliki pendidikan yang rendah dan kurang pengalaman kerja di sector industri, sehingga beliau memaklumi hal tersebut.

Begitu pula dengan Peran perempuan pasca berdirinya pabrik di Desa Suko juga tidak mengalami perubahan yang significant. Menurut Ibu Rahayu perempuan di desanya mayoritas hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, sementara jika ada yang bekerja, mayoritas hanya bermata pencaharian sebagai buruh tani. Pekerjaan-pekerjaan seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan menyetrika adalah pekerjaan yang sering beliau perankan dalam kesehariannya, kemudian untuk mengurus anak saja yang sering dibantu oleh suaminya. Ibu Rahayu mengatakan bahwa sudah menjadi tugas seorang istri untuk melayani dan mengurus keperluan suami dan anak dalam sehari-harinya. Tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan bagi seorang istri untuk melakukan beberapa kegiatan di luar mengurus keperluan suami dan anak, karena dalam kesehariannya Ibu Rahayu juga bekerja menjaga tokonya, kemudian beliau juga mengikuti beberapa kegiatan yang ada di desanya, diantaranya pengajian, PKK dan arisan kampung. Untuk arisan kampung sendiri menurut beliau juga dapat memberikan pemasukan keluarga dikarenakan dalam tiap enam bulan sekali setiap ibu-ibu yang mengikuti arisan mendapat jatah uang arisan sebanyak sekali, meskipun dalam tiap minggunya harus membayar uang arisan.

Kemudian bilamana dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, ibu Rahayu sering sekali meminta tolong kepada orang tuanya, khususnya kepada sang Ibu dikarenakan beliau tinggal satu rumah dengan orang tua perempuannya tersebut. Beliau sering meminta tolong untuk bergantian menjaga toko, dan mengasuh anak. Selain meminta tolong kepada orang tua perempuannya, Ibu Rahayu terkadang juga beberapa kali meminta tolong kepada tetangga atau kerabatnya, semisal dalam hal meminjam uang untuk biaya kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun demikian dalam mengatasi permasalahan ketika mengalami kesulitan ekonomi, Ibu Rahayu lebih sering melakukan kegiatan penghematan dalam pengeluaran sehari-harinya, bila usaha tersebut gagal maka Ibu Rahayu baru meminjam uang kepada tetangga atau kerabat.

Sementara untuk prospek usaha yang ditekuni sekarang pasca didirikan pabrik migas Petrochina, menurut Ibu Rahayu mempunyai harapan yang bagus dalam kedepannya. Hal ini dikarenakan keadaan desa yang semakin ramai, dengan demikian dapat memberikan keuntungan lebih pada toko kelontongnya karena semakin banyak

pelanggan yang membeli barang-barang dari usaha tokonya. Meskipun jumlah saingan yang ada juga tambah banyak, tetapi menurut beliau tuhan itu adil dan setiap orang mempunyai rejeki sendiri, sehingga beliau sangat senang sekali mengelolah usaha tokonya. Beliau pun tidak ingin bekerja di sektor lain lagi, dikarenakan Ibu Rhayu sudah mersa cukup dengan usahanya saat ini. Di samping bekerja menjaga toko, beliau juga bisa mengurus keperluan suami dan anaknya sehingga tidak melupakan tugas sebagai istri yang baik

3. Peran Perempuan Miskin Dalam Kegiatan Domestik dan Produktif.

Berbagai kajian sebetulnya telah banyak membuktikan bahwa keterlibatan dan peran perempuan dalam kegiatan domestik maupun kegiatan produktif adalah hal yang lazim terjadi. Lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang hanya bertugas menyelesaikan tugas-tugas domestik, peran perempuan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan uang acapkali makin menonjol, dan bahkan tidak jarang mereka memegang peran penting dalam pengelolaan berbagai usaha mikro yang memberikan sumbangan besar bagi upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga (Dewayanti & Chotim. 2004).

Yang menjadi masalah sekarang: apakah di daerah yang tengah mengalami perubahan dan proses industrialisasi, peran dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif juga makin penting dan menonjol? Di daerah yang tengah mengalami perubahan cukup drastis, seperti di wilayah eksplorasi migas, eksistensi dan peran perempuan miskin, di satu sisi mungkin benar akan terlihat makin penting dan strategis. Namun demikian, di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan akibat industrialisasi yang terjadi, justru peran perempuan menjadi makin kecil karena peluang-peluang usaha baru yang tersedia lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki daripada perempuan.

Di wilayah eksplorasi migas, studi ini menemukan tidak sedikit perempuan justru mengalami proses marginalisasi, karena ketidakberdayaan dan imbas dari masih kuatnya nilai-nilai patriarkhis di masyarakat. Akibat latar belakang pendidikan yang rendah, tidak dimilikinya modal yang cukup dan tidak pula dikuasai ketrampilan yang memadai, maka tidak sedikit peran perempuan miskin yang justru makin tersisih. Alih-alih esistensi dan peran perempuan miskin diakomodasi, dalam kenyataan yang terjadi justru keberadaan

perempuan miskin mengalami proses pereduksian karena situasi dan kondisi lingkungan sosial-ekonomi yang masih terkontaminasi ideologi patriarkhis.

Dalam bab ini, selain dipaparkan karakteristik perempuan dan kondisi ekonomi keluarganya, yang tak kalah penting juga akan dipaparkan tentang kondisi dan riwayat usaha, serta dampak industrialisasi terhadap peran dan keterlibatan perempuan miskin dalam tugas-tugas domestik dan kegiatan produktif, khususnya di wilayah eksplorasi migas.

3.1. Perempuan Miskin di Wilayah Eksplorasi Migas

Sesungguhnya tidak ada yang khas dari karakteristik dan profil sosial perempuan miskin di daerah eksplorasi migas di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian ini. Seperti perempuan di desa-desa yang lain di Jawa Timur, sebagian besar perempuan yang ada di desa-desa eksplorasi migas umumnya kurang atau bahkan tidak berpendidikan. Sebanyak 34% responden mengaku hanya tamatan SD, dan 37% tamat SD. Bahkan, ada 5,5% responden yang sama sekali tidak pernah mengenal bangku sekolah. Namun demikian, ada sebagian responden yang mengaku berpendidikan setingkat Akademi atau lulusan Perguruan Tinggi (2%). Untuk responden yang lulus SMU tercatat sebanyak 21,5%. Perempuan yang sempat mengenyam pendidikan tinggi ini, biasanya adalah mereka yang dulunya berasal dari keluarga yang secara ekonomi cukup mapan, namun karena berbagai hal kehidupan mereka sekarang justru malah memburuk dan jatuh miskin.

Dari 200 perempuan yang menjadi responden penelitian ini, semua sudah menikah atau sudah berkeluarga, dan hanya 2,5% responden yang belum memiliki anak. Bagi perempuan pedesaan, ketika mulai memasuki usia kepala 2 atau bahkan mungkin baru belasan tahun, sudah merupakan hal yang lazim jika mereka kemudian menikah atau dinikahkan orang tuanya karena untuk menghindari sebutan perawan tua. Di kalangan masyarakat pedesaan di daerah Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Sidoarjo, meskipun tidak terlalu menonjol seperti di daerah Tapal Kuda, tetapi kebiasaan perempuan menikah dalam usia yang masih terkategori remaja atau sekitar kepala 2 adalah hal yang cukup lazim.

Saat penelitian ini dilakukan, hampir semua responden yang sudah menikah umumnya telah memiliki anak. Dari 200 responden yang diteliti, hanya sebagian kecil (2,5%) yang mengaku belum memiliki anak. Sebagian besar responden (66%) mengaku telah memiliki anak 1-2 orang, dan 27% responden mengaku memiliki anak antara 3-4 orang. Sebanyak 2,5% responden memiliki anak antara 5-6 orang, dan bahkan 2% responden mengaku memiliki anak lebih dari 6 orang.

Tabel 8
Karakteristik Perempuan Miskin di Daerah Eksplorasi Migas (N=200, Dalam %)

Umur	20-30 tahun	32.5%
	31-40 tahun	31.5%
	41-50 tahun	24.0%
	50-60 tahun	8.5%
	>60 tahun	0.5%
Tingkat Pendidikan	Tidak Sekolah	5.5%
	SD	34.0%
	SLTP	37.0%
	SLTA	21.5%
	PT/Akademi	2.0%
Pekerjaan Pokok	Petani	14.0%
	Industri Kecil	5.0%
	Nelayan	1.0%
	Wiraswasta	10.0%
	Pedagang	17.5%
	Ibu Rumah Tangga	41.5%
	Lainnya...(buruh pabrik rokok, Buruh Konveksi, PRT, PNS, Pengrajin tas)	11.0%
Kepemilikan pekerjaan sampingan	Ya, memiliki pekerjaan sampingan tetap	2.5%
	Ya, memiliki tetapi tidak tetap	4.5%
	Tidak memiliki	93.0%
Jumlah anak responden	Tidak memiliki	2.5%
	1-2 anak	66.0%
	3-4 anak	27%
	5-6 anak	2.5%
	>6 anak	2.0%

Bagi keluarga yang secara ekonomi mapan, memiliki anak lebih dari 1 atau 2 orang barangkali tidak terlalu menjadi masalah. Dalam arti, mereka akan dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, baik soal gizi atau pendidikan. Tetapi, lain soal bagi keluarga-keluarga di wilayah eksplorasi migas yang secara ekonomi termasuk pra-sejahtera atau keluarga sejahtera I (KS I) yang *notabene* termasuk keluarga miskin. Bagi keluarga yang sehari-hari hidup pas-pasan, makin besar jumlah anak yang dimiliki itu berarti makin besar jumlah tanggungan keluarga, sehingga sudah biasa terjadi pada

keluarga seperti ini jumlah anak yang banyak seringkali menjadi beban tersendiri. Bisa dibayangkan, seberapa besar beban yang harus ditanggung keluarga miskin jika mereka memiliki anak 3,4 atau bahkan lebih dari 5 orang?

Di kalangan masyarakat pedesaan, fenomena perempuan bekerja dan berusaha bukanlah hal yang baru, terutama dalam kehidupan kelompok masyarakat yang marginal dan miskin. Usaha-usaha mikro, seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah, *home industry*, konveksi dan jasa adalah jenis-jenis usaha yang banyak ditekuni perempuan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga (Dewanyanti dan Chotim, 2004: x). Di kalangan keluarga miskin, perempuan seringkali harus ikut bekerja membantu suaminya mencari nafkah, karena mereka biasanya tidak cukup bila hanya mengandalkan penghasilan dari satu orang kepala keluarga.

"Kalau saya tidak ikut membantu bekerja, ya mana cukup. Suami saya kerjanya cuma tani, buruh tani. Kalau pas bukan musim tanam seperti sekarang ini, ya tidak ada kerjaan. Masih untung saya bisa bantu-bantu kerja di pabrik krupuk. Kalau tidak, ya dari mana uang untuk makan dan sekolah anak.....", tutur Ibu Srikamah (32 tahun).

Studi ini menemukan, di antara berbagai jenis pekerjaan yang ada di daerah industri migas, yang lazim ditekuni perempuan miskin umumnya adalah pekerjaan di sektor perdagangan tradisional (17,5%), menjadi pedagang di pasar. Jenis pekerjaan lain yang cukup populer adalah pekerjaan di sektor industri kecil (5%), sektor pertanian (14%), dan wiraswasta (10%). Di kawasan eksplorasi migas, sebetulnya cukup banyak bermunculan jenis pekerjaan baru di sektor jasa —yang muncul sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat lokal maupun pendatang. Namun, usaha atau jenis pekerjaan baru yang tumbuh itu biasanya tidak banyak yang bisa diakses perempuan miskin. Usaha Wartel atau penjahit, misalnya adalah salah satu jenis usaha jasa yang cukup banyak bermunculan bersamaan dengan makin meningkatnya aktivitas ekonomi dan dinamika penduduk di sekitar kawasan eksplorasi migas. Tetapi, untuk bisa membuka dan mengakses jenis pekerjaan ini tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit —yang mana hal itu biasanya justru merupakan titik lemah perempuan miskin.

Di luar usaha pokok, studi ini menemukan ada sebagian perempuan miskin yang mengaku memiliki pekerjaan sampingan (7%). Sebanyak 2,5% responden mengaku memiliki pekerjaan sampingan yang sifatnya tetap, dan sebanyak 4,5% mengaku memiliki pekerjaan sampingan tetapi sifatnya tidak tetap. Terlepas apapun pekerjaan sampingan yang ditekuni perempuan, yang jelas adanya sumber-sumber penghasilan alternatif di luar pekerjaan pokok itu bukan saja fungsional, tetapi juga sangat membantu untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga responden. Hanya saja, yang menjadi masalah peluang perempuan miskin untuk menekuni usaha alternatif ini biasanya sangat kecil, karena mereka biasanya juga harus menanggung beban untuk menyelesaikan tugas-tugas domestik.

Sejumlah perempuan miskin yang diwawancarai mengaku bahwa di luar jalur sekolah formal, mereka ada pula yang mencoba mengikuti kursus untuk menambah bekal ketrampilan alternatif, seperti kursus menjahit atau kursus rias. Ketika sektor pertanian dan perdagangan tradisional mulai jenuh, dimilikinya ketrampilan alternatif seperti ini, bagi perempuan miskin diakui sangat membantu. Hanya saja, diakui responden bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan alternatif ini sifatnya hanyalah *accidental* dan hanya sekadar untuk menambah uang jajan anak atau uang belanja harian keluarga mereka.

3.2. Kondisi Ekonomi

Berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa yang namanya keluarga miskin, tak terkecuali keluarga perempuan miskin yang tinggal di daerah industri migas, sebetulnya mereka selalu memiliki daya resistensi untuk menyiasati tekanan kemiskinan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang menjejaskan (Suyanto & Karnaji, 2005). Tetapi, ketika harga barang melambung terkena imbas kenaikan BBM, kesempatan kerja makin langka, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor riil tak kunjung membaik, dan pasar juga makin lesu akibat terjadinya krisis global, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah mulai memburuknya kondisi sosial dan ekonomi keluarga miskin hingga ke titik yang terkadang melewati batas toleransi.

Studi ini, menemukan bahwa untuk saat ini, terutama pasca kenaikan harga BBM, banyak keluarga miskin di kawasan eksplorasi migas di Jawa Timur umumnya masih belum mampu keluar dari berbagai persoalan ekonomi yang membebani mereka. Harga kebutuhan hidup sehari-hari yang merangkak naik karena dipicu kenaikan harga BBM dan inflasi menyebabkan tidak sedikit keluarga-keluarga miskin di daerah industri migas yang terancam *collapse*.

Tabel 9
Kondisi Ekonomi Keluarga Perempuan Miskin di Daerah Eksplorasi Migas
(N=200, Dalam %)

Kondisi ekonomi keluarga responden pasca pembangunan industri migas	Jauh lebih sejahtera	1.0%
	Lebih baik	17.5%
	Sama saja	61.0%
	Lebih buruk	17.0%
	Jauh lebih buruk	3.5%
Pasca dibangun industri migas, apakah responden pernah berganti pekerjaan	Ya	10.5%
	Tidak	89.5%
Jika ya, apakah kondisi pekerjaan yang ditekuni sekarang lebih baik dari pada pekerjaan yang ditekuni sebelumnya	Lebih baik	1.5%
	Sama saja	3.0%
	Lebih buruk	6.0%
Rata-rata penghasilan responden per bulan	Rp.100.000-Rp.300.000	59.1%
	Rp.300.001-Rp.500.000	31.8%
	Rp.500.001-Rp.700.000	6.1%
	≥Rp.700.001	3.0%
Rata-rata penghasilan keluarga responden per bulan	Rp.100.000-Rp.300.000	3.5%
	Rp.300.001-Rp.500.000	27.6%
	Rp.500.001-Rp.700.000	19.6%
	≥Rp.700.001	49.2%
intensitas responden untuk menabung dalam waktu 6 bulan terakhir	Selalu	4.5%
	Sering	14.0%
	Jarang	28.5%
	Tidak pernah	53.0%
Jumlah uang rata-rata yang bisa disisihkan perbulan	≤Rp.100.000	68.1%
	Rp.100.001-Rp.200.000	13.8%
	Rp.200.001-Rp.300.000	11.5%
	≥Rp.300.001	6.4%

Di atas kertas, memang kehadiran industri berskala raksasa seperti kegiatan eksplorasi migas seharusnya menghasilkan sejumlah perubahan baru yang menguntungkan masyarakat setempat, seperti munculnya kesempatan kerja baru, peluang usaha baru yang timbul karena perkembangan penduduk pendatang, dan sebagainya. Tetapi, karena di kawasan Bojonegoro, Sidoarjo, Tuban dan Gresik kehadiran industri

migas ini tergolong baru dan efek perubahannya juga belum segera bisa dinikmati masyarakat lokal, maka yang terjadi saat ini umumnya tidak banyak berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kalaupun terjadi perubahan dan munculnya peluang baru, yang bisa merasakan biasanya hanya kelompok masyarakat dan perempuan tertentu.

Dari 200 responden yang diteliti, hanya 17,5% yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga mereka makin baik pasca perkembangan kegiatan eksplorasi migas. Separuh lebih responden (61%) mengaku taraf kehidupan ekonominya tidak berubah alias tetap saja, baik sebelum maupun sesudah hadir industri eksplorasi migas di daerah tempat tinggal mereka. Bahkan, ada 17% responden mengaku kondisi ekonominya justru makin buruk atau jauh lebih buruk (3,5%) pasca kehadiran kegiatan eksplorasi migas di wilayahnya.

Sebagian perempuan yang mengaku taraf kehidupannya makin baik pasca eksplorasi migas, mereka umumnya adalah perempuan yang memiliki usaha tertentu yang sesuai dinamika perkembangan penduduk akibat industrialisasi. Perempuan yang membuka usaha wartel, misalnya, jelas mereka mengaku usahanya makin maju karena melayani kebutuhan para pendatang maupun penduduk setempat yang membutuhkan sarana tilpun, baik untuk komunikasi intern di wilayah kabupaten yang bersangkutan atau luar wilayah kabupaten. Perempuan yang membuka usaha warung atau toko, kebanyakan juga mengaku taraf kehidupannya makin baik karena pelanggan yang datang makin banyak. Pendek kata, perempuan yang menekuni usaha-usaha baru yang relevan dengan kebutuhan penduduk pendatang dan pekerja di kegiatan eksplorasi migas umumnya merasa saat ini kehidupan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Cuma, persoalannya berapa banyak perempuan miskin yang mampu membuka usaha baru sesuai perkembangan dinamika pasar seperti di atas?

Dari 200 perempuan miskin yang diteliti, 10,5% responden mengaku pernah berganti pekerjaan pasca dibangunnya industri migas di daerah tempat tinggal mereka. Tetapi, yang memprihatinkan, dari sebagian kecil perempuan miskin yang pernah berganti pekerjaan ini, separuh lebih mengaku justru kehidupan mereka lebih buruk setelah berganti pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang mengaku kehidupannya sekarang makin baik.

Menurut pengakuan sebagian besar responden (59,1%), untuk saat ini rata-rata penghasilan mereka per bulan sekitar 100-300 ribu rupiah, dan sebanyak 31,8% responden mengaku berpenghasilan sekitar 300-500 ribu per bulan. Bila ditambahkan dengan penghasilan anggota keluarga yang lain, terutama suaminya, total penghasilan keluarga responden memang naik. Sebagian besar keluarga responden mengaku per bulan berpenghasilan lebih dari 700 ribu, dan sebanyak 19,6% berpenghasilan 500-700 ribu rupiah. Untuk biaya hidup di pedesaan, sepiantas penghasilan yang mencapai 500 atau 700 ribu per bulan, barangkali terkesan cukup. Tetapi, ketika harga kebutuhan pokok sehari-hari terus merambat naik, apakah benar uang sebesar itu dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga responden?

Dalam kalkulasi matematis sederhana, keluarga dan perempuan yang memiliki penghasilan rata-rata per bulan di atas 500 atau 700 ribu, tentu kehidupan mereka akan lebih baik daripada keluarga-keluarga yang berpenghasilan di bawah 300 ribu. Tetapi, untuk memastikan apakah besar penghasilan mereka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau tidak, sebetulnya perlu pula dilihat berapa jumlah anak dan jumlah tanggungan pada masing-masing keluarga. Sebuah keluarga yang memiliki anak lebih dari 2 orang, apalagi sampai lebih dari 5 orang, sekalipun rata-rata penghasilan mereka per bulan lebih dari 600 atau 700 ribu, hal itu tidak akan terlalu banyak menolong, karena jumlah yang harus dikeluarkan setiap harinya juga makin besar.

Sejumlah informan yang diwawancarai secara mendalam menyatakan bahwa dengan beban tanggungan 3-4 orang anak, sekalipun penghasilan mereka mencapai 700 ribu lebih atau kadang 1 juta rupiah per bulan, tetap saja hal itu terasa berat karena mereka harus membagi untuk biaya hidup sehari-hari, uang sekolah anak, dan lain-lain – belum termasuk jika ada anggota keluarga yang sakit dan harus mengeluarkan biaya untuk berobat.

Di desa-desa yang diteliti, studi ini menemukan separuh lebih responden (53%) mengaku dalam 6 bulan terakhir umumnya tidak pernah bisa menabung. Jangankan menyisihkan sedikit uang untuk penyangga ekonomi sewaktu ada kebutuhan yang sifatnya mendadak. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup rutin sehari-hari saja mereka umumnya mengaku berat. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, memang

tidak banyak hal yang dapat dilakukan keluarga-keluarga miskin di daerah industri migas untuk dapat memberdayakan dirinya. Dari 200 perempuan miskin yang diwawancarai. Hanya 4,5% responden yang mengaku bisa secara rutin menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, sebanyak 14% mengaku sering menabung, dan 28,5% responden mengaku jarang bisa menabung. Responden yang mengaku dapat menabung ini, biasanya adalah perempuan yang memiliki pekerjaan sampingan atau perempuan yang memiliki usaha yang tergolong cukup mapan: pengusaha setempat yang mampu mencari peluang pasar lewat usaha-usaha produktif yang prospektif.

Tentang berapa besar penghasilan yang bisa disisihkan perempuan miskin setiap bulannya, tentu antara keluarga miskin yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Sebagian besar (68,1%) perempuan miskin yang diteliti mengaku setiap bulan rata-rata mereka hanya mampu menyisihkan sebagian penghasilan mereka kurang dari 100 ribu. Sebanyak 6,4% responden memang mengaku mampu menyisihkan hingga 300 ribu lebih setiap bulannya. Tetapi, dari hasil wawancara *in-depth* diketahui bahwa usia tabungan mereka biasanya tidaklah panjang. Meski mereka mengaku setiap bulan mampu menyisihkan sebagian penghasilannya. namun ketika ada kebutuhan yang sifatnya mendadak, semisal anak sakit. maka dengan cepat tabungan yang mereka miliki akan tersedot habis untuk memenuhi kebutuhan mendadak itu.

"Kalau tabungan, ya punya sedikit-sedikit. Kalau lagi ada perlu, ya pakai tabungan itu. Ya, untuk bayar sekolah, untuk biaya kalau anak sakit. Pokoknya untuk macam-macam.....", tutur Bu Sriati (34 tahun) asal Bojonegoro.

Apakah kegiatan eksplorasi migas akan menyebabkan keluarga-keluarga dan perempuan miskin di kawasan itu makin sejahtera atau justru makin terpuruk, tentu hanya waktu yang akan membuktikan. Namun demikian, yang jelas setiap perubahan baru memang membutuhkan mekanisme adaptasi dan kemampuan mengembangkan usaha yang ligat untuk menyiasati keadaan. Bagi perempuan yang memiliki kemampuan kewirausahaan lebih, tentu kesempatan mereka untuk merebut pasar dan memperbaiki nasib menjadi lebih terbuka. Tetapi, bagi perempuan miskin yang tidak berpendidikan dan tak berketrampilan, bukan tidak mungkin terjadinya perubahan akibat industrialisasi migas justru melahirkan tekanan dan kesengsaraan baru yang lebih menjejaskan.

3.3. Dampak Perkembangan Industri Migas

Di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perkembangan industri migas sesungguhnya termasuk hal yang relatif baru. Berbeda dengan kegiatan industri lain, seperti di sektor manufaktur, yang sudah lama dan banyak bermunculan di berbagai kota/kabupaten, perkembangan industri migas sangat ditentukan oleh potensi kekayaan alam yang dikandung wilayah tertentu. Di Provinsi Jawa Timur, seperti diketahui pembangunan industri migas hanya bisa dijumpai di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo dan Tuban. Di sejumlah wilayah ini, industri migas tumbuh dan berkembang menjadi *enclave* tersendiri, dan memiliki pranata sosial serta tata kerja yang khas.

Tabel 10
Akibat Positif yang Dirasakan Keluarga Responden
Pasca Pembangunan Industri Migas

Akibat Positif	Keterangan		
	Sangat terasa	Terasa	Tidak terasa
Dapat membuka usaha baru	4.0%	14.0%	82.0%
Omzet usaha meningkat	3.0%	12.5%	84.5%
Penghasilan meningkat	5.0%	18.0%	77.0%
Suasana tempat tinggal lebih ramai	9.0%	39.0%	52.0%
Kesempatan kerja perempuan makin meningkat	2.0%	4.5%	93.5%
Posisi perempuan lebih dihargai	2.0%	6.5%	91.5%

Bagi keluarga miskin, terutama perempuan miskin, perkembangan industri migas mungkin benar tidak menimbulkan dampak yang sifatnya langsung. Namun demikian, bagaimana pun harus diakui bahwa perkembangan industri migas yang merupakan industri *hightech*, cepat atau lambat akan melahirkan sejumlah perubahan dan akibat yang mempengaruhi pergeseran peran perempuan, baik di sektor domestik maupun di sektor publik. Lebih dari sekadar kehadiran mesin dan kilang-kilang untuk menampung gas atau kekayaan minyak bumi, pembangunan industri migas tentu akan menimbulkan pula perubahan kesempatan dan peluang kerja baru, gaya hidup, cara pandang masyarakat, dan berbagai aspek sosio-budaya lainnya.

Di sejumlah daerah industri migas di Provinsi Jawa Timur, dari hasil observasi bisa dilihat bahwa suasana fisik desa-desa di sekitar daerah eksplorasi migas memang

tampak berubah, bahkan sebagian di antaranya mengalami perubahan cukup drastis. Lingkungan desa menjadi jauh lebih ramai, sejumlah usaha warung, wartel, dan lapangan kerja baru tumbuh, dan sedikit-banyak penduduk setempat juga terkena imbas dari perubahan yang dihele perkembangan industri migas. Tetapi, bagi perempuan miskin, akibat perkembangan industri migas tampaknya masih jauh dari layak untuk disebut berdampak positif secara signifikan.

Tabel II
Lapangan Kerja Atau Usaha yang Tumbuh di Daerah Responden
Pasca Pembangunan Industri Migas

Lapangan kerja	Keterangan		
	Berkembang pesat	Berkembang	Tidak berkembang
1. Sector perdagangan (toko, warung)	6.0%	46.0%	48.0%
2. Sector jasa (kost-kosan)	3.0%	23.0%	74.0%
3. Sector transportasi (ojek)	8.5%	16.5%	75.0%
4. Sector informal (tukang cuci, PRT)	1.5%	22.0%	76.5%
5. Sector industry kecil	3.5%	25.0%	71.5%
6. Sector pertanian	3.0%	6.5%	90.5%
7. sektor formal (pabrik)	7.5%	21.5%	71.0%

Dari 200 perempuan miskin yang diwawancarai, hanya 3-4% atau maksimal tidak lebih dari 5% perempuan miskin yang mengaku memperoleh manfaat positif dari perkembangan industri migas di daerahnya. Sebanyak 4% responden memang mengaku dapat membuka usaha baru pasca pembangunan industri migas, dan 3% responden juga mengaku omzetnya meningkat, dan 5% responden mengaku penghasilannya meningkat setelah daerahnya makin ramai. Tetapi, studi ini menemukan sekitar tiga per empat lebih perempuan miskin yang ada di daerah industri migas ternyata mengaku tidak merasakan manfaat apapun pasca pembangunan industri migas di daerahnya. Bahkan, dari 200 perempuan miskin yang diteliti, separuh lebih menyatakan mereka tidak merasakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih ramai. Bagi mereka, industri migas tampaknya tampaknya menjadi dunia tersendiri yang terpisah dengan dunia keseharian mereka.

Dari segi lapangan pekerjaan dan usaha yang tumbuh pasca pembangunan industri migas, menurut responden yang termasuk cukup menonjol adalah lapangan pekerjaan dan usaha di sektor perdagangan, seperti warung, toko dan usaha-usaha perdagangan yang

sifatnya informal. Sebanyak 46% responden menyatakan di daerah mereka usaha perdagangan berkembang dan bahkan 6% menyatakan berkembang pesat setelah di daerah mereka dibangun industri migas.

Di luar sektor perdagangan, sepanjang hasil amatan responden umumnya tidak berkembang cukup baik. Kendati sebagian kecil usaha di sektor industri kecil menurut responden cukup berkembang (25%), tetapi secara keseluruhan tidak banyak peluang usaha dan pekerjaan baru yang tumbuh dan dapat diakses perempuan miskin. Bagi penduduk setempat yang memiliki modal yang relatif cukup, sebagian di antaranya memang bisa mengkses dan memanfaatkan perubahan situasi baru, seperti membuka usaha wartel atau membuka usaha kost-kostan. Tetapi, bagi perempuan miskin yang tidak memiliki mdoal yang cukup dan tidak pula berketrampilan, maka kemungkinan untuk mencari dan mengakses lapangan kerja baru yang tumbuh umumnya rendah.

Tabel 12
Keterampilan Yang Dimiliki dan dikuasai Perempuan Miskin

Jenis keterampilan	Keterangan	
	Tidak Menguasai	Menguasai
1. Pertanian	72.0%	28.0%
2. Menjahit	59.0%	41.0%
3. Kerajinan/industry kecil	76.5%	23.5%
4. Memasak	25.5%	74.5%
5. Administrasi	82.5%	17.5%

Studi ini menemukan, sebagian besar perempuan miskin yang diteliti umumnya tidak menguasai ketrampilan alternatif yang bisa mereka manfaatkan untuk mengembangkan usaha baru pasca pembangunan industri migas. Dari Tabel VI.5 kita bis melihat bahwa tidak banyak perempuan miskin yang menguasai ketrampilan alternatif yang bisa mereka andalkan untuk mencari pekerjaan baru. Sebagian besar perempuan umumnya lebih banyak menguasai ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik kerumahtanggan, seperti menjahit (41%) atau memasak (74,5%). sebaliknya tidak banyak perempuan miskin yang menguasai ketrampilan yang bisa mereka jadikan modal untuk mencuri peluang pasca pembangunan industri migas.

Tanpa ketrampilan yang mendukung dan tidak pula didukung modal yang cukup, jelas bukan perkara mudah bagi perempuan miskin untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Seperti diakui sebagian besar perempuan miskin yang diteliti, bahwa peluang

atau kemungkinan mereka untuk masuk dalam berbagai peluang usaha baru rata-rata sangat rendah. Untuk lapangan kerja yang sifatnya informal dan tidak membutuhkan prasyarat keahlian serta ijazah pendidikan, mungkin benar bahwa perempuan miskin akan dapat memasukinya. Tetapi, untuk dapat bekerja di sektor perekonomian firma di pabrik, tentu peluangnya relatif lebih kecil, bahkan boleh dikata nyaris tertutup. Dari 200 perempuan miskin yang diteliti, 41% menyatakan peluang mereka untuk masuk ke sektor formal relatif rendah, dan bahkan 33,5% menyatakan sangat rendah. Dalam penelitian ini, tidak lebih dari 10% responden yang optimis bisa masuk dan memanfaatkan peluang usaha baru yang tumbuh pasca pembangunan industri migas.

Tabel 13
Peluang Responden Memasuki Lapangan Kerja Baru Yang Muncul Pasca
Pembangunan Industri Migas

Lapangan kerja	Keterangan			
	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi
1. Sector perdagangan (toko, warung)	24.5%	32.5%	35.0%	8.0%
2. Sector jasa (kost-kosan)	33.0%	46.5%	18.0%	2.5%
3. Sector transportasi (ojek)	35.0%	49.5%	12.5%	3.0%
4. Sector informal (tukang cuci, PRT)	25.0%	44.0%	25.5%	5.5%
5. Sector industry kecil	26.0%	42.5%	26.5%	5.0%
6. Sector pertanian	24.5%	51.5%	18.5%	5.5%
7. Sektor formal (pabrik)	33.5%	41.0%	22.5%	3.0%

Menurut pendapat responden, di masa setelah hadir industri migas, di daerah mereka peluang usaha yang tumbuh umumnya lebih banyak dan untuk laki-laki daripada perempuan. Sebanyak 69.5% responden menyatakan bahwa di daerah mereka, lapangan kerja dan usaha yang berkembang pasca pembangunan industri migas rata-rata adalah lapangan kerja yang lebih banyak untuk laki-laki. Hanya 9% responden yang menyatakan lebih banyak untuk perempuan, dan 21,5% responden menyatakan sama saja.

Dari 200 perempuan miskin yang tinggal di daerah eksplorasi migas, sebanyak 17% responden memang mengakui bahwa pembangunan industri migas menguntungkan penduduk setempat, termasuk mereka. Tetapi, separuh lebih responden (56%) menyatakan bahwa pembangunan industri migas sebetulnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Bahkan, 20.5% responden menyatakan pembangunan industri migas malah merugikan, dan 4,5% menyatakan sangat merugikan, karena bukan saja menimbulkan

efek memarginalisasi peran perempuan, tetapi juga menyebabkan kelangsungan kehidupan mereka menjadi makin sulit.

Di tingkat keluarga perempuan miskin, sebanyak 18,5% responden mengaku bahwa ada anggota keluarga atau saudara mereka yang terserap dan bekerja di industri migas. Namun demikian, karena latar belakang pendidikan anggota keluarganya juga relatif rendah dan tak berkeahlian, maka biasanya peluang kerja yang bisa dimasuki adalah peluang kerja yang sifatnya kasaran dan informal –hal yang biasa terjadi dan dialami keluarga miskin di wilayah manapun. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa anggota keluarga perempuan miskin yang terserap di sektor industri migas umumnya bekerja di sektor yang tergolong pekerja kasaran, seperti menjadi satpam pabrik, bagian *cleaning services*, menjadi tukang atau kuli bangunan.

Tabel 14
Ketersediaan Lapangan Kerja dan Keuntungan Pembangunan Industri Migas Bagi Perempuan

Peluang lapangan kerja yang tumbuh pasca pembangunan industri migas	Lebih banyak untuk laki-laki	69.5%
	Sama saja	21.5%
	Lebih banyak untuk perempuan	9.0%
Anggota keluarga responden yang terserap bekerja di usaha industri migas	Ya, ada	18.5%
	Tidak ada	81.5%
Pembangunan industri migas menguntungkan atau malah merugikan responden sebagai seorang perempuan	Sangat menguntungkan	2.0%
	Menguntungkan	17.0%
	Tidak berpengaruh	56.0%
	Merugikan	20.5%
	Sangat merugikan	4.5%

Kalau berbicara idealnya, sebetulnya para perempuan miskin yang diwawancarai sebagian besar menyatakan ingin dapat mengembangkan usaha dan bekerja di sektor yang lebih menjanjikan daripada yang selama ini mereka jalani. Namun, disadari bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah. Peluang perempuan miskin untuk mengembangkan usaha produktif, seringkali terhambat karena tidak dimilikinya dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan. Di bidang permodalan, misalnya, sebanyak 60,5% responden menyatakan peluang mereka untuk bisa mengakses sumber permodalan relatif kecil.

Di bidang produksi dan pemasaran, keluhan yang sama juga dilontarkan responden. Meski mereka menyatakan antusias untuk mengembangkan usaha produktif, namun kemungkinan untuk meningkatkan omzet produksi dan pangsa pasar umumnya

juga rendah. Sebanyak 56% responden menyatakan peluang mereka mencari jaringan pasar relatif kecil, dan sebanyak 54% responden menyatakan peluang mereka untuk meningkatkan produksi juga kecil. Jadi, alih-alih bersikap optimis untuk menghadapi tantangan kehidupan dan usahanya, studi ini menemukan bahwa sebagian besar perempuan miskin pada akhirnya lebih memilih bersikap pesimistis. Ketika disadari bahwa peluang untuk mengembangkan usaha ke depan kecil, maka yang bisa dilakukan sekarang adalah menjalani apa yang sudah ada, sembari berharap akan terjadi perubahan yang lebih baik.

“Sekarang ini mau cari kerja apa aja sulit, mas. Mau buka warung, nanti siapa yang beli. Lha wong sekarang ini cari duit susah. Di desa ini, banyak orang susah, mas. Ndak tahu kenapa kok keadaan rasa-rasanya malah makin susah. Dulu saya pernah usaha buat makanan kecil. Tapi, lama kelamaan kok ya rugi terus. Bahan bakunya naik, tapi harganya kalau dinaikkan ndak ada yang beli. Ya, sudah... Akhirnya saya kerja ikut orang....”, tutur Bu Khoriyah (41 tahun), asal Bojonegoro.

Tabel 15
Peluang Perempuan Miskin Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha Produktif
Pasca Pembangunan Industri Migas

Peluang mengembangkan usaha	Keterangan		
	Besar	Biasa	Kecil
1. Dukungan permodalan	15.0%	24.5%	60.5%
2. Produksi	15.5%	30.5%	54.0%
3. Pemasaran	6.0%	38.0%	56.0%
4. Bahan baku	6.0%	46.5%	47.5%

Secara umum, studi ini menemukan kendala yang menghambat peluang perempuan miskin untuk mengembangkan kegiatan usaha pasca pembangunan industri migas adalah kendala yang sifatnya struktural. Dari 200 perempuan miskin yang diteliti, memang cukup banyak (15%) yang mengaku bahwa kendala yang menghambat peluang perempuan miskin terlibat dalam kegiatan produktif adalah akibat beban pekerjaan domestik, seperti pengasuhan anak, memasak, dan berbagai tugas kerumahtanggaan lain yang menjadi tanggungjawab mereka. Tetapi, sebagian besar (71.5%) responden menyatakan bahwa keluarga, khususnya suami sebetulnya sudah memberi kebebasan atau tidak menghambat keinginan responden untuk bekerja di sektor publik.

Hanya saja, seperti yang dituturkan responden, akibat mereka tidak memiliki modal yang cukup (54%), maka bisa dipahami jika para perempuan miskin ini kesulitan

ketika berusaha mengembangkan kegiatan usaha tertentu. Sebagai perempuan miskin, mereka biasanya memang tidak memiliki tabungan atau simpanan yang bisa diandalkan untuk membuka sebuah usaha –meski itu kecil-kecilan sekalipun. Untuk membuka warung kecil-kecilan saja, menurut penuturan sejumlah responden, paling-tidak modal yang dibutuhkan sekitar 300-500 ribu. Jika untuk makan sehari-hari saja mereka sudah pas-pasan, lantas dari mana mereka bisa menyisihkan penghasilannya untuk ditabung hingga bisa dipergunakan sebagai modal membuka usaha baru?

“Maunya ya kerja, pak. Soalnya, kalau saya ndak mbantu ikut kerja, ndak cukup. Wong bapak cuma tani. Sekarang ini, kerja tani hasilnya ndak tentu. Jadi, ya saya maunya kalau bisa kerja. Bapak juga tidak melarang saya kerja. Yang saya bingung itu, mau kerja apa. Anak saya masih kecil. Kalau saya kerja di luar ndak mungkin anak saya, saya tinggal. Mau buka warung di rumah, kan butuh modal. Dari mana uangnya....”, tutur Ibu Suparti (25 tahun) asal Gresik.

Tabel 16
 Faktor-Faktor Yang Menghambat Peluang Perempuan Miskin Mengembangkan Kegiatan Usaha Pasca Pembangunan Industri Migas

Factor Penghambat	Keterangan		
	Menghambat	Cukup Menghambat	Tidak Menghambat
1. Beban pekerjaan domestik	15.0%	39.5%	45.5%
2. Tidak memiliki keterampilan yg mendukung	45.0%	46.5%	8.5%
3. Kekurangan modal	54.0%	34.0%	12.0%
4. Dilarang suami/keluarga	4.5%	24.0%	71.5%

Di luar faktor modal, menurut responden kendala yang menghambat peluang mereka untuk mengembangkan usaha produktif adalah karena tidak memiliki ketrampilan yang mendukung. Sebanyak 45% responden menyatakan hal ini menghambat, dan 46.5% responden menyatakan cukup menghambat. Untuk bekerja di sektor informal, mungkin benar tidak banyak prasyarat yang diminta, kecuali hanya kesediaan mereka untuk bekerja keras. Tetapi, bagi perempuan miskin yang berkeinginan bekerja di sektor publik, tentu yang dibutuhkan tidak hanya kesanggupan dan tenaga otot saja, melainkan juga keahlian atau ketrampilan tertentu yang mendukung. Menurut sebagian responden, justru dalam hal inilah mereka memiliki kekurangan.

Tabel 17
**Akibat Negatif Yang Menimpa Keluarga Responden
 Pasca Pembangunan Industri Migas**

Akibat Negatif	Keterangan		
	Sangat terasa	Terasa	Tidak terasa
Anak-anak terpaksa putus sekolah	3.5%	4.5%	92.2%
Waktu untuk mengasuh anak berkurang	2.5%	7.0%	90.5%
Kehilangan pekerjaan	5.5%	10.5%	84.0%
Usaha yang ditekuni mengalami kemunduran	7.5%	31.0%	61.5%
Kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari	18.0%	26.0%	56.0%
Terganggunya kesehatan anggota keluarga	24.0%	25.5%	50.5%
Utang meningkat	24.0%	24.5%	51.5%
Kepemilikan lahan berkurang	6.5%	17.5%	76.0%

Menyatakan dan “menuduh” pembangunan industri migas sebagai sumber berbagai masalah yang sekarang ini dialami keluarga dan perempuan miskin, jelas merupakan sikap yang gegabah. Tetapi, bagaimana pun harus diakui bahwa sejak pembangunan industri migas berlangsung di wilayah mereka, kehidupan dan beban yang dihadapi umumnya menjadi lebih berat. Alih-alih taraf kehidupan perempuan miskin ikut terkatrol naik karena imbas pembangunan industri migas, justru dalam kenyataan yang terjadi adalah proses marginalisasi yang merugikan posisi perempuan miskin.

Dari hasil wawancara mendalam diketahui sejumlah dampak atau akibat negatif yang dialami keluarga dan perempuan miskin pasca pembangunan industri migas. terutama adalah menurunnya taraf kesejahteraan mereka, yang itu semua ditandai dengan meningkatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (18%) dan meningkatnya jumlah utang (24%), serta meningkatnya gangguan kesehatan anggota keluarga (24%). Berbagai akibat ini, meski sifatnya tidak langsung, bagaimana pun menyebabkan peluang perempuan miskin dalam menghadapi masa depan menjadi lebih sulit, rentan, dan tidak berdaya.

3.4. Peran Perempuan di Sektor Domestik dan Publik

Di berbagai wilayah, keterlibatan perempuan miskin dalam berbagai kegiatan produktif sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam kegiatan perekonomian di perdesaan, perempuan miskin acapkali memegang peran yang sama pentingnya dengan laki-laki -- walaupun angka-angka statistik dan juga budaya setempat seringkali tidak

memperhitungkan peran-peran perempuan tersebut sebagai kerja produktif. Peran yang dipegang perempuan dalam pengaturan sumber daya ekonomi kebanyakan dianggap merupakan perpanjangan kerja domestik yang dipersepsi sebagai kerja non-produktif (Dewayanti, dalam: Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, No. 2, 2003: 77). Padahal, sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga, penghasilan yang diperoleh perempuan seringkali tidak kalah bila dibandingkan dengan laki-laki, dan bahkan terkadang lebih besar.

Tabel 18
Kondisi Peran Responden Di Kegiatan Produktif Maupun Domestik
Sejak Adanya Industri Migas

Peran Perempuan Miskin di kegiatan produktif semakin berat atau semakin ringan Pasca Pembangunan Industri Migas	Semakin berat	10.0%
	Sama saja	82.0%
	Semakin ringan	8.0%
Peran perempuan miskin di kegiatan domestik semakin berat atau semakin ringan Pasca Pembangunan Industri Migas	Semakin berat	25.0%
	Sama saja	75.0%
	Semakin ringan	0.0%

Studi ini menemukan beberapa macam pengelompokan kerja yang biasa ditekuni perempuan, seperti sistem produksi subsisten, pekerjaan tanpa upah dalam sistem produksi keluarga, sistem *putting out*, pekerja rumahan (*home worker*), pekerja dalam usaha rumahan (*home-based worker*), pembantu rumah tangga, buruh upahan dan usaha mandiri (*self-employed*). Terlepas apapun jenis pekerjaan yang ditekuni perempuan, dari waktu ke waktu peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai jenis pekerjaan produktif telah makin berkembang. Meskipun jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni perempuan masih banyak berkaitan dengan pekerjaan di sektor domestik dan peluang yang tersedia tidak sebesar laki-laki. Tetapi, dalam batas-batas tertentu studi ini menemukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan produktif sesungguhnya sangat strategis. Bekerja yang menghasilkan dan tetap bertanggungjawab menyelesaikan tugas-tugas domestik adalah dua hal yang biasa bagi perempuan di wilayah pedesaan, tak terkecuali di wilayah industri migas.

Dari hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa sebelum kegiatan eksplorasi migas dilakukan di wilayah penelitian, banyak perempuan miskin mengaku telah bekerja dan menjadi salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga. Dari 200 responden yang

diwawancarai, hampir semua mengaku telah bekerja lama dan ikut membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Bahkan sebelum kegiatan eksplorasi migas berlangsung di wilayah tempat tinggal responden, para perempuan miskin itu telah biasa bekerja dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarganya, karena dalam kenyataan mereka memang tidak mungkin hanya mengandalkan kepada penghasilan yang diperoleh suaminya saja.

Secara umum, studi ini menemukan tidak ada perbedaan tentang beban yang ditanggung perempuan miskin, baik di sektor publik maupun di sektor domestik sebelum maupun sesudah dibangun industri migas di wilayah tempat tinggal mereka. Sebanyak 80% responden menyatakan beban yang mereka tanggung di sektor produktif relatif sama, baik sebelum maupun sesudah berkembang industri migas. Sementara itu, sebanyak 75% responden juga menyatakan sama saja beban yang ditanggung di sektor domestik, baik sebelum maupun sesudah industri migas berkembang di wilayahnya. Ini berarti, ada atau tidak pembangunan dan aktivitas industrialisasi di wilayah mereka, ternyata itu semua tidak mempengaruhi aktivitas perempuan miskin di sektor publik maupun domestik.

Tabel 19
Peran Perempuan dan Suami Dalam Menjalankan Usaha yang Ditekuni
Pasca Pembangunan Industri Migas (N=168)

Usaha	Keterangan		
	Suami	Istri	Suami-istri
1. Menentukan jenis usaha	39.9%	14.9%	45.2%
2. Pembelian bahan baku	44.0%	24.4%	31.5%
3. Pemasaran produk	38.1%	24.4%	37.5%
4. Pengelolaan keuangan	16.1%	50.6%	33.3%

Di kalangan keluarga miskin, dalam menjalankan usaha keluarganya umumnya telah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam menentukan jenis usaha apa yang ditekuni, biasanya antara suami dan istri memiliki peran yang sama penting (45.2%). Tetapi, untuk urusan pengelolaan keuangan umumnya peran perempuan lebih menonjol. Dari 200 responden yang diwawancarai, separuh lebih (50,6%) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan usaha keluarga umumnya yang memegang kendali adalah istri atau perempuan miskin. Sedangkan untuk pembelian bahan baku (44%) dan pemasaran produk (38,1%) umumnya peran suami atau laki-laki yang lebih menonjol.

Tabel 20
 Pihak yang Berperan Melaksanakan Pekerjaan Domestik
 Pasca Pembangunan Industri Migas

Jenis pekerjaan domestik	Keterangan			
	Suami	Istri	Suami-istri	Anak
1. Memasak	5.0%	94.0%	1.0%	0%
2. Mencuci	4.5%	90.5%	3.0%	2.0%
3. Membersihkan rumah	3.5%	88.0%	3.0%	5.5%
4. Menyetrika	4.5%	90.5%	1.5%	3.5%
5. Mengasuh anak	2.5%	75.0%	22.0%	0.5%

Yang menarik ditemukan dalam studi ini, meski dalam kegiatan produktif peran perempuan terlihat makin menonjol. Tetapi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan domestik, ternyata antara laki-laki dan perempuan masih terjadi pembagian kerja yang cenderung membebani perempuan. Di kalangan keluarga miskin di wilayah industri migas, sudah lazim terjadi bahwa posisi perempuan umumnya masih menjadi korban nilai-nilai patriarkhis. Perempuan miskin seringkali masih harus menanggung beban ganda yang berat, yakni ikut membantu bekerja di kegiatan produktif, namun pada saat yang sama mereka juga masih harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai tugas kerumahtanggaan atau tugas-tugas di sektor domestik.

Studi ini menemukan, dari berbagai tugas domestik, seperti memasak (94%), mencuci (90.5%), membersihkan rumah (88%), menyetrika (90.5%) dan mengasuh anak (75%), semuanya masih menjadi beban tunggal pihak perempuan. Dalam beberapa keluarga responden, sebagian kecil memang mengaku pekerjaan domestik itu mereka lakukan bersama atau dibantu anak-anak mereka yang sudah mulai tumbuh remaja. Tetapi, tetap yang memegang peran utama bagaimanapun adalah para istri yang *notabene* perempuan miskin. Seberapapun besar sumbangan ekonomi istri, di kalangan keluarga miskin yang masih terkontaminasi nilai-nilai patriarkhis, maka yang terjadi tetap saja perempuan harus menanggung beban ganda yang berat, yaitu bekerja dan menyelesaikan pekerjaan domestik.

4. Kendala Pengembangan Usaha

Seorang ahli sekaligus pemerhati masalah kemiskinan, Robert Chambers (1987), menyebutkan bahwa orang yang berada dalam kondisi kemiskinan senantiasa diliputi

suasana serba memprihatinkan. Selain kondisi ekonomi yang terbatas karena penghasilan rendah bahkan tidak berpenghasilan orang miskin dan keluarganya biasanya sangat lemah dalam melakukan *bergaining* terhadap lingkungan mereka, bahkan secara ekstrim mereka akan menjadi terasing. Ketidak berdayaan maupun kerentanan yang dihadapi keluarga miskin semakin terasa berat ketika keluarga miskin dihadapkan pada situasi di luar batas kemampuan ekonomi mereka. Kondisi keterpurukan yang dirasakan oleh masyarakat miskin semakin terasa dengan melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Hampir dapat dipastikan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak terkecuali dengan mereka yang tinggal di daerah sekitar industri migas dihadapkan pada suatu kondisi terpuruk dan sangat tertekan secara ekonomik pasca kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan dan ketidak berdayaan mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Bagi kaum perempuan dari keluarga miskin kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok tidak hanya membuat kesulitan hidupnya kian bertambah, tetapi kesempatan untuk mengembangkan usaha juga semakin kecil.

Sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh LPPM Universitas Airlangga tahun 2006 menunjukkan banyaknya keluarga miskin yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Akibat kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok juga turut mengalami kenaikan sementara kesempatan untuk menaikkan penghasilan masih terasa sulit. Dengan besar penghasilan tetap sementara harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan maka oleh banyak responden dirasakan cukup berat untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok secara wajar. Kondisi ketidakseimbangan antara kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dengan melambungnya harga kebutuhan pokok tak pelak menyebabkan kian terpuruknya keluarga miskin yang sebelumnya berada pada posisi tidak berdaya dan rentan. Kenaikan harga bahan baka minyak tidak hanya memberikan dampak terhadap pola pemenuhan kebutuhan akan makanan semata melainkan juga menyentuh aspek kehidupan yang lain seperti; kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan sebagainya.

Bagi kaum perempuan dari keluarga miskin yang tinggal di daerah eksplorasi migas akibat kenaikan harga BBM nampaknya memberikan pengaruh cukup serius terhadap berbagai sendi kehidupan kelompok masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok ternyata tidak hanya memberikan dampak terhadap pola pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tetapi juga berdampak pada kelangsungan aktivitas usaha ekonomi produktif yang mereka tekuni.

4.1. Kondisi dan Prospek Usaha yang Ditekuni Perempuan Miskin

Secara teoritik dalam suatu proses pembangunan lazimnya akan memberikan konsekuensi dan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan social. Secara fisik pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah biasanya akan memacu dan meningkatkan akselerasi bagi terciptanya kemajuan pembangunan fisik lain yang terkait dengan pembangunan itu sendiri. Lazimnya pembangunan industri yang terjadi di suatu wilayah akan meningkatkan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana fisik bagi lingkungannya. Sementara itu secara social ekonomi pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah diharapkan akan mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain proses pembangunan dan industrialisasi yang berlangsung di wilayah mana pun, idealnya harus menimbulkan *multiplier effect* yang menguntungkan masyarakat lokal. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi masyarakat miskin yang menjadi area penelitian kali ini? Apakah eksplorasi migas yang dilakukan di berbagai wilayah di Jawa Timur memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di sekitarnya khususnya di kalangan perempuan?

Meskipun mungkin sifatnya tidak langsung, sesungguhnya kehadiran industri migas diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi tumbuhnya berbagai kesempatan kerja dan perkembangan usaha yang kondusif, terutama bagi kelompok usaha kecil menengah yang biasanya ditekuni penduduk setempat. Ketika penelitian dilakukan di beberapa wilayah di propinsi Jawa Timur fakta empiris menemukan bahwa sepiintas memang terlihat adanya perubahan di desa-desa yang berada di sekitar lokasi

pembangunan industri migas apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Artinya, suasana desa tampak jelas sekarang ini makin ramai, berbagai usaha baru banyak bermunculan, toko-toko dan warung-warung pun makin banyak. Sebagaimana yang lazim terjadi dalam proses pembangunan. ketika penduduk yang berasal dari luar daerah dan terlibat dalam pembangunan meningkat maka penduduk setempat akan cepat merespon dan menyediakan fasilitas baik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maupun untuk kepentingan akomodasi. Sehingga dengan hadirnya industri migas di suatu wilayah maka biasanya toko, kios, warung, tempat penginapan atau persewaan tempat serta berbagai jenis aktivitas ekonomi yang lainnya akan tumbuh.

Kendati pada level desa atau wilayah eksplorasi migas telah terjadi perkembangan secara signifikan tetapi, bagi penduduk desa setempat perkembangan semacam ini bukan berarti tanpa resiko. Ketika usaha makin berkembang, bagi pelaku usaha kecil dan menengah ternyata hal itu seringkali justru memberikan dampak kontra-produktif. Ketika jumlah pesaing makin banyak, maka segera terasakan bahwa pangsa pasar menjadi makin diperebutkan dan harus dibagi-bagi ke berbagai pihak.

Dalam penelitian ini misalnya dari sebanyak 200 perempuan yang berasal dari keluarga miskin ditemui ternyata sebanyak 25.1% responden mengaku bahwa pasca pembangunan industri migas, yang segera terasakan adalah jumlah pesaing yang makin meningkat, dan bahkan sebanyak 1.6% responden menyatakan sangat meningkat. Bagi penduduk setempat, jumlah pesaing usaha yang makin meningkat ini sudah tentu kurang menguntungkan, sebab semakin banyak pangsa pasar yang harus dibagi, itu berarti kemungkinan jumlah keuntungan yang diperoleh menjadi makin sedikit. Seorang responden yang ditemui dalam penelitian ini dan menyampaikan banyaknya pesaing dan semakin berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dulu ketika membuka usaha warung di pinggir jalan ini, belum banyak warung serupa yang ada. Setiap hari warung selalu ramai dikunjungi pembeli. Tetapi, sejak pembangunan industri migas berlangsung dan warung di pinggir jalan makin banyak, maka jumlah pembeli warung miliknya mulai berkurang, dan bahkan keuntungan yang diperoleh sudah semakin menurun, demikian ungkap salah seorang responden yang ditemui.

Hadirnya aktivitas eksplorasi migas sebenarnya juga masih belum terlalu banyak membantu perempuan miskin yang memiliki aktivitas usaha ekonomi produktif. Hal ini terlihat dari pengakuan sebanyak 64,7% yang menyatakan bahwa sampai sejauh ini jumlah saingannya masih tetap tinggi. Selain itu sebagian besar responden (68,4%) juga menyampaikan bahwa biaya produksi untuk usaha mereka juga masih tetap. Sementara itu sebanyak 69.5% responden menyatakan bahwa soal permodalan juga dinilai masih tetap setelah adanya pembangunan migas di lingkungan mereka.

Tabel 21
 Kondisi Usaha yang Ditekuni Responden Pasca Pembangunan Industry Migas
 (Dalam persentase; N = 200)

Kondisi usaha	Keterangan				
	Sangat meningkat	Meningkat	Tetap	Menurun	Sangat menurun
1. Biaya produksi	4.3%	23.0%	68.4%	3.7%	0.5%
2. Pangsa pasar/pemasaran	0.5%	25.1%	66.8%	7.5%	0
3. Jumlah saingan	1.6%	31.0%	64.7%	2.7%	0
4. Keuntungan	7.5%	8.6%	58.8%	22.5%	2.7%
5. Permodalan	7.0%	7.0%	69.5%	15.5%	1.1%

Selanjutnya penelitian ini menemukan sekitar 22.5% responden menyatakan keuntungan yang diperoleh sekarang ini menurun, dan bahkan 2.7% menyatakan keuntungannya sangat menurun. Jika sebelumnya setiap harinya salah seorang responden mengaku keuntungan yang diperoleh setiap harinya sekitar 20-30 ribu, maka pada saat ini hanya hari-hari tertentu saja bisa memetik keuntungan sebesar itu. Setiap hari rata-rata keuntungan dari usahanya membuka warung hanya berkisar antara 5 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah.

Meski secara persentatif tidak terlampau tinggi tetapi selain keuntungan yang turun drastis, hal lain yang dikeluhkan responden adalah persoalan permodalan. Menurut pengakuan sebanyak 15,5% responden, saat ini modal yang dimiliki sudah mulai menurun, dan bahkan 1,1% responden menyatakan sangat menurun. Sementara itu, yang merisaukan responden, ketika modal yang dimiliki mulai menurun karena sebagian terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata di saat yang sama biaya produksi yang dibutuhkan justru bertambah naik (dikemukakan oleh sebanyak 23%). Salah seorang pemilik industri kecil pembuatan krupuk mengatakan,

bahwa saat ini biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi krupuk naik sekitar cukup signifikan. Kenaikan harga beberapa bahan pokok seperti cabe, gula, tepung serta berbagai jenis kebutuhan lain, dinilai cukup meresahkan karena selain biaya produksi yang meningkat harga jual produk krupuk di pasaran justru mengalami penurunan. Daya beli masyarakat saat ini juga cenderung mengalami penurunan akibat kenaikan harga BBM. Kondisi ini membuat penduduk di daerah industri migas sepertinya kehilangan pelanggan, sehingga bisa dimaklumi jika keuntungan yang diperoleh pun menjadi semakin kecil.

Bagi masyarakat miskin, kurang berpendidikan dan tak berkeahlian di daerah industri migas, sebetulnya tidak banyak pilihan yang dapat mereka akses untuk mengembangkan taraf kehidupannya. Berbagai usaha yang ditekuni, secara terus-terang diakui sulit diharapkan dapat berkembang lebih jauh, bahkan untuk sekadar sebagai tempat bergantung hidup pun rasa-rasanya makin jauh dari harapan. Kehadiran industri migas yang mungkin sangat menguntungkan bagi daerah setempat karena menyumbang PAD yang luar biasa besar. Namun, bagi masyarakat lokal kehadiran industri migas acapkali malah membuat kehidupan menjadi makin sulit.

Sebagaimana diakui oleh cukup banyak responden dalam penelitian ini (14.7%) bahwa pasca pembangunan industri migas prospek usaha yang ditekuni cenderung makin suram, dan bahkan 4.2% responden menyatakan sangat suram. Dari 200 responden yang diteliti, hanya 11% yang menyatakan prospek usaha yang ditekuni cerah atau bagus, dan 1.6% menyatakan sangat cerah. Sebagian besar bersikap pesimis pada prospek perkembangan usahanya, sebab selain jumlah pesaing menjadi makin banyak sehingga pangsa pasar menjadi terbagi-bagi, juga karena biaya produksi yang dikeluarkan tidak lagi sebanding dengan omzet penjualan yang terus menurun.

Sebagaimana pengakuan sebagian besar responden, saat ini situasi menjadi cukup sulit karena kebijakan yang dikembangkan pemerintah dinilai justru makin memperburuk situasi. Seperti diketahui, ketika pemerintah terus-menerus mengurangi subsidi terhadap harga BBM, maka yang dihasilkan adalah terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari, dan sekaligus memicu meningkatnya biaya produksi dari berbagai usaha yang ditekuni masyarakat di daerah industri migas. Padahal, daya beli masyarakat pasca

kenaikan harga BBM cenderung turun, sehingga margin keuntungan yang diperoleh masyarakat menjadi makin tipis, dan bahkan sebagian terpaksa harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Tidak jarang perempuan miskin yang ditemui dalam penelitian ini mengeluh sulitnya memperoleh keuntungan dalam usaha mereka. Kembali modal saja sudah untung untuk usaha saat ini dari pada merugi. Oleh karena itu tidak jarang mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak terlalu mahal bahkan hanya mengambil keuntungan kecil atau tidak sama sekali. Kondisi seperti ini membuat perempuan miskin yang memiliki usaha kadang terperangkap hutang karena modal yang tak kembali itu ternyata dari hasil pinjaman.

Tabel 22
Prospek Usaha atau Pekerjaan Yang Ditekuni Responden, Asal Modal dan Tingkat Kebutuhan Terhadap Bantuan Pemerintah
(Dalam persentase; N = 200)

Prospek usaha atau pekerjaan yang ditekuni responden pasca pembangunan industri migas	Sangat bagus	1.6%
	Bagus	11.0%
	Biasa	68.6%
	Suram	14.7%
	Sangat suram	4.2%
Sumber modal yang dipergunakan responden membuka dan mengembangkan usaha	Modal sendiri	88.6%
	Diberi kerabat	1.1%
	Pinjam kerabat	5.7%
	Pinjam orang lain	3.4%
	Bantuan pemerintah	0.6%
Pinjam di Bank	0.6%	
Sejauhmana responden membutuhkan bantuan pemerintah untuk membuka atau pengembangan usaha yang ditekuni	Sangat membutuhkan	49.5%
	Membutuhkan	25.5%
	Cukup membutuhkan	11.5%
	Kurang membutuhkan	12.5%
	Sangat tidak membutuhkan	1.0%

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar responden (88,6%) yang mengaku asal modal usahanya berasal dari modal sendiri. Sementara itu sebanyak 3,4% mengaku asal modal usaha mereka adalah dari pinjaman orang lain, dan 5,7% responden menyatakan pinjaman kerabat. Ada sebagian responden mengaku modal usahanya adalah bantuan dari pemerintah, tetapi jumlahnya relatif tidak banyak, hanya 0,6%. Banyaknya perempuan miskin yang membuka usaha dengan modal usaha sebenarnya disebabkan oleh

beberapa kondisi antara lain; (a). modal usaha yang dibutuhkan kadang tidak terlampau besar; (b). khawatir jika berhutang atau meminjam modal usaha maka sulit untuk mengembalikan; (c). kadang bunganya terlampau memberatkan; (d). prosedur untuk meminjam kadang terlalu berbelit; (e). tidak adanya agunan seringkali mereka tidak memiliki kesempatan untuk meminjam; (f). jika dengan modal sendiri akan lebih bebas dan tidak merasa terbebani terutama dengan pengembalian modal usaha.

4.2. Kendala Pengembangan Usaha yang Ditekuni Perempuan Miskin

Salah satu persoalan mendasar yang kerap kali dihadapi oleh keluarga miskin khususnya yang memiliki kegiatan ekonomi produktif adalah daya keberlangsungan atau kontinuitas usaha yang menjadi sumber pendapatan mereka. Ketika kegiatan usaha ekonomi produktif yang menjadi tumpuan hidup masyarakat miskin mengalami hambatan dan ancaman niscaya kehidupan mereka turut terancam pula. Masih untung jika masyarakat miskin melakukan diversifikasi usaha, artinya mereka tidak hanya menggantungkan hidupnya dari satu jenis usaha. Ketika satu jenis aktivitas usaha ekonomi produktif gulung tikar maka mereka masih dapat menggantungkan hidupnya atau mata pencaharian dari jenis usaha yang lainnya. Sebaliknya jika masyarakat miskin hanya memiliki satu jenis kegiatan usaha maka jika tempat gantungan satu-satunya runtuh niscaya keterpurukan akan dialaminya.

Dalam perjalanan menapaki aktivitas usaha ternyata perempuan miskin yang tinggal di sekitar eksplorasi migas menghadapi sejumlah persoalan khas berkaitan dengan dunia usaha pada umumnya. Permasalahan permodalan yang relatif terbatas; pangsa pasar dan adanya persaingan yang ketat; jaringan pemasaran yang terbatas; dan ketrampilan yang dikuasai masih relatif terbatas merupakan persoalan-persoalan yang kerap kali menjadi keluhan diantara mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan misalnya tercatat beberapa jenis kendala yang sering dihadapi dan dinilai menghambat pengembangan usaha mereka. Faktor persaingan dan pemasaran serta iklim persaingan yang ketat misalnya merupakan persoalan serius yang dihadapi mereka. Kendati demikian dari hasil penelitian ini teridentifikasi derajat hambatan yang menyangkut berbagai aspek usaha tersebut.

Salah satu kendala yang dirasakan sangat menghambat usaha para perempuan miskin adalah masalah permodalan. Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa permodalan merupakan faktor penghambat bahkan sangat menghambat perkembangan usaha mereka (dikemukakan oleh sebanyak 84,5% dari jumlah seluruh responden). Jika dibandingkan dengan aspek usaha yang lain terlihat bahwa permodalan merupakan aspek yang paling banyak dikeluhkan. Selanjutnya persoalan persaingan, jaringan pemasaran, ketrampilan yang dikuasai, lokasi usaha serta koneksi.

Tabel 23
Kendala-Kendala yang Menghambat Pengembangan Usaha Responden
 (Dalam persentase; N = 200)

Jenis Kendala	Keterangan				
	Sangat menghambat	Menghambat	Cukup menghambat	Tidak menghambat	Sangat tidak menghambat
1. Permodalan	49.5%	35.0%	4.0%	11.5%	0
2. Lokasi usaha	34.5%	18.0%	13.5%	33.5%	0.5%
3. Persaingan yang ketat	22.0%	21.5%	28.5%	28.0%	0
4. Jaringan pemasaran					
5. Keterampilan yang dikuasai	31.0%	21.5%	22.0%	25.5%	0
6. Koneksi	38.5%	33.0%	11.0%	17.5%	0
	30.0%	28.5%	14.0%	23.5%	4.0%

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di lokasi migas ditemukan bahwa dari sebanyak 200 perempuan miskin yang diwawancarai, sebagian besar menyatakan kendala yang menghambat pengembangan usaha yang mereka tekuni, terutama adalah soal permodalan dan keterbatasan ketrampilan yang dikuasai (dikemukakan oleh lebih dari 70% dari jumlah seluruh responden). Sebanyak 35% responden menyatakan soal permodalan merupakan faktor yang menghambat dan bahkan 49,5% responden menyatakan bahwa faktor permodalan merupakan aspek usaha yang sangat menghambat pengembangan usaha mereka. Seperti sudah disinggung di muka, bahwa ketika harga atau biaya produksi naik, sementara keuntungan yang diperoleh makin kecil, maka sedikit demi sedikit modal yang dimiliki terpaksa terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak lagi banyak dana yang dimiliki untuk membeli barang-barang dagangan baru atau bahan-bahan produksi.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan sebanyak 33% responden menyatakan tidak dikuasainya ketrampilan yang cukup adalah faktor yang menghambat mengembangkan usaha mereka, dan sebanyak 38,5% menyatakan sangat menghambat. Di tengah kejenuhan pasar, disadari responden salah satu kiat yang dapat membuat usaha mereka tetap *survive* adalah kreativitas untuk mengembangkan diversifikasi produk. Tetapi, secara terus-terang perempuan miskin yang tinggal di sekitar lokasi migas mengakui bahwa peluang ke arah itu sulit dilakukan karena mereka mengaku tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Sementara itu berkaitan dengan lokasi usaha, jaringan pemasaran dan iklim persaingan yang makin ketat, penelitian ini menemukan cukup banyak responden yang mengeluhkan dan menilainya sebagai kendala yang serius. Sekitar 34,5% lebih responden menyatakan lokasi usaha yang kurang bisa dijangkau pelanggan dirasakan sangat menghambat pengembangan usaha yang mereka tekuni. Sedangkan tidak dimilikinya akses terhadap pasar yang memadai dan jumlah pesaing yang makin banyak secara akumulatif menyebabkan peluang responden untuk mengembangkan usaha juga menjadi sangat terbatas. Kalau berbicara soal keinginan, sebetulnya hampir semua responden berangan-angan untuk dapat mengembangkan usaha yang ditekuni hingga makin besar dan menguntungkan. Tetapi, sekali lagi karena ada banyak kendala yang menghambat, baik faktor internal maupun eksternal, maka yang bisa dilakukan responden saat ini hanyalah berharap agar daya beli masyarakat kembali pulih, dan usaha yang mereka tekuni kembali berkembang.

Berdasarkan data tersebut terlihat cukup banyaknya faktor yang menghambat para perempuan miskin yang tinggal di sekitar lokasi migas untuk mengembangkan aktivitas usaha mereka. Sebagaimana banyak dipahami bahwa kondisi kaum miskin memang serba tidak menguntungkan. Selain terbatas dalam soal finansial tidak jarang kelompok perempuan miskin juga memiliki sejumlah keterbatasan antara lain: soal koneksi, ketrampilan atau keahlian, akses terhadap informasi dan sebagainya. Sejumlah keterbatasan ini yang selanjutnya menyebabkan perempuan miskin merasakan sulitnya melakukan pengembangan usaha yang mereka tekuni saat ini. Oleh sebab itu tidak sedikit perempuan miskin yang berharap adanya sentuhan dan kebijakan yang datang dari luar

dirinya dalam berbagai bentuk konkrit baik dalam bentuk program pelatihan, pemberian bantuan modal usaha dengan bunga yang lunak, pelatihan untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat, pelatihan manajemen dan sebagainya. Artinya ikhtiar yang dilakukan secara internal mungkin lebih banyak dalam bentuk semangat, kemauan keras dan kesediaan mereka untuk menciptakan kemandirian dan mengembangkan usaha ekonom produktif mereka. Tetapi ternyata ada hal lain yang lebih bersifat eksternal dalam upaya pengembangan usaha yang harus dilakukan. Secara konkrit upaya dimaksud adalah berbagai jenis kebijakan, program intervensi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh stakeholders dan elemen masyarakat yang ada guna peningkatan kesejahteraan social ekonomi mereka.

4.3. Jenis Bantuan yang Dibutuhkan

Dewasa ini strategi pengentasan kemiskinan yang meyakini bahwa peluang sukses untuk mengentaskan orang miskin dari keterpurukannya adalah dengan memberikan peluang yang lebih besar terhadap masyarakat miskin untuk mengurus dirinya sendiri, turut andil dalam pengambilan keputusan serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi dan kesejahteraan -- telah banyak dipilih sebagai dasar menyusun dan mengimplementasikan program. Peranan pihak luar atau stakeholders sejauh mungkin dibatasi pada upaya merealisasikan kehendak masyarakat, menyediakan dana, sarana dan prasarana serta berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi program pengentasan kemiskinan. Beberapa pemikir masalah pembangunan masyarakat berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengurus dirinya sendiri akan menjadi penopang dan pendorong bagi keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Sebab keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan dan nasib serta masa depan mereka akan menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan rasa percaya diri akan kemampuan yang ada dan melekat pada diri mereka. Setidaknya situasi ini diyakini oleh *Feigenbaum (1991)* yang mengembangkan konsep peningkatan produktivitas dan *Rohbin (1993)* yang telah membuktikannya melalui pengembangan konsep manajemen partisipatifnya.

Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin sesungguhnya memerlukan peran tidak hanya masyarakat miskin itu sendiri melainkan juga pihak lain yakni stakeholders yang ada di tengah masyarakat, termasuk pihak pemerintah. Peran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat miskin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya dari hasil penelitian ini memperlihatkan masih banyaknya perempuan miskin yang tinggal di sekitar eksplorasi migas mengharapkan adanya uluran tangan dari pihak pemerintah. Dari 200 responden yang diwawancarai ternyata sebanyak 49,5% responden menyatakan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan sebanyak 25,5% menyatakan membutuhkan bantuan untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka. Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden ternyata membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah dalam berbagai bentuk. Salah satu jenis bantuan yang diharapkan adalah kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Sebagaimana banyak dialami responden bahwa selama ini aktivitas usaha ekonomi produktif yang mereka jalankan kebanyakan diperoleh dari lembaga kredit informal. Apabila bantuan modal dari pemerintah diluncurkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dan paket kredit yang meringankan maka mereka dengan senang hati akan menerimanya.

Kendati banyak responden merasa bahwa prospek usaha yang ditekuni cenderung biasa saja bahkan ada yang menyatakan suram, namun ke depan mereka merasa masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan asalkan ada dukungan dan bantuan dari pemerintah. Dari 200 responden yang diteliti, sebanyak 49,5% responden menyatakan sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk membantu membuka atau mengembangkan usaha yang kini tengah mereka tekuni, dan bahkan sebanyak 25,5% menyatakan membutuhkan. Hanya 12,5% yang mengaku kurang begitu membutuhkan bantuan pemerintah, dan 1% menyatakan sangat tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Dalam situasi yang serba sulit dan posisi ekonomi dan kesempatan yang terbatas kerap masyarakat miskin memerlukan bantuan terutama yang berorientasi pada upaya pengembangan usaha yakni penambahan modal usaha ekonomi produktif. Maksudnya keluarga miskin diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber ekonomi produktif

melalui paket bantuan modal usaha yang berasal dari pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini terlihat dari sekitar 200 responden ternyata seluruh responden berminat terhadap bantuan pemerintah dan mereka tengah menanti kapan bantuan tersebut dapat dinikmati. Dari sebanyak 200 responden sebanyak 83,6% responden menyatakan sangat berminat terhadap bantuan pemerintah dan sebanyak 16,4% menyatakan berminat. Responden beranggapan bahwa dengan memperoleh bantuan dari pemerintah akan dapat membantu mengembangkan usaha yang mereka tekuni saat ini dan untuk jangka panjang akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka.

Fakta empiris sebagaimana terurai diatas mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak responden yang memang sangat memerlukan suntikan dana untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif mereka. Dengan kata lain untuk saat ini kondisinya mungkin cukup memprihatinkan terutama ketika mereka hendak mengembangkan aktivitas usahanya. Oleh sebab itu cukup banyak diantara responden yang mengharapkan adanya bantuan modal usaha.

Tabel 24
 Jenis Bantuan Yang Dibutuhkan Untuk Membuka dan Mengembangkan Usaha
 (Dalam % dan N = 200)

Jenis Kebutuhan	%					Σ
	1	2	3	4	5	
Bantuan Permodalan	58,5	34,5	3,5	3,5	0	100
Bantuan Teknologi/Peralatan	45,0	25,5	9,0	20,5	0	100
Bantuan Bahan Baku	39,5	22,0	13,0	25,5	0	100
Bantuan Pelatihan Manajemen	33,0	17,5	18,0	30,0	1,5	100
Bantuan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk	33,5	25,0	11,0	30,0	0,5	100
Bantuan Pemasaran	43,0	23,0	11,0	23,0	0	100

Keterangan:

1. Sangat Membutuhkan
2. Membutuhkan
3. Cukup Membutuhkan
4. Tidak Membutuhkan
5. Sangat Tidak Membutuhkan

Secara teoritis, untuk meningkatkan kegiatan usaha kearah yang lebih maju/sukses dibutuhkan mekanisme pengembangan secara sistematis baik berkaitan dengan modal usaha, sumber daya manusia, alat ataupun instrumen sebagai faktor pendukung

untuk membuka dan atau mengembangkan usaha ekonomi produktif. Menurut perempuan miskin yang ditemui dalam penelitian ini untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas usaha sangat dibutuhkan faktor-faktor pendukung seperti;(a). faktor ketersediaan aspek permodalan; (b). bantuan teknologi atau peralatan; (c). bantuan bahan baku; (d). pelatihan manajemen; (e). Pelatihan peningkatan kualitas produk; dan (f). Bantuan pemasaran. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dari 200 responden ternyata sebanyak 93% responden menyatakan membutuhkan bahkan sangat memerlukan bantuan dalam bentuk penyediaan atau akses terhadap permodalan untuk membuka atau mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Selain faktor permodalan, perempuan miskin yang tinggal di sekitar eksplorasi migas umumnya juga mengharapkan adanya bantuan dalam bentuk teknologi/peralatan dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses produksi suatu usaha. Tidak sedikit responden berpendapat agar produksi menjadi lebih cepat dan berkualitas maka sangat dibutuhkan teknologi/peralatan pendukung. Kendati demikian tidak jarang pula responden yang menyatakan tidak terlampau membutuhkan hadirnya teknologi/peralatan untuk kemajuan usaha sebab mereka menekuni sektor usaha kecil-kecilan dan bersifat sederhana seperti warung atau makanan dan minuman dan tidak memerlukan teknologi/peralatan spesifik.

Dalam hal bahan baku, lebih dari 50% % responden menyatakan membutuhkan bahan baku untuk membuka/mengembangkan usaha. Sementara itu sekitar 30% responden menyatakan tidak membutuhkan bahan baku. Responden beranggapan bahwa bantuan yang berbentuk bahan baku akan lebih sulit dikelola dibandingkan dengan bantuan berupa modal usaha. Selain jenis usaha yang ditekuni merupakan usaha memasarkan barang yang sudah jadi dan siap jual maka tidak diperlukan bahan baku. Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan cukup banyaknya responden yang membutuhkan pelatihan baik untuk kepentingan peningkatan kualitas produk maupun pelatihan manajemen. Sementara itu dalam penelitian ini juga ditemukan sebagian besar responden (66%) yang membutuhkan bantuan untuk memasarkan produk untuk memajukan usaha ekonomi produktif yang mereka tekuni. Melalui bantuan dalam bentuk peluang pasar

pasar mereka berharap bisa menjual hasil produksi dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan keuntungan yang optimal.

Kendati persoalan permodalan kerap kali menjadi permasalahan cukup berarti namun ketika ditanyakan upaya apakah yang akan dilakukan untuk kelangsungan usaha pasca pembangunan industri migas ternyata sebagian besar responden lebih memilih untuk menekuni usaha lama. Dari hasil penelitian yang dilakukan sebenarnya ada beberapa strategi yang akan dilakukan agar aktivitas usaha tetap dapat berlangsung responden kerap menerapkan sejumlah strategi. Strategi yang dikembangkan responden dalam meniyasati situasi krisis dan kesulitan untuk mempertahankan kegiatan usahanya antara lain; (a). melakukan peningkatan produksi dari usaha lama, misalnya dengan pemanfaatan hasil produksi secara maksimal; (b). Melakukan efisiensi dalam aktivitas produksi dan (c). melakukan diversifikasi usaha dan (d). memberikan nilai tambah terhadap barang yang dihasilkan. Selain menekuni usaha lama

Tabel 25
Usaha Yang Mungkin Dikembangkan Untuk Kelangsungan Usaha Pasca
Pembangunan Industri Migas (Dalam persen ; N = 200)

Usaha yang dilakukan	Persentase (%)
Meningkatkan produksi dari usaha lama	44,0
Melakukan efisiensi/misalnya memperpendek waktu kerja	3,0
Memberi nilai tambah terhadap barang yang dihasilkan	24,0
Melakukan diversifikasi usaha (membuka usaha baru)	29,0
Total	100

Berdasarkan data di atas ada terlihat bahwa untuk mempertahankan kelangsungan usahanya cukup banyak responden yang melakukan peningkatan produksi dari usaha lama (44%); diversifikasi usaha (29%) dan memberikan nilai tambah terhadap barang yang diproduksi. Sementara itu hanya sebagian kecil responden (3%) yang melakukan efisiensi misalnya dengan memperpendek waktu kerja. Diversifikasi usaha yang dilakukan dengan berusaha membuka/ menciptakan usaha baru disamping usahanya yang lama nampaknya juga cukup banyak dilakukan oleh responden. Namun demikian kerap kali responden menyadari adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan diversifikasi usaha antara lain; (a) masalah modal usaha; (b) keterbatasan keahlian atau

ketrampilan; (c). keterbatasan koneksi; (d). keterbatasan teknologi dan sebagainya. Akibat adanya berbagai keterbatasan tersebut menjadikan hingga saat ini para perempuan dari keluarga miskin yang ada di sekitar wilayah eksplorasi migas masih belum dapat melakukan diversifikasi usaha sesuai yang diharapkan.

5. Mekanisme *Survival*

Sebagaimana banyak dihadapi oleh keluarga-keluarga dalam komunitas lain, perempuan yang tinggal di sekitar industri migas ternyata juga menghadapi sejumlah persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Persoalan hidup sehari-hari yang dihadapi oleh para perempuan atau isteri yang tinggal di komunitas industri migas ternyata tidak hanya menyangkut persoalan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi problematika aktivitas ekonomi produktif yang kerap mengalami masa pasang surut juga seringkali dihadapi. Seorang responden yang ditemui dalam penelitian ini menyampaikan pengalamannya secara rinci. Responden menceritakan kerapnya menghadapi persoalan hidup sehingga sering meminta bantuan kepada tetangga. Menurut responden ini tetangga adalah kerabat terdekat yang secara cepat dapat diandalkan untuk membantunya. Ketika ada kesulitan ada urusan terutama yang menyangkut urusan domestik, ia kerap kali meminta pertolongan pada para tetangga. Dalam komunitas yang ada di sekitar industri migas, sesama tetangga dikenal memiliki solidaritas dan sikap saling menolong sehingga mereka berkesempatan untuk dapat membantu.

Usaha yang dihadapi oleh perempuan yang tinggal di sekitar industri migas, terkadang juga mengalami pasang surut, karena hasil penjualan tidaklah seberapa. Salah seorang responden yang ditemui dalam penelitian ini mengaku pekerjaannya sebagai pedagang ikan, sering mengeluh sulitnya mendapatkan hasil usaha yang maksimal. Ketika menghadapi kesulitan responden ini juga kerap kali mengembangkan upaya lain untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi seperti berhutang kepada rentenir dengan resiko dikenakan bunga. Langkah ini dipilih dan ditempuh ketika tetangganya sudah tidak bersedia lagi memberi pinjaman. Ikhtiar yang dilakukannya selama ini menurut pengakuannya sebenarnya cukup bervariasi. Untuk memperoleh tambahan penghasilan responden menambah jam untuk berdagang, melakukan berbagai penghematan dan

mengencangkan ikat pinggang. Penghematan terutama dilakukan dalam hal konsumsi yaitu dengan cara memilih jenis makanan yang sesuai keuangan keluarga yang terbatas. Selama ini menurut pengakuan salah seorang responden yaitu mereka hanya makan dua kali sehari. Kalau keadaan sudah sangat terjepit, bahkan mereka secara terpaksa memenuhi kebutuhan makanan sekali sehari. Kendati banyak variasi strategi untuk mengatasi kesulitan hidup responden mengaku tidak pernah menggadaikan atau menjual barang-barang yang dimilikinya. Karena kondisinya terbatas baik kondisi finansial maupun barang-barang yang dimilikinya maka untuk memenuhi kebutuhan hidup cara menjual barang juga tidak dilakukan. Sebelumnya cara itu memang pernah dilakukan, tetapi karena sudah tidak ada lagi barang yang bisa dijual maka responden kemudian lebih banyak berhutang dan mengandalkan penghasilan dari kegiatan usaha ekonomi produktif yang ditekuninya.

Menurut pengakuan salah seorang responden yang ditemui pasca pembangunan industri migas, ternyata tak banyak hal yang dilakukan oleh responden. Upaya untuk menambah keterampilan juga belum dilakukan, apalagi membuka usaha baru ataupun menambah omzet usahanya. Faktor keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha yang ditekuni selama ini. Kendati pembangunan migas terjadi di komunitas mereka tetapi menurut pengakuan responden kondisi ekonomi keluarga diakui masih belum mengalami perubahan berarti. Kondisinya masih sama saja seperti sebelum adanya pembangunan industri migas, demikian diungkapkan oleh responden ini. Bahkan kondisi yang ada selama ini dinilai cukup memprihatinkan. Biaya produksi meningkat, pemasaran usaha tidak berubah dan bersifat tetap, jumlah pedagang ikan pun mulai mengalami peningkatan. Sehingga yang dirasakan selama ini keuntungan yang diperoleh hanya pas-pasan bahkan cenderung menurun. Kondisi seperti ini ternyata tidak hanya menyebabkan responden tidak dapat menabung karena keuntungan terbatas tetapi juga kesempatan untuk mengumpulkan modal usaha juga mengalami kendala.

Uraian diatas sebenarnya merupakan ungkapan dari salah seorang perempuan yang tinggal di komunitas sekitar pembangunan industri migas. Artinya nasib atau kondisi perempuan yang telah berkeluarga di komunitas tersebut bisa jadi sama atau bahkan lebih memprihatinkan. Dalam penelitian oleh karenanya dicoba untuk

dideskripsikan secara persentatif berkaitan dengan variasi kondisi yang dialami oleh perempuan yang tinggal di sekitar industri migas. Bagaimanapun jika kondisinya cukup memprihatinkan maka upaya pemberdayaan dan menciptakan kemandirian serta melibatkan perempuan dalam sektor publik senantiasa perlu dipacu. Oleh sebab itu situasi problematik dan kondisi pemenuhan kebutuhan hidup serta kendala yang dihadapi oleh para perempuan dalam mengekspresikan diri dalam dunia kerja patut dikemukakan dalam penelitian ini.

Secara teoritis dan fakta lapangan kerap kali membuktikan bahwa tekanan kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas terjadi secara terus menerus ternyata tidak sedikit keluarga tersebut tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup bahkan keluar dari situasi krisis yang membelenggunya dengan selamat. Dalam hal ini, keluarga dengan kondisi ternatas banyak yang mengembangkan ragam strategi atau mekanisme untuk kelangsungan hidup/ survival mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang berada dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas umumnya akan memperkecil atau memperluas lingkaran anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial-ekonomi yang berubah. Kegiatan usaha ditujukan untuk menjamin keperluan hidup keluarga melalui produksi subsisten dan sekarang ini makin banyak juga melalui produksi tambahan untuk pasar, seperti melalui pembentukan modal di dalam usaha untuk memperluas dasar eksistensinya (Blanckunberg dan Sach, 1982).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setidaknya menunjukkan bahwa ketika para perempuan yang tinggal di komunitas sekitar pembangunan industri migas menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan urusan publik khususnya menyangkut aktivitas usaha ekonomi yang ditukuni mereka kemudian mengembangkan strategi sosial yang cukup taktis. Mengembangkan jaringan sosial baik yang bersigat individual maupun berhubungan dengan institusi/ kelembagaan untuk meminta bantuan ternyata banyak dilakukan responden. Ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan publik para perempuan tidak hanya meminta bantuan pada anggota keluarga seperti anak, dan orang tua tetapi juga melibatkan kerabat, tetangga serta teman. Selain itu mereka juga

mengembangkan jaringan dengan menghubungi lembaga keuangan seperti; bank, rentenir serta tengkulak.

Kendati cukup banyak pihak yang dimintai bantuan oleh responden ketika mereka menghadapi masalah publik terutama berkait dengan pekerjaan dan aktivitas usaha mereka tetapi dari data yang ada terlihat kecenderungan bahwa mereka ternyata lebih sering memanfaatkan bantuan dari teman, tetangga dan kerabat. Sebanyak 30,7% responden menyebutkan mereka seringkali bahkan selalu meminta bantuan kerabat dan sebanyak 61,3% responden menyatakan sering dan selalu meminta bantuan tetangga ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan publik. Sementara itu responden yang meminta bantuan pada teman sekegiatan sosial dengan intensitas sering dan selalu juga menunjukkan jumlah cukup banyak yakni sekitar 29,4%.

Tabel 26
Pihak yang Dimintai Bantuan Ketika Responden Menghadapi Masalah yang Berkaitan Dengan Urusan Publik
(Dinyatakan dalam persen dengan N = 200)

	Keterangan			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak pernah
1. Orang tua	4.0%	12.0%	10.7%	73.3%
2. Anak	2.7%	16.0%	16.0%	65.3%
3. Kerabat	4.0%	26.7%	42.7%	26.7%
4. Tetangga	5.3%	56.0%	18.7%	20.0%
5. Teman dikegiatan social (misal: pengajian)	2.7%	26.7%	33.3%	37.3%
6. Rentenir/tengkulak	1.3%	2.7%	8.0%	88.0%
7. Bank/BPR	1.3%	4.0%	9.3%	85.3%

Banyaknya responden yang meminta bantuan pada kerabat, teman dan tetangga dibandingkan dengan lembaga formal maupun informal yang lain sebenarnya didasari atas beberapa alasan antara lain; (a). karena meminjam tetangga akan lebih mudah terutama dari aspek prosedur meminta bantuan; (b). tidak sedikit antar mereka yang sudah saling mengenal secara baik sehingga ketika meminta bantuan dengan segera mereka akan membantunya; (c). Umumnya mereka yang meminta bantuan tetangga, kerabat atau kerabat juga tidak disertai bunga. Artinya mereka benar-benar ingin membantu karena teman dekat, tetangga atau kerabatnya; (d). Jika ada keterlambatan waktu pengembalian cenderung ada toleransi; (e). sanksi yang diberikan ketika ada masalah juga relatif lebih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dibandingkan jika

meminjam pada lembaga formal seperti bank atau rentenir; (f). Khususnya rentenir tidak sedikit responden yang menghindarinya karena biasanya bunga yang ditentukan relatif tinggi sehingga dinilai memberatkan mereka.

Selanjutnya berdasarkan data yang ada juga memperlihatkan bahwa ketika para perempuan yang tinggal di komunitas sekitar pembangunan industri migas menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan urusan domestik seperti; pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan makanan, sandang dan perumahan, pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya ternyata strategi sosial yang dikembangkan lebih ke arah optimalisasi peran keluarga inti. Artinya ketika para perempuan yang diwawancarai menghadapi masalah menyangkut urusan domestik mereka lebih banyak mengembangkan jaringan sosial seperti; melibatkan anak dan orang tua serta kerabat dengan intensitas yang berbeda-beda. Dari data yang ada jumlah responden yang mengemukakan bahwa ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan domestik mereka meminta bantuan orang tua terdapat sebanyak 20% lebih dengan intensitas sering dan selalu. Sementara itu sebanyak 13,3% menyatakan jarang. Sedangkan jumlah responden yang sering dan selalu meminta bantuan anak ternyata relatif banyak yakni sebesar 48%. Selain itu responden yang sering dan selalu meminta bantuan tetangga juga menunjukkan jumlah relatif besar yakni sebanyak 41,4%.

Tabel 27
Pihak yang Dimintai Bantuan Ketika Responden Menghadapi Masalah yang Berkaitan Dengan Urusan Domestik
 (Dinyatakan dalam persen dengan N = 200)

	Keterangan			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak pernah
1. Orang tua	5.3%	14.7%	13.3%	66.7%
2. Anak	8.0%	40.0%	10.7%	41.3%
3. Kerabat	0%	16.0%	50.7%	33.3%
4. Tetangga	18.7%	22.7%	16.0%	42.7%
5. Teman di kegiatan sosial (misal: pengajian)	1.3%	4.0%	18.7%	76.0%

Berdasarkan data yang ada juga terlihat masih relatif sedikitnya responden yang menyatakan ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan domestik para

perempuan melibatkan teman di kegiatan sosial yang sama seperti pengajian untuk mengatasinya. Dari data yang ada hanya sekitar 5,3% responden yang menyebutkan bahwa ketika menghadapi masalah berkaitan dengan urusan domestik mereka meminta bantuan teman di kegiatan sosial yang sama.

Kendati pihak yang dimintai bantuan oleh responden ketika mereka menghadapi masalah domestik cukup bervariasi tetapi secara umum data yang ada menunjukkan adanya kecenderungan bahwa responden lebih sering memanfaatkan bantuan dari keluarga ini dan kerabat dekat serta tetangga dibandingkan dengan pihak lain. Hal ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar mengingat permasalahan yang dihadapi lebih banyak menyangkut persoalan domestik kerumah tanggaaan yang termasuk dalam ranah pribadi keluarga. Sehingga pihak yang dimintai bantuanpun juga lebih banyak dari kalangan keluarga atau kerabat. Jika da tetangga yang kereapkali dimintai bantuan itupun juga pihak yang dinilai sudah dekat dan telah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Tidak sedikit responden yang berpendapat bahwa kerap kali tetangga atau teman dekat dirasakan lebih dekat ketimbang saudara apalagi ketika saudara bertempat tinggal di luar daerah. Artinya ketika terjadi permasalahan yang secara tiba-tiba harus dihadapi maka tetangga kandang justru menjadi pihak pertama yang membantu karena lokasi tempat tinggal sangat berdekatan. Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan sosial ketetanggaan yang ada ternyata lebih mengedepan. Dalam praktek keseharian memang tidak dapat dipungkiri peran anak, orang tua dan tetangga terlihat sangat dominan ketika responden menghadapi masa sulit berkaitan dengan urusan sektor domestik..

Dari penelitian yang dilakukan juga ditemukan cukup banyaknya responden yang masih memiliki hutang selama ini. Bahkan dari 200 responden sekitar 40% menyatakan saat ini mereka mrasakan beratnya memiliki pinjaman. Beberapa responden mengakui secara terbuka, bahwa di daerah pedesaan "sistem bon" yakni mengambil barang dahulu dan membayar belakangan jika ada uang adalah hal yang sangat lazim mereka lakukan. Seorang keluarga buruh tani, misalnya, mereka umumnya telah terbiasa pada hari-hari tertentu berhutang dulu ke warung-warung kecil tetangganya atau mengambil barang-barang kebutuhan dapur di toko yang ada di daerahnya, untuk kemudian mereka bayar pada saat menerima upah atau memperoleh penghasilan dari hasil usahanya. Bagi

keluarga nelayan miskin, bon di warung atau toko kecil tetangganya adalah hal yang biasa terjadi dan dilakukan untuk menyalasi kebutuhan hidup yang terus merambat naik.

Dalam kondisi seperti ini bagi keluarga miskin yang masih memiliki kohesi sosial yang kuat dengan kelompok dan kerabatnya, salah satu yang membuat mereka hingga kini mampu tetap *survive* adalah dukungan keluarga, kerabat dan tetangga atau jaringan sosial yang ada di sekitarnya. Kendati tidak dijelaskan bantuan apa yang dapat diperoleh perempuan dan keluarga dari keluarga dan tetangga serta kerabatnya, tetapi menurut penuturan responden keberadaan anggota keluarga terutama anak dan tetangga serta kerabat bagaimana pun adalah semacam asuransi sosial yang sifatnya sangat fungsional untuk tempat melakukan *sambatan*. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang kebanyakan bertipe keluarga batih (*nuclear family*), di daerah pedesaan keluarga-keluarga yang tinggal umumnya lebih berpola somah (*extended family*), di mana hubungan personal antar anggota kerabat masih sangat erat satu dengan yang lainnya. Responden yang mengaku seringkali meminta bantuan keluarga inti, tetangga dan kerabat jika sedang bermasalah ini, terutama ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan domestik kerumahtanggaan.

Bagi perempuan yang tinggal di komunitas sekitar industrimigas, lingkungan sosial di sekitar mereka yang ramah dan bentuk hubungan yang masih dominan bersifat personal, dalam banyak hal harus diakui memiliki fungsi yang positif. Berbeda, misalnya dengan pola hubungan masyarakat kota yang cenderung bersifat kontraktual dan impersonal, di daerah pedesaan antara keluarga satu dengan yang lain umumnya saling kenal dengan baik, dan ada semacam rasa kebersamaan dan kohesi sosial yang masih kuat, sehingga meski pun tekanan situasi krisis menghantam bertubi-tubi, namun dengan penghematan, kreativitas dan dukungan pranata-pranata sosial di sekitarnya, mereka relatif masih mampu bertahan hidup.

Per teori dan dalam praktek, dukungan kerabat dan mekanisme pengetatan konsumsi dalam banyak kasus memang terbukti fungsional sebagai salah satu cara menyalasi krisis. Tetapi, yang namanya daya tahan dan kemampuan keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas menghadapi situasi krisis bagaimana pun tetap akan ada batasnya, sehingga tanpa ada program-program intervensi yang benar-benar efektif,

seperti pemberdayaan perempuan dan diversifikasi usaha niscaya keluarga-keluarga yang ada di sekitar industri migas akan makin kurang beruntung. Artinya, sekali pun keluarga miskin memiliki daya tahan dan mekanisme *survival* tersendiri untuk menyalasi tekanan akibat keterbatasan ekonomi, tetapi berharap keluarga keluarga mereka dapat terus-menerus bertahan hidup di tengah keterbatasan yang ada dan kebutuhan hidup yang terus melambung tentu pada suatu saat akan ada titik balik dan batas toleransi yang tidak lagi bisa dilewati.

Dari hasil kajiannya terhadap keluarga miskin di Filipina, George Carner (1982) berhasil mengidentifikasi pola dan mekanisme *survival* yang biasa dikembangkan keluarga miskin untuk bertahan hidup. Pada tahap awal, sasaran yang dituju oleh rumah tangga berpendapatan sangat rendah adalah menghasilkan atau memperoleh makan cukup. Di berbagai wilayah pedesaan, sudah bukan rahasia lagi bahwa akses pada lahan untuk produksi yang subsisten sedikit-banyak akan melindungi rumah tangga dari biaya pangan yang meningkat, dengan menyediakan suatu bentuk jaminan pangan yang penting.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, pada akhirnya memang tidak banyak pilihan yang tersedia bagi perempuan yang tinggal di sekitar industri migas terutama yang berada pada kondisi terbatas untuk menyalasi dan keluar dari keterbatasan yang mereka alami. Bagi keluarga yang secara social ekonomi terbatas, mencari sumber-sumber penghasilan alternatif, bagaimana pun bukanlah hal yang mudah, sehingga ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan hidup yang tidak lagi bisa ditunda, maka yang seringkali dilakukan pada akhirnya adalah dengan menggadaikan barang, menjual, berhutang dan sebagainya. Dari 200 responden yang diwawancarai, sebagian besar menyatakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seringkali terpaksa harus utang dengan bunga (41,3%), utang tanpa bunga (48%), mengembangkan perilaku subsistensi (73,3%) dan melakukan upaya penghematan (98,7%).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap 200 perempuan yang tinggal di sekitar industri migas, ditemukan bahwa perilaku subsistensi umumnya dengan mudah dikembangkan oleh keluarga yang ada di komunitas tersebut. Kondisi ini nampaknya tidak terlalu berbeda dengan kondisi masyarakat desa di Philipina di mana masyarakatnya

masih banyak yang melakukan upaya subsistensi ketika sumber daya alam yang tersedia masih memungkinkan untuk melakukannya. Diakui memang masih ada responden yang menyatakan sulitnya mengembangkan perilaku subsistensi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Seorang nelayan miskin, misalnya, untuk lauk-pauk mungkin benar mereka dapat memenuhinya dari sisa hasil melaut atau sengaja menyisihkannya untuk makan sehari-hari. Tetapi, untuk membeli beras dan bumbu masak yang lain tentu mereka tetap membutuhkan uang kontan.

Tabel 28
Strategi yang Dikembangkan Ketika Menghadapi Tekanan Kebutuhan Hidup
(Dinyatakan dalam persen dengan N = 200)

Kiat yang dikembangkan	Keterangan			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak pernah
1. Menggadaikan barang	1.3%	4.0%	6.7%	88.0%
2. Menjual barang	1.3%	17.3%	12.0%	69.3%
3. Utang dengan bunga	4.0%	37.3%	24.0%	34.7%
4. Utang tanpa bunga	26.7%	21.3%	22.7%	29.3%
5. Subsistensi	28.0%	45.3%	2.7%	24.0%
6. Penghematan	34.7%	64.0%	0%	1.3%
7. Penambahan jam kerja	20.0%	13.3%	4.0%	62.7%
8. Diversifikasi usaha	5.3%	10.7%	5.3%	78.7%

Dari hasil penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah di propinsi Jawa Timur ini juga menemukan bahwa kiat pertama dan yang paling mudah dan banyak dilakukan oleh responden untuk meniasati kenaikan kebutuhan hidup adalah dengan melakukan pengtetatan konsumsi. Sebanyak 73,3% responden menyatakan cara ini relatif mudah dilakukan. Bentuk dari pengtetatan konsumsi di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyederhanaan kegiatan konsumsi sehari-hari atau dalam bentuk mengurangi frekuensi makan, khususnya bagi orang tua yang sudah terbiasa menahan lapar. Sudah menjadi cara paling umum, apabila kondisi keuangan memang tidak memungkinkan, maka cara yang paling mudah dilakukan keluarga-keluarga miskin adalah makan seadanya. Selain mengurangi frekuensi makan kiat lain yang banyak dikembangkan dalam rangka penghematan adalah dengan terpaksa menurunkan kualitas menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Dari hasil wawancara terhadap 200 perempuan yang tinggal di sekitar industri migas, pola pengetatan konsumsi lain yang lazim dilakukan adalah selain mengurangi kualitas menu makanan adalah mengurangi uang jajan keluarga. Tidak sedikit responden yang mengaku seringkali terpaksa mengurangi kualitas menu makanan yang dikonsumsi ketika harga barang kebutuhan pokok terus merambat naik. Sementara itu, tidak sedikit responden menyatakan cara lain yang biasanya dikembangkan dalam rangka pengetatan pola konsumsi adalah dengan mengurangi uang jajan anak serta mengurangi uang jajan ayah atau ibu.

Kegiatan penelitian ini selanjutnya juga menemukan banyaknya responden yang mengandalkan langkah subsistensi dengan memanfaatkan hasil di sector pertanian untuk dapat bertahan hidup. Artinya meski tekanan ekonomi yang dihadapi relative kuat, mereka umumnya masih cukup kenyal karena dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dari sebagian produk-produk pertanian yang dihasilkan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat yang mendukung, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat dipetik dari pekarangan sendiri. Tetapi, lain soal jika di daerah responden ternyata hasil pertanian pun tidak lagi bisa diandalkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan biaya saprodi yang harganya juga ikut melambung. Seperti sudah disinggung di muka bahwa sebagian besar responden umumnya mengaku kesulitan mengembangkan perilaku subsistensi, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan upaya pengetatan konsumsi agar biaya hidup sehari-hari yang harus dikeluarkan tidak terlalu membebani.

Strategi lain yang banyak dikembangkan responden ketika menghadapi tekanan hidup adalah dengan menambah jam kerja sehari-hari. Sebanyak 33,3% responden menyatakan bahwa selama ini mereka melakukan penambahan jam kerja untuk dapat tetap survive dalam menghadapi tekanan kebutuhan hidup. Satu hal yang menggembirakan meski jumlahnya tidak terlampau banyak, untuk mengatasi tekanan kebutuhan hidup tidak sedikit responden yang mengembangkan usaha sendiri ke lain sektor dengan melakukan diversifikasi usaha. Sebanyak 16% responden mengaku relative mudah melakukan diversifikasi usaha sementara itu masih relatif banyak responden yang

belum melakukan langkah diversifikasi usaha karena keterbatasan yang mereka miliki selama ini.

Selain keterbatasan ketrampilan dan wawasan yang dimiliki, tanpa didukung dengan asset atau modal yang cukup, jelas mustahil bagi responden untuk dapat melakukan perubahan pengembangan mata pencaharian baru yang lebih menguntungkan. Sebagaimana tertera dalam tabel, sebagian besar responden umumnya tidak banyak menguasai ketrampilan alternatif di luar usaha pokok yang mereka tekuni saat ini. Seorang petani yang sudah bertahun-tahun mengandalkan usaha bercocok tanam, mereka umumnya tidak menguasai ketrampilan lain yang dapat diandalkan untuk bertahan hidup jika sektor pertanian sudah tidak lagi dapat diandalkan. Demikian pula seorang nelayan miskin, mereka umumnya tidak memiliki ketrampilan lain untuk dapat dijadikan modal melakukan diversifikasi usaha atau melakukan pergeseran okupasi.

Selanjutnya ketika ditanyakan perihal usaha yang dilakukan dalam rangka menghadapi proses perubahan pasca pembangunan industri migas ternyata mayoritas masih belum menunjukkan kesiapannya. Meski secara teoritik dapat dikemukakan bahwa penduduk setempat idealnya turut berperan dan memperoleh keuntungan atas hadirnya industri migas tetapi kenyataan yang ada memperlihatkan masih banyaknya kaum perempuan di daerah sekitar industri migas yang dapat mengikutinya dengan berbagai alasan. Idelanya memang pembangunan industri migas mampu memberikan "*multiplier effect*" nya terhadap masyarakat sekitar termasuk kelompok perempuan. Tetapi persiapan ke arah itu nampaknya masih perlu dioptimalkan. Terbukti dari penelitian yang dilakukan menunjukkan mayoritas responden masih belum mempersiapkan diri baik dalam hal ketrampilan, pengembangan diversifikasi produk, menambah omzet usaha, mengembangkan lokasi usaha maupun mengembangkan usaha baru. Dari sebanyak 200 responden yang diwawancarai hanya sebanyak 6.7% yang menyebutkan bahwa mereka telah melakukan usaha dengan mengembangkan diversifikasi usaha. Sementara itu sebanyak 8% mengembangkan usaha baru dan sebanyak 2.7% mengembangkan usaha dengan mengembangkan lokasi usaha. Menurut data yang ada juga terlihat bahwa usaha yang dilakukanj selama ini masih terbatas pada penambahan ketrampilan. Meski dengan persentase yang tidak terlampau tinggi (sekitar 17%) usaha lain yakni dengan menambah

omzet usaha lama terlihat juga dilakukan. Kondisi seperti ini tentu masih jauh dari yang diharapkan mengingat pembangunan industri migas yang terjadi di sekitar tempat tinggal responden mestinya turut mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar terutama peningkatan peran perempuan dalam sektor publik. Dalam hal ini kontribusi ekonomi yang diberikan oleh kaum perempuan di lingkungan keluarga dan peran sosial yang lebih besar juga sangat diharapkan perannya. Sayangnya usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam menghadapi proses perubahan pasca pembangunan industri migas selama ini masih sangat terbatas. Oleh karenanya ke depan upaya untuk meningkatkan peran perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat senantiasa perlu dioptimalkan yakni melalui program pemberdayaan perempuan.

Tabel 29
Usaha yang Dilakukan Responden Dalam Rangka Menghadapi Proses Perubahan
Pasca Pembangunan Industri Migas
(Dinyatakan dalam persen dengan N = 200)

Usaha yang dilakukan	Ya	Tidak
1. Menambah keterampilan	32.0%	68.0%
2. Mengembangkan diversifikasi produk	6.7%	93.3%
3. Menambah omzet usaha lama	17.3%	82.7%
4. Mengembangkan lokasi usaha	2.7%	97.3%
5. Mengembangkan usaha baru	8.0%	92.0%

Dari hasil penelitian yang dilakukan juga ditemukan masih cukup banyaknya perempuan yang masih belum melakukan upaya serius dalam rangka menghadapi proses perubahan. Terdapat banyak alasan yang melatar belakangi belum adanya usaha serius tersebut antara lain; terbatasnya pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki; terbatasnya modal usaha, wawasan dan manajemen usaha yang juga masih belum memadai, koneksi dan penguasaan teknologi yang masih kurang dan sebagainya. Kendati relative banyak alasan yang mereka kemukakan tetapi ada satu hal yang menurut responden sangat urgen yakni masih belum diberikannya kesempatan yang luas bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam pembangunan migas. Bahkan seorang

responden mengungkapkan bahwa selama ini kebijakan yang mengarah pada kepentingan kaum perempuan masih belum optimal.

Seorang responden mengakui bahwa selama ini dampak positif pembangunan industri migas cukup signifikan. Perusahaan minyak yang dikelola oleh badan kerjasama operasi (*JOB/Joint Operating Body*) Pertamina-Petrochina East Java telah berdiri sekitar tahun 1998 dan mulai aktif beroperasi pada awal tahun 2000-an hingga sekarang. Banyak perkembangan yang terjadi pasca perusahaan tersebut berdiri. Kondisi desa kian lama menjadi semakin maju dengan dilakukannya berbagai perbaikan fasilitas dan sarana prasarana yang ada seperti pembangunan jalan, pengairan, pelayanan kesehatan, keamanan warga, pendidikan dan sebagainya.

Dalam bidang pembangunan jalan, terlihat pada jalan utama desa yang telah berubah menjadi lebih baik dengan adanya pengaspalan sehingga membuat rasa nyaman penduduk setempat. Pembangunan jalan merupakan bagian dari kerjasama perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah. Menurut pengakuan responden per tahun perusahaan mengucurkan sejumlah dana kepada pemerintah daerah yang kemudian dana tersebut dibagikan pada pihak di tingkat kecamatan, desa, dan RT. Pada akhirnya para ketua RT memanfaatkannya untuk acara warga dan pembangunan. Dana yang diterima RT kurang lebih Rp.10.000.000.

Peran serta pihak industri migas di bidang pendidikan juga terlihat di mana pihak perusahaan minyak Pertamina-Petrochina juga memberikan beasiswa kepada para siswa yang memiliki prestasi yang bagus dalam sekolahnya. Bagi para pengajar, baik guru SD, TK, maupun pengajar ngaji yang tidak terikat dengan institusi pemerintahan juga memperoleh sejumlah bonus tahunan dari perusahaan tersebut sebesar kurang lebih Rp.400.000,-. Pemberian dana tali asih tersebut membuat para pengajar baik perempuan maupun laki-laki memiliki semangat dan motivasi dalam menjalankan semua tugasnya. Sementara itu kerjasama dalam bidang kesehatan juga dilakukan. Perusahaan bersama pemerintah tingkat kecamatan dan desa juga rutin melaksanakan pengecekan kesehatan gratis dan juga pemberian obat-obatan gratis, yang terlaksana dalam waktu satu tahun 3 kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran yang menyerpa warga yang berdekatan dengan perusahaan tersebut.

Meski beberapa fasilitas telah diberikan tetapi bagi seorang responden yang ditemui rasa takut juga kerap kali datang secara tiba-tiba. Ada perasamaan traumatis akan peristiwa bencana yang pernah menimpanya dan juga seluruh warga. Bencana yang terjadi adalah bencana gempa bumi yang cukup kuat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2006. Bencana tersebut juga terkenal dengan bencana ledakan sumur minyak Bojonegoro. Selain itu warga juga dicemaskan oleh sebuah ledakan kembang yang disusul kebakaran dengan bola api sangat besar yang menjulang ke langit, selain itu disertai suara gemuruh yang terdengar hingga radius sekitar tujuh kilometer. Pencemaran udara yang mengandung gas beracun pada waktu itu juga sungguh menyesakkan warga di sekitar perusahaan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, perusahaan memberikan uang santunan kepada warga sebesar kurang lebih hingga Rp.1.500.000,- per jiwa.

Berbagai bantuan dan kerjasama yang telah diterima warga hingga saat ini mungkin belum dirasa cukup, karena hingga saat ini warga masih merasakan ketidaknyamanan serta kekhawatiran akan dampak yang ada, seperti pencemaran udara dan pencemaran suara. Satu hal yang sangat penting menurut seorang responden yang ditemui bahwa selama ini masih belum merasakan adanya kebijakan yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan desa. Dalam aspek penerimaan pekerjaan atau recruitment karyawan, masih belum banyak satupun perempuan asli daerah yang diterima menjadi karyawan perusahaan. Selain itu kurangnya kerjasama dalam hal pemberdayaan usaha keluarga sebagaimana yang selama ini dijalani responden yakni usaha tempé juga masih belum tersentuh. Oleh sebab itu ke depan tidak sedikit responden yang mengharapkan adanya berbagai jenis bantuan yang arahnya pada upaya pemberdayaan kaum perempuan. Setidaknya ada 5 point penting yang perlu memperoleh perhatian pasca pembangunan industri migas untuk ditindaklanjuti sehingga pemberdayaan perempuan dapat terwujud antara lain; (a). Membekali perempuan dengan skill atau ketrampilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka; (b). Memberikan kesempatan bagi upaya pengembangan diversifikasi usaha; (c). Penambahan omzet usaha lama; (d). Pengembangan lokasi usaha di tempat yang baru sebagai bentuk pengembangan dan (e). Mengembangkan usaha baru sebagai alternatif bagi pengembangan usaha yang telah lama ditekuni. Melalui berbagai upaya ini diharapkan

kelak peran perempuan dalam sektor ekonomi produktif mengalami peningkatan signifikan. Kendati peran perempuan dalam sektor ekonomi produktif sangat dibutuhkan tetapi ke depan peran perempuan di sektor yang lain juga harus terus dipacu. Untuk membuktikan apakah upaya pemberdayaan perempuan telah berjalan secara konsekuen atau tidak salah satu indikator yang dapat dilihat adalah sejauh mana kaum perempuan telah turut berperan dan dilibatkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan di sektor industri minyak dan gas.

6. Upaya Pemberdayaan Perempuan

Bagi perempuan miskin yang tinggal di sekitar eksplorasi migas dengan pendidikan relative rendah dan tak berkeahlian, sebetulnya tidak banyak pilihan yang dapat mereka akses untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berbagai usaha yang ditekuni, secara terus-terang diakui sulit diharapkan dapat berkembang lebih jauh, bahkan untuk sekadar sebagai tempat bergantung hidup pun rasa-rasanya makin jauh dari harapan. Kehadiran industri migas yang mungkin sangat menguntungkan bagi daerah setempat karena menyumbang PAD yang luar biasa besar tetapi dalam kenyataan belum tentu mampu membuat kehidupan masyarakat local secara social ekonomi juga mengalami peningkatan.

Seperi diakui sebagian besar responden penelitian ini bahwa pasca pembangunan industri migas prospek usaha yang ditekuni cenderung makin suram, dan bahkan menyatakan tidak terlampau menggembirakan. Tidak sedikit responden yang bersikap pesimis pada prospek perkembangan usahanya, sebab selain jumlah pesaing menjadi makin banyak sehingga pangsa pasar menjadi terbagi-bagi, juga karena biaya produksi yang kian meningkat.

Selanjutnya penelitian ini menemukan sebagian besar responden ketika ditanya minat mereka untuk memperoleh bantuan dari pemerintah, sebanyak 25.5% menyatakan berminat, dan bahkan 49.5% menyatakan sangat berminat. Dari 200 perempuan miskin yang tinggal di daerah industri migas hanya 12.5% yang menyatakan kurang berminat dan 1,0% menyatakan sangat tidak berminat. Responden yang tidak berminat ini, terutama adalah kelompok masyarakat yang memang tidak membutuhkan bantuan modal

dari pihak luar karena sudah memiliki modal sendiri atau kelompok masyarakat yang enggan menempuh resiko memperoleh pinjaman lunak sekali pun karena tidak menginginkan dirinya terperangkap dalam beban utang yang berat. Bagi kelompok terakhir ini, lebih baik tetap menekuni usaha yang sedang ditekuni sebagaimana adanya, walaupun mungkin hasilnya hanya pas-pasan atau bahkan kurang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 30
Keinginan Perempuan Miskin Untuk Mengembangkan Kegiatan Usaha
(Dalam persentase; N = 200)

minat responden terhadap bantuan pemerintah untuk membuka atau mengembangkan usaha yang ditekuni saat ini	Sangat berminat	49.5%
	Berminat	25.5%
	Cukup berminat	11.5%
	Kurang berminat	12.5%
	Sangat tidak berminat	1.0%
Jika responden diberi kesempatan untuk bekerja atau mengembangkan usaha, maka yang dipilih sesuai kemampuan responden	Bekerja di industri migas	3,5%
	Bekerja diluar industri migas, tetapi tetap di daerah setempat	82.5%
	Bekerja diluar industri migas, diluar daerah setempat (pindah kerja)	14.0%

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah di propinsi Jawa Timur ini, diketahui paling-tidak ada dua pola pengembangan usaha yang mungkin dilakukan perempuan miskin pasca pembangunan industri migas. Pertama, adalah dengan pola meningkatkan produksi atau omzet usaha dari usaha lama yang tengah ditekuni dengan harapan secara kuantitatif jumlah keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar. Kedua, dengan cara melakukan upaya deversifikasi usaha dengan tujuan agar sumber-sumber penghasilan yang dimiliki dapat lebih beragam. Bagi responden yang memilih melakukan deversifikasi usaha, karena mereka merasa bahwa jika yang dilakukan adalah membesarkan usaha lama, maka resiko untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain yang lebih besar akan menjadi terbuka. Untuk itu, meski mungkin usaha alternatif yang dikembangkan termasuk kecil-kecilan, tetapi kalau sumber pemasukan yang dimiliki makin beraneka-ragam, maka hasil akhirnya pun *toh* akan membuat mereka menjadi lebih kenyal dalam menyiasati tekanan kebutuhan hidup.

Dengan memperhatikan berbagai data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini selanjutnya dapat dikemukakan bahwa, pendekatan yang memberikan peluang bagi perempuan miskin untuk mengurus dirinya sendiri bukanlah satu-satunya jalan untuk mengentaskan perempuan miskin dari belenggu kemiskinan yang mungkin telah lama melingkupi kehidupan mereka. Artinya, ada upaya lain yang juga harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan stakeholders serta masyarakat secara luas guna mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan taraf hidup mereka. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Djamaludin Ancok (1995) bahwa upaya pemberdayaan dan mengentaskan masyarakat miskin termasuk kaum perempuannya dapat dilakukan melalui berbagai strategi.

Beberapa aktivitas atau strategi dimaksud antara lain; (1) memberikan investasi pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang infrastruktur baik fisik maupun sosial seperti; jalan, sumber air bersih, irigasi, sekolah, klinik kesehatan dan sebagainya; (2) kebijakan pemerintah hendaknya dirumuskan dalam koridor yang menguntungkan atau berpihak pada masyarakat miskin, misalnya; harga produk pertanian dibuat dengan standar yang memadai tanpa merugikan masyarakat petani; adanya insentif bagi petani miskin dan pengusaha *non farm* yang miskin serta kebijakan pembangunan yang menumbuhkan kesempatan kerja; (3) penyediaan teknologi bagi kaum miskin sesuai dengan kemampuan untuk membayar kembali biaya teknologi tersebut, serta (4) ditunjang oleh adanya unsur kelembagaan yang dapat berjalan efektif yakni mampu menumbuhkan sinergisme dalam bekerja. Terdapat beberapa unsur kelembagaan yang dimungkinkan mampu memiliki keterpaduan kerja seperti: jaringan kerja instansi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup seperti: lembaga riset pertanian, lembaga pemberi kredit, lembaga pengembangan pemasaran, lembaga konsultasi usaha kecil, lembaga pengelola irigasi dan sebagainya.

Selain itu jaringan kerja pengusaha pemerintah (BUMN/BUMD), koperasi, pengusaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat mungkin dapat dilibatkan dalam turut membantu pengembangan kemampuan masyarakat seperti: pemasaran produk pertanian maupun non pertanian, khususnya dalam hal pembinaan manajemen usaha.

Lembaga lokal kemasyarakatan seperti paguyuban petani, kelompok pengajian, PKK dan institusi lokal yang lain mungkin dapat dimaksimalkan kerjasamanya dengan instansi lain guna mengembangkan kemampuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Secara lebih sederhana, sukses tidaknya program pengentasan kemiskinan sesungguhnya juga ditentukan oleh sejauh mana pihak pemerintah melibatkan secara aktif berbagai organisasi atau institusi lokal tersebut disamping memaksimalkan sinergisme antar lembaga pemerintah, LSM, serta lembaga swasta yang secara bersama-sama diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program pengentasan kemiskinan termasuk upaya pemberdayaan para perempuan yang berasal dari keluarga miskin yang tinggal di wilayah sekitar eksplorasi migas (*).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Di berbagai daerah, ketika pembangunan dan industrialisasi mulai dikembangkan, biasanya di saat yang sama akan tercipta peluang-peluang dan kesempatan kerja baru yang skalanya cukup massif. Tetapi, di sisi yang lain, alih-alih memberikan manfaat dan dampak yang menguntungkan bagi penduduk lokal, pembangunan dan kegiatan industri, terutama kegiatan eksplorasi migas yang sifatnya padat modal, seringkali justru menyebabkan terjadinya proses marginalisasi masyarakat lokal, karena tidak adanya kesesuaian antara pranata yang dibawa industri itu dengan profil dan kemampuan tenaga kerja lokal, khususnya perempuan miskin.

Studi sebagaimana dilaporkan menemukan bahwa di tengah keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan kungkungan nilai-nilai patriarkhis yang bias gender, kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk terlibat di kegiatan produktif cenderung terbatas, meski dari segi ekonomi peran perempuan dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga terbukti fungsional, dan bahkan sangat strategis. Industrialisasi yang semula diharapkan akan dapat membawa perubahan baru dan melahirkan peluang kerja yang lebih terbuka bagi perempuan, ternyata tidak banyak berpengaruh. Bahkan, ada indikasi, setelah dikembangkan kegiatan industrialisasi migas, justru posisi sebagian perempuan miskin makin tersisih.

Dalam bab-bab terdahulu telah dipaparkan dampak perkembangan industrialisasi migas, potensi yang dimiliki, strategi dan mekanisme *survival* yang dikembangkan perempuan miskin untuk menyiasati tekanan perubahan. Dalam bab penutup ini, selain dikemukakan kembali temuan-temuan pokok dari studi yang telah dilakukan, juga akan dipaparkan kebijakan dan program prioritas yang perlu dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberdayakan perempuan miskin, khususnya di wilayah eksplorasi migas di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo dan juga Gresik.

1. Kesimpulan

Secara garis besar, persoalan yang dihadapi perempuan miskin di wilayah eksplorasi migas senantiasa berkaitan dengan dua hal. Pertama, persoalan spesifik yang dihadapi perempuan berkaitan dengan posisi sosialnya sebagai perempuan di keluarga dan masyarakat yang acapkali masih didominasi nilai-nilai patriarkhis. Kedua, persoalan yang dihadapi perempuan miskin berkaitan dengan statusnya sebagai bagian dari penduduk lokal yang berhadapan dengan struktur dan proses perubahan yang dihelai pembangunan industri migas.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan seperti telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, secara lebih rinci beberapa temuan pokok dari studi ini yang perlu dicermati lebih lanjut adalah:

1. Akibat latar belakang pendidikan dan tidak menguasai keahlian khusus, perempuan miskin umumnya lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif yang sifatnya informal –yang masih bisa dikompromikan dengan beban pekerjaan mereka di sektor domestik.
2. Pembangunan dan kegiatan industri migas yang berkembang, umumnya tidak banyak mempengaruhi perubahan peran perempuan miskin dalam ranah domestik. Bahkan, sebagian perempuan miskin terpaksa harus menanggung beban yang makin berat, karena harus menanggung beban kerja ganda, baik dalam kegiatan domestik maupun kegiatan publik. Seberapapun besar sumbangan ekonomi dan seberapapun berat beban kerja yang ditanggung perempuan di sektor publik, mereka umumnya masih harus menanggung berbagai beban kerja kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyetrika dan mengasuh anak-anak.
3. Dalam kegiatan usaha produktif, peran perempuan miskin umumnya lebih menonjol dalam kegiatan pengelolaan keuangan, sedangkan untuk kegiatan pembelian bahan baku dan pemasaran produk umumnya lebih banyak ditekuni laki-laki yang *notabene* merupakan kepala rumah tangga perempuan miskin.
4. Fasca pembangunan industri migas, sektor usaha yang berkembang dan berpeluang untuk dimasuki perempuan miskin umumnya adalah kegiatan perdagangan dan industri kecil yang memang tidak menuntut pendidikan tinggi

dan keahlian khusus. Namun demikian, secara keseluruhan pasca pembangunan industri migas lapangan kerja yang tersedia umumnya lebih banyak untuk laki-laki daripada perempuan.

5. Kendati pihak suami tidak melarang perempuan miskin terlibat dalam kegiatan produktif di luar rumah, tetapi akibat tidak memiliki modal yang cukup dan tidak memiliki ketrampilan yang mendukung, maka peluang perempuan miskin untuk mengembangkan usaha menjadi terhambat.
6. Mekanisme yang dikembangkan perempuan miskin untuk tetap dapat bertahan hidup adalah melakukan berbagai langkah penghematan, mengembangkan mekanisme subsistensi, utang dan meminta bantuan orang lain, baik dengan kewajiban mengembalikan dengan bunga maupun tidak.
7. Upaya realistis yang dapat dikembangkan perempuan miskin untuk menjaga kelangsungan usahanya adalah dengan cara mengembangkan produksi usaha lama yang ditekuni, dan berusaha memberi nilai tambah terhadap produk yang mereka hasilnya. Disadari perempuan miskin bahwa berharap mereka dapat terlibat dalam kegiatan industri migas adalah sesuatu yang mustahil dapat dicapai, sehingga peluang mereka untuk bekerja umumnya adalah di luar sektor industri migas.
8. Meski biaya produksi dan modal yang dibutuhkan untuk melangsungkan usahanya meningkat, tetapi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikembangkan keluarga perempuan miskin justru malah berkurang.

2. Saran: Kebijakan dan Program

Upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan peran perempuan miskin di wilayah eksplorasi migas harus diakui bukanlah hal yang mudah. Meskipun berbagai kajian telah membuktikan bahwa perempuan miskin memiliki daya tahan dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha berskala mikro atau usaha di sektor informal yang tangguh, tetapi akibat “beban ganda” yang mereka tanggung menyebabkan ruang gerak dan peluang perempuan untuk lebih maju menjadi terhambat. Di balik kisah sebagian perempuan miskin yang mampu mengembangkan kegiatan produktif sekaligus menanggung beban ganda di ranah domestik. di berbagai daerah eksplorasi migas yang diteliti tidak sedikit perempuan miskin yang mengaku kesulitan

untuk mengembangkan potensi dirinya akibat tidak didukung pendidikan, ketrampilan, dan modal yang memadai, di samping karena masih kuatnya budaya patriarkhis yang berlaku di kalangan keluarga miskin.

Untuk memberdayakan dan mengembangkan peran perempuan miskin, selain harus dilakukan secara terpadu, juga harus menyentuh semua aspek yang menjadi akar masalah kerentanan dan ketidakberdayaan perempuan miskin. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, studi ini menemukan paling-tidak ada lima arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan dikembangkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur jika berkeinginan untuk meningkatkan peran dan keberdayaan perempuan di daerah eksplorasi migas, yaitu: (1) pengembangan fasilitas modal usaha dan aset produksi bagi perempuan miskin, (2) mengembangkan peluang-peluang usaha baru bagi perempuan miskin, (3) pelatihan dan peningkatan kualitas SDM perempuan miskin. (4) perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, dan (5) pemberdayaan sosio-kultural dan pembebasan perempuan miskin dari berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan.

Membantu, melindungi dan memberdayakan perempuan miskin agar tidak mengalami proses marginalisasi akibat pembangunan industri migas, tidak hanya membutuhkan pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari penduduk lokal yang miskin dan rentan dimarginalisasi, tetapi juga harus dipahami posisi mereka sebagai perempuan yang acapkali masih terbelenggu oleh nilai-budaya yang sifatnya patriarkhis.

Tabel 31
Isu Prioritas dan Program Pemberdayaan Perempuan Miskin
di Wilayah Eksplorasi Migas di Provinsi Jawa Timur

Isu Prioritas	Kebijakan	Program
Sebagian besar kondisi ekonomi perempuan di wilayah eksplorasi migas umumnya miskin dan rentan	pengembangan fasilitas modal usaha dan bantuan aset produksi bagi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan modal usaha bagi perempuan miskin - Bantuan aset produksi bagi perempuan miskin - Pendampingan pengembangan usaha yang ditekuni perempuan
Perempuan umumnya menanggung beban ganda, baik kerja domestik maupun kerja di sektor publik	<i>Counter Culture</i> dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi gender	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan penyadaran gender - Pengembangan forum pemberdayaan perempuan di tingkat desa di wilayah eksplorasi migas

<p>Kendala pengembangan peran perempuan miskin bukan hanya datang dari dominasi laki-laki ataupun dari ruang domestik yang bias gender, tetapi juga dari struktur pasar yang acapkali kurang berpihak kepada usaha kecil yang dikembangkan perempuan.</p>	<p>Perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang ditekuni perempuan miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan pekerja perempuan di sektor informal dan industri kecil - Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pro dan dikelola perempuan - Pengembangan <i>putting out system</i> yang berpihak kepada hak pekerja perempuan
<p>Peluang usaha yang tersisa bagi perempuan umumnya adalah usaha mikro dan sektor informal</p>	<p>Pengembangan peluang-peluang usaha baru bagi perempuan miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan ketrampilan alternatif bagi perempuan - Bantuan modal bagi perempuan untuk pengembangan usaha baru - Pendampingan usaha baru yang ditekuni perempuan
<p>Sebagian besar perempuan umumnya menjadi pekerja keluarga dan tak berkeahlian</p>	<p>Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan manajemen dan ketrampilan produktif bagi perempuan miskin - Bantuan modal usaha dan teknologi produktif bagi perempuan miskin - Pengembangan usaha mandiri bagi perempuan miskin
<p>Usaha yang dikembangkan perempuan miskin di daerah industri migas seringkali mengalami proses pengikisan modal akibat kenaikan biaya produksi yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh</p>	<p>Pelatihan efisiensi proses produksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tentang manajemen usaha dan efisiensi proses produksi bagi perempuan miskin. - Bantuan modal usaha bersubsidi.
<p>Perempuan miskin mungkin memiliki peran yang strategis untuk mendukung langkah penghematan keluarga</p>	<p>Pengembangan lembaga penyangga substitutif di kalangan perempuan miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi peran kelompok pengajian, PKK dan kelompok sekunder lain di masyarakat yang bermanfaat sebagai lembaga penyangga bagi kebutuhan ekonomi keluarga perempuan miskin

Selama ini, jujur harus diakui bahwa kesempatan dan peluang perempuan untuk mengembangkan usaha produktif dan memberdayakan dirinya seringkali terhambat, karena status mereka dalam keluarga dan masyarakat umumnya hanya dianggap sebagai pekerja non-produktif dan bukan kepala Keluarga. Kesempatan perempuan untuk memperoleh bantuan modal dan mengakses lembaga perkreditan formal, misalnya,

seringkali terhambat karena agunan yang dipersyaratkan lembaga tersebut biasanya atas nama laki-laki atau suami sebagai Kepala Keluarga.

Pendek kata, sepanjang status perempuan dalam keluarga dan masyarakat masih dianggap sebagai warga kelas dua, maka sepanjang itu pula upaya untuk memberdayakan peran kewirausahaan perempuan tidak akan berjalan maksimal. Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan miskin, terutama di daerah eksplorasi migas, karena itu yang dibutuhkan sebetulnya bukan sekadar kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib usaha mikro yang ditekuni perempuan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi gender yang selama ini masih dialami perempuan. Jangan sampai terjadi, kegiatan eksplorasi migas yang berlangsung di sejumlah wilayah di Jawa Timur, justru melahirkan proses marginalisasi yang merugikan perempuan, karena tidak didahului atau minimal dibarengi dengan upaya-upaya untuk memberdayakan perempuan, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Bagi pengelola atau pemilik industri migas yang saat ini tengah melangsungkan kegiatan eksplorasi sesungguhnya akan sangat bijak jika sejak awal telah memikirkan dan memasukkan isu-isu perempuan lokal dan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program-program CD (*Community Development*) yang mereka rancang dan tengah dikembangkan. Tanpa fokus khusus yang berpihak kepada perempuan miskin, niscaya kegiatan eksplorasi migas yang sedang berlangsung hanya akan melahirkan pemiskinan dan peminggiran perempuan dari dinamika dan proses pembangunan yang tengah berlangsung di wilayah tempat tinggal mereka (*).

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Hasan (Penyunting). 1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*. Bandung: Akatiga dan ASPPUK.

James, Kenneth dan Narongchai Akrasane, 1993. *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus ASEAN*. Jakarta: LP3ES.

Krisnawati, Tati, 1993. "Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive", dalam: Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein (eds.), 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.

Mubyarto dkk. 1993. *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media dan P3PK UGM.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti Press.

Suyanto, Bagong, 1996. *Kemiskinan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditra Media.

Suyanto, Bagong & Koko Srimulyo, 2001. *Menakar Peran BUMN di Era Otonomi*. Surabaya: Lutfansah.

Sritua Arief, Dialektika Hubungan Ekonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", dalam *KELOLA* Gajah Mada University Business Review, No. 10, Tahun IV, 1995.

Tjitrosoepomo, Gembong dkk. 1991. *Industri Pedesaan dan Masalah Pengembangannya*. Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala.

Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Utami, Santi Wijaya Hesti dkk., 2001. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*. Bantui: IP4-Lappera dan The Asia Foundation.

Widyaningrum, Nurul dkk. 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: Akatiga.

Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 2004. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 8/No. 2 Oktober 2003. "Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan". Bandung: Yayasan Akatiga.

_____, 2003. *Jurnal Perempuan* No. 27."Perempuan di Pertambangan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

KUESIONER

MEKANISME SURVIVAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI DAERAH EKSPLORASI MIGAS DI PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Kami adalah Tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, dan saat ini kami sedang melakukan Penelitian tentang mekanisme survival dan upaya pemberdayaan perempuan miskin di daerah industri migas di Provinsi Jawa Timur

Kami berharap ibu bersedia menjadi responden penelitian ini dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Seluruh hasil penelitian ini akan diajukan kepada Pemerintah dan Pemda Provinsi Jawa Timur untuk dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam merumuskan program intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan miskin di daerah industri migas yang lebih efektif.

Atas kesediaan bapak/ibu menyediakan waktu luang untuk kegiatan wawancara ini kami sampaikan terimakasih.

No.	Pertanyaan	Koding
A. Lokasi Penelitian		
01.	Desa	1 ()
02.	Kecamatan:.....	2 ()
03.	Kabupaten: 1. Kabupaten Bojonegoro 2. Kabupaten Tuban 3. Kabupaten Lamongan 4. Kabupaten Sidoarjo	3 ()
B. Identitas Responden		
04.	Umur responden:..... tahun.	4 ()
05.	Pendidikan terakhir responden: 1. Tidak sekolah 4. SLTA 2. SD 5. PT/Akademi 3. SLTP	5 ()
06.	Pekerjaan pokok responden: 1. Petani 5. Wiraswasta 2. Industri kecil 6. Pedagang 3. Sektor informal 7. Ibu Rumah Tangga 4. Nelayan 8. Lainnya, sebutkan.....	6 ()
07.	Apakah responden memiliki pekerjaan sampingan: 1. Ya, memiliki pekerjaan sampingan tetap 2. Ya, memiliki tetapi tidak tetap 3. Tidak memiliki	7 ()
08.	Jumlah anak responden=.....jiwa	8 ()

09.	Keluarga responden termasuk keluarga: 1. Pra Sejahtera 2. Sejahtera I 3. Sejahtera II 4. Sejahtera II Plus	9 ()
10.	Rata-rata penghasilan responden per bulan:.....rupiah	10 ()
11.	Rata-rata penghasilan keluarga responden per bulan: rupiah	11 ()
12.	Dalam 6 bulan terakhir, apakah responden selalu bisa menabung sebauan penghasilannya? 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak pernah	12 ()
13.	Rata-rata per bulan, berapa jumlah uang yang bisa disisihkan responden untuk ditabung: rupiah	13 ()

C. Potensi dan Peluang Perempuan

14.	Pasca pembangunan industri migas, bagaimana kondisi ekonomi keluarga responden: 1. Jauh lebih sejahtera 2. Lebih baik 3. Sama saja 4. Lebih buruk 5. Jauh lebih buruk	14 ()
15.	Akibat-akibat negatif apa sajakah yang pernah menimpa keluarga responden pasca pembangunan industri migas: 1. Anak-anak terpaksa putus sekolah 2. Kehilangan pekerjaan 3. Usaha yang ditekuni mengalami kemunduran 4. Kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari 5. Terganggunya kesehatan anggota keluarga 6. Utang meningkat 7. Kepemilikan lahan berkurang	15 () 16 () 17 () 18 () 19 () 20 () 21 ()
16.	Akibat-akibat positif apa sajakah yang dirasakan keluarga responden pasca pembangunan industri migas: 1. Dapat membuka usaha baru 2. Omzet usaha meningkat 3. Penghasilan meningkat 4. Suasana tempat tinggal lebih ramai 5. Kesempatan kerja meningkat	22 () 23 () 24 () 25 () 26 ()
17.	Pasca dibangunnya industri migas, apakah responden berpindah/ganti pekerjaan? 1. ya 2. Tidak	27 ()

18.	Jika ya, apakah pekerjaan yang ditekuni sekarang lebih baik daripada pekerjaan yang ditekuni sebelumnya? 1. Lebih baik 2. Sama saja 3. Lebih buruk	28 ()
19.	Ketrampilan yang dimiliki dan dikuasai responden: 1. Pertanian 2. Menjahit 3. Kerajinan/industri kecil 4. Memasak 5. Administrasi	29 () 30 () 31 () 32 () 33 () 34 ()
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Keterangan: 1. Tidak menguasai 2. Menguasai </div>		
20.	Pasca pembangunan industri migas, menurut responden lapangan kerja atau usaha apakah yang tumbuh di daerah responden? 1. Sektor perdagangan (toko, warung) 2. Sektor jasa (kost-kostan) 3. Sektor transportasi (ojek) 4. Sektor informal (tukang cuci, PRT) 5. Sektor industri kecil 6. Sektor pertanian 7. Sektor formal (pabrik)	35 () 36 () 37 () 38 () 39 ()
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Keterangan: 1. Berkembang pesat 2. Berkembang 3. Tidak berkembang </div>		
21.	Sejauhmana peluang responden untuk mengakses lapangan kerja baru yang muncul pasca pembangunan industri migas? 1. Sektor perdagangan (toko, warung) 2. Sektor jasa (kost-kostan) 3. Sektor transportasi (ojek) 4. Sektor informal (tukang cuci, PRT) 5. Sektor industri kecil 6. Sektor pertanian 7. Sektor formal (pabrik)	40 () 41 () 42 () 43 () 44 () 45 () 46 ()
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Keterangan: 1. Sangat rendah 2. Rendah 3. Cukup 4. Tinggi </div>		
22.	Adakah di antara anggota keluarga responden yang terserap bekerja di usaha industri migas? 1. Ya, ada 2. Tidak ada	47 ()
23.	Jika ada, apa jenis kelamin dari anggota keluarga responden yang terserap bekerja di industri migas? 1. Laki-laki 2. Perempuan	48 ()
24.	Bagaimana pandangan responden terhadap kehadiran para pendatang pasca pembangunan industri migas? 1. Merupakan pesaing dalam mencari kerja 2. Memicu kecemburuan sosial 3. Menyebabkan masyarakat makin kontraktual	49 () 50 () 51 ()
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Keterangan: 1. Sangat terasa 2. Terasa 3. Tidak terasa </div>		

25.	<p>Menurut responden, pembangunan industri migas menguntungkan atau malah merugikan responden sebagai seorang perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat menguntungkan 2. Menguntungkan 3. Tidak berpengaruh 4. Merugikan 5. Sangat merugikan 	52 ()
26.	<p>Sejauhmana peluang responden mengembangkan kegiatan usaha produktif pasca pembangunan industri migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat besar 2. Besar 3. Cukup besar 4. Kecil 5. Sangat kecil 	53 ()
27.	<p>Faktor-faktor apakah yang menghambat peluang responden sebagai perempuan mengembangkan kegiatan usaha pasca pembangunan industri migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban pekerjaan domestik 2. Tidak memiliki ketrampilan yang mendukung 3. Kekurangan modal 4. Dilarang suami/keluarga 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat 2. Cukup menghambat 3. Tidak menghambat </div>

D. Peran Perempuan di Sektor Domestik & Publik

28.	<p>Setelah ada industri migas di wilayah tempat tinggal responden, siapakah yang menjalankan usaha yang ditekuni saat ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan jenis usaha 2. Pembelian bahan baku 3. Pemasaran produk 4. Pengelolaan keuangan 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami 2. Istri 3. Suami-Istri </div>
29.	<p>Sejak adanya industri migas, apakah peran responden di kegiatan produktif semakin berat atau semakin ringan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berat 2. Sama saja 3. Semakin ringan 	62 ()
30.	<p>Sejak ada industri migas, siapakah yang berperan melaksanakan pekerjaan domestik berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasak 2. Mencuci 3. Membersihkan rumah 4. Menyetrika 5. Mengasuh anak 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami 2. Istri 3. Suami-Istri 4. Ortu/Mertua 5. Anak 6. Pembantu RT </div>
31.	<p>Sejak adanya industri migas, apakah peran responden di kegiatan domestik semakin berat atau semakin ringan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berat 2. Sama saja 3. Semakin ringan 	68 ()

32.	<p>Berbagai kegiatan sosial-keagamaan berikut ini, manakah yang responden ikuti?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajian 2. PKK 3. Arisan 4. Partai Politik 5. BPD 6. Paguyuban 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif 2. Kadang-kadang 3. Tidak ikut </div>	<p>69 ()</p> <p>70 ()</p> <p>71 ()</p> <p>72 ()</p> <p>73 ()</p> <p>74 ()</p>
33.	<p>Sejauhmana kegiatan domestik di rumah menghambat kemungkinan/kesempatan responden terlibat dalam pekerjaan di sektor publik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat menghambat 2. Menghambat 3. Biasa saja 4. Tidak menghambat 5. Sangat tidak menghambat 		75 ()

E. Mekanisme Survival dan Jaringan Sosial

34.	<p>Jika responden menghadapi masalah atau membutuhkan sesuatu, kepada siapakah biasanya meminta bantuan atau dukungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua 2. Anak 3. Kerabat 4. Tetangga 5. Teman di kegiatan sosial (misal: pengajian) 6. Rentenir/tengkulak 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak pernah </div>	<p>76 ()</p> <p>77 ()</p> <p>78 ()</p> <p>79 ()</p> <p>80 ()</p> <p>81 ()</p>
35.	<p>Kiat apakah yang biasanya dikembangkan responden ketika menghadapi tekanan kebutuhan hidup?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggadaikan barang 2. Menjual barang 3. Utang dengan bunga 4. Utang tanpa bunga 5. Subsistensi 6. Penghematan 7. Penambahan jam kerja 8. Deversifikasi usaha 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak pernah </div>	<p>82 ()</p> <p>83 ()</p> <p>84 ()</p> <p>85 ()</p> <p>86 ()</p> <p>87 ()</p> <p>88 ()</p> <p>89 ()</p>
36.	<p>Apa yang dilakukan responden dalam rangka menghadapi proses perubahan yang terjadi pasca pembangunan industri migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah ketrampilan 2. Mengembangkan deversifikasi produk 3. Menambah omzet usaha lama 4. Mengembangkan lokasi usaha 5. Mengembangkan usaha baru 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak </div>	<p>90 ()</p> <p>91 ()</p> <p>92 ()</p> <p>93 ()</p> <p>94 ()</p>

F. Riwayat Usaha dan Upaya Pemberdayaan Perempuan

37.	<p>Bagaimana prospek usaha atau pekerjaan yang ditekuni responden pasca pembangunan industri migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat bagus 2. Bagus 3. Biasa 4. Suram 5. Sangat suram 		95 ()
-----	--	--	--------

28.	<p>Bagaimana kondisi usaha yang ditekuni responden pasca pembangunan industri migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya produksi 2. Pangsa pasar/pemasaran 3. Jumlah saingan 4. Keuntungan 5. Permodalan 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat meningkat 2. Meningkat 3. Tetap 4. Menurun 5. Sangat menurun 	<p>96 () 97 () 98 () 99 () 100 ()</p>
29.	<p>Selama ini dari mana modal yang dipergunakan responden membuka dan mengembangkan usaha?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal sendiri 2. Diberi kerabat 3. Pinjam kerabat 4. Pinjam orang lain 5. Bantuan pemerintah 6. Lainnya, (sebutkan)..... 		<p>101 ()</p>
30.	<p>Sejauhmana responden membutuhkan bantuan pemerintah untuk membuka atau pengembangan usaha yang ditekuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat membutuhkan 2. Membutuhkan 3. Cukup membutuhkan 4. Kurang membutuhkan 5. Sangat tidak membutuhkan 		<p>102 ()</p>
31.	<p>Menurut pengalaman responden, usaha apakah yang lebih mungkin dilakukan untuk bertahan hidup pasca pembangunan industri migas?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dari usaha lama 2. Melakukan efisiensi/misalnya memperpendek waktu kerja 3. Memberi nilai tambah terhadap barang yang dihasilkan 4. Melakukan diversifikasi usaha (membuka usaha baru) 5. Lainnya, (sebutkan)..... 		<p>103 ()</p>
32.	<p>Apakah responden berminat menerima bantuan dari pemerintah untuk membuka atau mengembangkan usaha yang ditekuni saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat berminat 2. Berminat 3. Cukup berminat 4. Kurang berminat 5. Sangat tidak berminat 		<p>104 ()</p>
33.	<p>Jenis bantuan apa saja yang dibutuhkan responden untuk membuka atau mengembangkan usaha yang ditekuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan permodalan 2. Bantuan teknologi/peralatan 3. Bantuan bahan baku 4. Bantuan pelatihan manajemen 5. Bantuan pelatihan peningkatan kualitas produk 6. Bantuan pemasaran 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat membutuhkan 2. Membutuhkan 3. Cukup membutuhkan 4. Tidak membutuhkan 5. Sangat tidak membutuhkan 	<p>105 () 106 () 107 () 108 () 109 () 110 ()</p>
34.	<p>Kendala-kendala apa saja yang menghambat pengembangan usaha responden?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan 2. Lokasi usaha 3. Persaingan yang ketat 4. Jaringan pemasaran 5. Ketrampilan yang dikuasai 6. Koneksi 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat menghambat 2. Menghambat 3. Cukup menghambat 4. Tidak menghambat 5. Sangat tidak menghambat 	<p>111 () 112 () 113 () 114 () 115 () 116 ()</p>

BIO DATA KETUA PENELITIAN

1. Nama : Dr. Emy Susanti Hendrarso, MA
2. NIP : 131 406 097
3. Tanggal lahir : 15 Maret 1958
4. Jabatan : 1).Lektor, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
2) Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga
5. Agama : Islam
6. Alamat Kantor: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
Kampus B UNAIR, Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya
Telepon: 031.5034015, Fax. 5022492

Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga
Gedung LPPM UNAIR
Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo Surabaya
Telepon/Faximile : (031) 5995722
e-mail : psw_unair@yahoo.com
psw_unair@plasa.com

PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI/INSTANSI	TEMPAT	TAH UN	PENDIDIKAN	IJASAH
Strata : • Universitas Indonesia • Flinders University • Universitas Gadjah Mada	Jakarta Adelaide, Australia Yogyakarta	1983 1993 2003	Sosiologi Sosiologi Sosiologi	Doctoranda MA Doktor
Non Strata : • Universitas Gadjah Mada • Leiden University • Central European University	Yogyakarta Leiden, Belanda Budapest, Hungaria	1986 1987 2000	Studi Pembangunan Women Studies Gender and Culture	Sertifikat Sertifikat Sertifikat

PENGALAMAN**1. BIDANG PENDIDIKAN**

N0	Tahun	Mata Kuliah	Universitas
	Sejak 1984 s/d Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Sosial - Sosiologi Organisasi - Perubahan Sosial - Sosiologi Gender 	FISIP Universitas Airlangga
2	Sejak 1997 s/d Sekarang	Seminar Riset Kajian Gender di Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial	Pasca Sarjana Universitas Airlangga
3	Sejak 1999 s/d Sekarang	Perubahan Sosial dan Keluarga Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pasca Sarjana Universitas Airlangga

2. BIDANG PENELITIAN

N0	Tahun	Judul Kegiatan	Keterangan
1	1985/1986	Peran Wanita Dalam Keluarga Dan Masyarakat (Studi Pada Wanita Migran Madura Di Surabaya)	Ketua Peneliti
2	1988/1989	Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Industri Pengolahan (Studi Kasus Di Lingkungan Rungkut Industri, Surabaya)	Ketua Peneliti
3	1989/1990	Sektor Informal Sebagai Alternatif Lapangan Pekerjaan Bagi Wanita (Studi Kasus Di Surabaya)	Ketua Peneliti
4	1992/1993	Wanita Pekerja Di Sektor Perbankan Di Surabaya (Studi Tentang Hubungan Gender Di Tempat Kerja), Thesis Master di Bidang Sosiologi	Ketua Peneliti
5	1994/1995	Peran Wanita Di Sektor Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Kotamadya Pasuruan)	Ketua Peneliti
6	1995/1996	Peran Bidan Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Daerah Yang Sulit Dijangkau Di Wilayah Propinsi Jawa Timur.	Anggota Peneliti
7	1995/1996	Wanita Pekerja Di Sektor Non Pertanian Di Sidoarjo, Jawa Timur.	Ketua Peneliti
8	1996/1997	Community Support System Bagi Wanita Pekerja Di Propinsi Jawa Timur	Ketua Peneliti
9	1996/1997	Kajian Kebutuhan Untuk Kesejahteraan Ibu ('Save Motherhood') di Propinsi Jawa Timur.	Ketua Peneliti
10	1996/1997	Pola Kematian Bayi Di Kalangan Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I Di Wilayah Desa Tertinggal, Propinsi Jawa Timur.	Ketua Peneliti

11	1997/1998	Peran Wanita Dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak Balita (Studi Kasus Pada Keluarga Miskin Di Jawa Timur)	Ketua Peneliti
12	1997	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita Di Kabupaten Sidoarjo.	Ketua Peneliti
13	1997	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kabupaten Mojokerto	Ketua Peneliti
14	1997	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita Di Kabupaten Sumenep	Ketua Peneliti
15	1997	Aktualisasi Program Pembangunan Berwawasan Kemitrasejajaran Pria Wanita Di Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua Peneliti
16	1997	Perilaku Reproduksi Remaja Wanita Di Kabupaten Tulungagung (Suatu Studi Kasus Di SLTP Negeri dan Swasta di Desa Sendang)	Anggota
17	1997	Studi Pola Baca dan Penelusuran Informasi Perempuan Di Surabaya	Ketua Peneliti
18	1998	Studi Aktualisasi Program Pembangunan Berwawasan Kemitrasejajaran Pria Wanita Di Kabupaten Dati II Sidoarjo	Ketua Peneliti
19	1998	Studi Aktualisasi Program Pembangunan Berwawasan Kemitrasejajaran Pria Wanita Di Kabupaten Gresik	Ketua Peneliti
20	1998	Studi Review Profil dan Rencana Peningkatan Peranan Wanita Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua Peneliti
21	1998	Studi Evaluasi Pelaksanaan Program IDT Di Wilayah Kabupaten Dati II Sidoarjo	Ketua Peneliti
22	1998	Studi Perencanaan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Dati II Sidoarjo	Ketua Peneliti
23	1998	Studi Review Profil Kedudukan Peranan Wanita Dan Wawasan Gender (Proyek Peningkatan Peranan Wanita di Kabupaten Dati II Sumenep)	Ketua Peneliti
24	1999	Profil Peranan Wanita Dalam Pembangunan Di Kabupaten Dati II Mojokerto	Ketua Peneliti
25	1999	Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua Peneliti
26	1999	Studi Aplikasi Upaya Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Di Kabupaten Dati II Gresik	Ketua Peneliti
27	2000	Studi Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran Dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin di	Ketua Peneliti

		Kabupaten Mojokerto	
28	2001	Bias Gender Dalam Sastra Anak Terjemahan Di Indonesia	Anggota
29	2001	Anak Jalanan Perempuan (Studi Kualitatif Tentang Strategi Mempertahankan Hidup Dan Tindak Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Jalanan Perempuan Di Kotamadya Surabaya)	Anggota
30	2001	Pengembangan Program Pembangunan Sektor Bidang Sosial Di Kota Surabaya	Ketua Peneliti
31	2001	Kajian Perspektif Gender Program Pemberdayaan Perempuan Lintas Sektor Di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
32	2001	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita Di Kota Mojokerto	Ketua Peneliti
33	2001	Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Mojokerto	Ketua Peneliti
34	2001	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Jawa Timur	Ketua Peneliti
35	2001	Sistem Kerja Ijon Dalam Jaringan Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan	Ketua Peneliti
36	2001	Studi Pemanfaatan Perempuan Dalam Bisnis Media	Ketua Peneliti
37	2002	Analisa Perencanaan Dan Pengembangan Mekanisme Pelembagaan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
38	2002	Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KPA) Di Pedesaan	Ketua Peneliti
39	2002	Analisis Bahan Ajar IPS, PPKN dan Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Dasar Di Indonesia	Anggota Peneliti
40	2002	Pengembangan Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Advokasi dan Fasilitas Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KPA)	Ketua Peneliti
41	2003	Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Tingkat Propinsi (Studi Kasus Perguruan Tinggi Di Propinsi Jawa Timur)	Ketua Peneliti
42	2003	Penyusunan Modul Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
43	2003	Pengembangan Model Perencanaan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten	Ketua Peneliti

		Sidoarjo	
44	2003	Pengembangan Unit Ekonomi Lokal Yang Berwawasan Gender Di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
45	2003	Pembentukan Desa Percontohan Pemberdayaan Perempuan Terpadu Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
46	2003	Survey Profil Gender Di Propinsi Jawa Timur (WSLIC – 2)	Ketua Peneliti
47	2004	Pengelolaan Dana Sosial Dengan Fokus Sasaran Perempuan Di Kabupaten Sidoarjo : Suatu Kajian Gender Dengan Pendekatan Analisis Pathway (GAP)	Ketua Peneliti
48	2004	Studi Implementasi Model Pembangunan Berperspektif Gender Di Kabupaten Gender	Ketua Peneliti
49	2005	Ideologi Patriarki Dalam Media Sebagai Ruang Publik : Analisis Terhadap Narasumber Perempuan Dalam Peliputan Berita Pilkada Surabaya	Ketua Peneliti
50	2006	Studi Aksi Perencanaan Dan Strategi Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Sidoarjo	Ketua Peneliti
51	2006	Penyusunan Profil Statistik Gender Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Surabaya	Ketua Peneliti
52	2006	Dampak Globalisasi Terhadap Relasi Gender Dan Struktur Keluarga Pekerja Migran Perempuan	Ketua Peneliti
53	2006	Penyusunan Profil Statistik Gender Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	Ketua Peneliti
54	2006	Pemetaan Anak Merokok Di Kota Surabaya	Ketua Peneliti
55	2006	Implementasi PUG Di Tingkat Kabupaten/Kota Dan Propinsi (Evaluasi Pendampingan Pusat Studi Wanita Unair Di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Propinsi Jawa Timur	Ketua Peneliti
56	2007	Potensi Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana	Ketua Peneliti

3. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NO	TAHUN	KEGIATAN
1	1994	Dosen Teladan II Universitas Airlangga
2	Sejak 1995	Pelatih Untuk Pelatihan Wawasan Gender dan Pembangunan Bagi Birokrat Di Jawa Timur (Gresik, Sidoarjo, Sumenep, Surabaya, Lamongan dan Mojokerto)
3	1996	International Interdisciplinary Congress On Women' di Adelaide, Australia
4	1997	Program International Visitors – USIS Tentang ‘ The Rule Of Women In The US Politics’, dan mengunjungi negara Amerika bersama 23 Negara
5	Sejak 1998	Koordinator Program Pengembangan Desa Binaan Peningkatan Peranan Wanita Di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik
6	1998 - sekarang	Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia Surabaya
7	1999	Koordinator Program Pengembangan Koperasi Wanita An'nisa Di Kabupaten Jember
8	2000	Koordinator Kegiatan Pendampingan Perempuan Miskin Di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
9	2000	Pelatih Pelatihan Analisis Gender Bagi Pengajar Perguruan Tinggi dan Guru-guru
10	2001	Koordinator Pelatihan Penanganan Sindrome Trauma Bagi Pendamping Pengungsi Kalimantan Tengah Di Madura
11	2001	Narasumber Pelatihan Metode Penelitian Berperspektif Gender
12	2001 - 2003	Anggota Tim Pemberdayaan Ibu dan Anak UNICEF Jawa Timur
13	2002 - 2004	Anggota Tim Ahli Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kementrian Pendidikan Nasional
14	2002 - sekarang	Koordinator Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo
15	2005 - 2006	Koordinator Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Kabupaten/Kota Jawa Timur

4. KEGIATAN LAIN

NO	TAHUN	KEGIATAN	TEMPAT
1	1995	Peserta Aktif Dalam International Sociological Conference On Women	Adelaide – Australia
2	1997	Peserta Program ‘International Visitors On Women and Politics’ – USIS	Washington, Denver, San Antonio, New York – America
3	2000	Anggota Delegasi Negara Republik Indonesia dalam United Nations Conference Special Session On Women	New York – America

4	2004	Peserta Aktif Dalam Women Conference – Regional Session International	Bangkok, Thailand
5	2005	Peserta Visitor 'Program On Women Impowerment National University Of Singapore	Singapore

5. PUBLIKASI

- ❖ 1994 : Wanita Di Sektor Industri Perbankan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume VII No 01-02, April 1994
- ❖ 1994 : Peran Wanita di Sektor Informal di Surabaya, Media Studi Wanita Vol.2, No.2, Desember 1994
- ❖ 1995 : Penelitian Kualitatif, Suyanto, B. Et al. (eds), Metode Penelitian Sosial, Surabaya : Airlangga University Press 1995
- ❖ 1995 : Wanita Pekerja Di Pasar Tradisional, Masyarakat Kebudayaan dan Politik Th IX, No 3-4, Agustus 1995
- ❖ 1996 : Emy Susanti dan Bagong Suyanto, Pemberdayaan Dan Kesetaraan Perempuan Prisma, No. 5, Th. 1996
- ❖ 1996 : Wanita Dari Subordinasi Dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan, Suyanto, Bagong dan Susanti, Emy (Penyunting), Surabaya : Airlangga University Press
- ❖ 1997 : Intervensi Terfokus Tumbuh Kembang Anak : Studi Kasus Pada Keluarga Miskin Di Propinsi Jawa Timur Dalam Raharjo, Yulvita et.al., Prosiding Lokakarya Nasional Masalah Pengukuran Pencapaian Intervensi terfokus Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Jakarta : Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI
- ❖ 1999 : Studi Kualitatif Tentang Pekerja Anak Di Jawa Timur, Airlangga University Press
- ❖ 2001 : Buku Pembuka Mata Di Propinsi Jawa Timur
- ❖ 2002 : Potret Kesadaran Gender Orang Media, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Tim Penulis)
- ❖ 1997 : Peran Wanita Dalam Pengasuhan Dan Perawatan Kesehatan Anak Balita (Studi Pada Keluarga Miskin Di Propinsi Jatim) (Dr Emy Susanti = SKW-DP3M)
- ❖ 1998 : Pergeseran Pekerjaan Dan Akses Wanita Terhadap Lapangan Kerja Di Perkotaan (Studi Pada Keluarga Miskin Di Propinsi Jawa Timur) (Dr Emy Susanti = SKW-DP3M)
- ❖ 1998 : Mekanisme Rekrutmen dan Bentuk Eksploitasi Yang Dialami Anak Wanita Yang Bekerja Sebagai Pelacur di Perkotaan (Bagong Suyanto dan Dr. Emy Susanti = SKW-DP3M)

Surabaya, 27 Oktober 2009
Ketua Peneliti,

Dr. Emy Susanti Hendrarso, MA

BIO DATA ANGGOTA PENELITIAN

1. Nama : Drs. Bagong Suyanto, M.Si
2. NIP : 131 836 997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 6 September 1966
5. Alamat : Wisata Bukti Mas II, Blok E-1 No. 3 Surabaya
HP 081 332 750 591
6. Agama : Islam
7. Pendidikan : S-1 (FISIP Universitas Airlangga, lulus 1988)
S-2 (Magister Science Pascasarjana Unair, lulus 1999)
8. Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Unair
9. Bidang Keahlian : Pembangunan dan Kemiskinan

Karier di Bidang Keahlian

- 1988 – sekarang : Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair
1993 – sekarang : Sekretaris dan Peneliti Ikatan Sosiologi Indonesia Jatim
1998 – 2000 : Konsultan UNICEF
2002 – sekarang : Ketua Litbang Dewan Pendidikan Jawa Timur
2005 – sekarang : Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur

Karya Tulis Buku

Suyanto, Bagong, 1993. *Dampak Motorisasi dan Komersialisasi Perikanan Terhadap Perubahan Tingkat Pendapatan, Pola Bagi Hasil dan Munculnya Polarisasi Sosial-Ekonomi di Kalangan Nelayan Tradisional dan Modern*. Kerjasama YIIS dan Toyota Foundation.

Bagong Suyanto, 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.

Mustain dan Bagong Suyanto, 1998. *Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur*. Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.

Bagong Suyanto, 1998. *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur*. Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.

Bagong Suyanto dkk., 1998. *Studi Awal Analisis Situasi dan Penyusunan Kebijakan Sektor Sosial di Propinsi Jawa Timur*. Airlangga University Bekerjasama Dengan Rappeda Dati I Jawa Timur dan BAPPENAS

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 1999. *Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Airlangga University Press..

- Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. *Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur*. Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, 2000. *Pengkajiaan dan Pengembangan Implementasinak GERDU TASKIN Di Desa Pantai dan Rura ldi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansa..
- Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. *Tindak Kerasan Mengintai Anak-Anak*. Surabaya: Lutfansa
- Sri Sanituti Hariadi dan Karnaji,. “ Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan” dalam: Bagong Suyanto, 2000 *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penangannya..* Surabaya: Lutfansa
- Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. *Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur*. Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.
- Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*. Surabaya: Lutfansa
- Bagong Suyanto, 2000 *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penangannya*. Surabaya: Lutfansa
- Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2000. *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*. Kerjasama Lutfansa dan Ford Foundation.
- Bagong Suyanto, “Krisis Ekonomi dan Perkembangan Anak Rawan”, dalam: St Sularto, 2001. *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sri Sanituti Hariadi & Bagong Suyanto, 2001. *Anak-anak yang Teraniaya, Potret Sosial Anak Rawan di Indonesia*. Surabaya: Luftanfa.
- Bagong Suyanto & Karnaji, 2002. *Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bagong Suyanto & Sudarso, 2003. *Penyusunan Indeks Kemiskinan Manusia di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bagong Suyanto & Karnaji, 2003. *Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bagong Suyanto, 2003. *Kajiar: Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasar Selatan Jawa Timur*. Kerjasama Lemlit Unair dengan Baitbang Propinsi Jatim.

Bagong Suyanto & Karnaji (eds.), 2004. *Pemetaan Problema Dan Perumusan Program Penanganan Masalah Anak-Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Media Tama.

Bagong Suyanto & Sudarso, 2004. *Revitalisasi Penanganan Anak Terlantar, Merumuskan Pendekatan dan Program Revitalisasi Penanganan Anak Terlantar di Lingkungan Komunitas Miskin di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Media Tama.

Bagong Suyanto & Karnaji, 2004. *Evaluasi Pelaksanaan progam-Program Pembangunan Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah.

Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2005. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada.

Karnaji & Bagong Suyanto, 2005. *Pendataan PMKS di Surabaya, Pemetaan Problema dan pengembangan Program Penanganan Lansia di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah.

Bagong Suyanto, 2006. *Perlindungan Sosial Pada Masyarakat Lanjut Usia, Cacat dan Tuna Sosial*. Surabaya: Bappeprop Jatim.,

Soetandyo Wignjsoebroto & Bagong Suyanto (eds.), 2006. *Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik Sosial di Jawa Timur*. Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Soetandyo Wignjsoebroto & Bagong Suyanto (eds.), 2006. *Industri Migas di Jawa Timur: Menakar Godgan, Peluang Bisnis, dan Eksistensi Masyarakat Lokal.* Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Soetandyo Wignjsoebroto & Bagong Suyanto (eds.), 2007. *Mendongkrak IPM Jawa Timur: Problema dan Solusinya*. Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Soetandyo Wignjsoebroto & Bagong Suyanto (eds.), 2008. *Bencana di Jawa Timur: Dampak dan Upaya Penanggulangannya*. Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Soetandyo Wignjsoebroto & Bagong Suyanto (eds.), 2008. *Jawa Timur 5 Tahun ke Depan: Problema dan Tantangannya*. Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Zainuddin Maliki & Bagong Suyanto (eds.), 2008. *Mendongkrak Kualitas Pendidikan Jawa Timur: Problema dan Agenda ke Depan*. Surabaya: Dewan Pakar Provinsi Jatim.

Surabaya, 27 Oktober 2009
Ketua Peneliti,

Drs. Bagong Suyanto, M.Si
NIP 131 836 997

BIODATA ANGGOTA PENELITIAN

1. Nama : Drs. Septi Ariadi, MA.
 2. Umur/ Jenis Kelamin/ Agama : 45 Thn/ Pria/ Islam
 3. Jabatan : Staf Pengajar Universitas Airlangga
 4. Jurusan/ Fakultas : Sosiologi/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 5. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 6. Alamat Kantor : Jalan Airlangga No. 4 – 6 Surabaya
 Telp. (031) 5034015
 7. Alamat tempat tinggal : Perum. Bumi Marina Emas Blok F 116
 Surabaya
 Telp. (031) 5952552; HP : 0818525387

8. Riwayat Pendidikan Tinggi :

No.	Macam Pendidikan	Tempat	Tahun	Bidang	Gelar
1.	S-1 FISIP Unair	Surabaya	1988	Sosiologi	Drs.
2.	S-2 Institute For Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, Bangkok, Thailand	Bangkok Thailand	1996	Riset Sosial, Family Planning dan Kesehatan Reproduksi	MA.

9. Kursus dan Pendidikan Tambahan:

- 1). Kursus Metode Penelitian Sosial di Universitas Indonesia, Tahun 1990
- 2). Kursus Statistik dan Komputer di Universitas Airlangga, Tahun 1992
- 3). Kursus Pengajaran Applied Approach, Tahun 1998
- 4). Kursus Integrated Bahan Ajar (Kewirausahaan), Tahun 1999

10. Pengalaman Pekerjaan:

- a). Menjadi staf pengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Surabaya sampai tahun 2000
- b). Menjadi konsultan untuk kegiatan riset dengan Pemerintah kabupaten dan Bappeko Surabaya
- c). Sebagai konsultan dalam penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di UNICEF pada tahun 2001
- d). Sebagai Konsultan di UNICEF dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan sumber daya dini di beberapa kabupaten di propinsi Jawa Timur tahun 2002
- e). Sebagai Konsultan di UNICEF dalam rangka riset tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di propinsi Jawa Timur dan Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2006
- f). Memberikan pelatihan tentang metodologi penelitian dan analisis data (statistik) di berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah/ swasta
- g). Menjadi konsultan dalam kegiatan Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam di Jawa Timur tahun 2005.
- h). Menjadi staf pengajar di Program Studi Pariwisata Universitas Airlangga Surabaya

11. Pengalaman Penelitian Sejak Tahun 2000 – 2007 :

- 1). Kajian Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Tentang Dampak Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Tahun 2000
- 2). Kajian Tentang Aksi Demonstrasi di Jawa Timur, Tahun 2000
- 3). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Tahun 2000
- 4). Mengidentifikasi Penyebab Kematian Ibu dan Merumuskan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) Pada Masyarakat Nelayan , Tahun 2000
- 5). Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas (Migas) di Kawasan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik Jawa Timur Kerjasama dengan Premier Oil Co. London, tahun 2000
- 6). Penelitian Tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Penyalahgunaan NAPZA, tahun 2001
- 7). Kajian Tentang Mekanisme Penyaluran dan Pola Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) di daerah Pedesaan di Jawa Timur, tahun 2001
- 8). Studi tentang Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Propinsi Jawa Timur, tahun 2001
- 9). Penelitian tentang Pekerja Anak di Sektor Berbahaya di Jawa Timur, tahun 2001
- 10). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) beberapa 6 Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, Tahun 2001
- 11). Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Dini di 6 kabupaten di Jawa Timur, Tahun 2002
- 12). Studi Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar Industri Kabupaten Tuban, Tahun 2002
- 13). Perencanaan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Lokal di Kota Surabaya, tahun 2002
- 14). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya, tahun 2003
- 15). Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (PPM) SLTP Jawa Timur, tahun 2003
- 16). Penyusunan Raperda Pendidikan di Kota Surabaya, Tahun 2003
- 17). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten Blitar, tahun 2004
- 18). Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Di Jawa Timur, Tahun 2005
- 19). Penyusunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Indusri Migas di Jawa Timur; tahun 2006
- 20). Penyusunan Kebijakan dan Program Penanganan Masalah Pengangguran Di Jawa Timur; tahun 2006
- 21). Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban; Tahun 2007
- 22). Penyusunan Kebijakan dan Program Pemberdayaan UKM di kabupaten Sumenep; Tahun 2007
- 23). Penelitian Kemiskinan di Perkotaan dan Alternatif Kebijakannya; Tahun 2007

12. Publikasi / Penerbitan Buku:

- 1). Sebagai kontributor penulisan buku berjudul : Wanita dan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Paramawidya, Tahun 1993.
- 2). Sebagai tim penulis dalam penulisan buku berjudul Studi Kualitatif Tentang Pekerja Anak di Jawa Timur, Penerbit : Airlangga University Press, Tahun 1999
- 3). Sebagai tim penulis dalam penulisan buku tentang Kekerasan Terhadap Anak yang diterbitkan oleh Airlangga University Press, Tahun 1999
- 4). Sebagai penulis dan editor dalam penulisan buku Studi Analisis Situasi HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Anak-Anak, Wanita dan Keluarga di Propinsi Jawa Timur, Kerjasama FISIP Universitas Airlangga dengan UNICEF, 1999.
- 5). Sebagai anggota Tim penulis buku Tentang Kredit Usaha Tani di Propinsi Jawa Timur, Kerjasama FISIP Unair dengan Balitbang Propinsi Jawa Timur, Tahun 2001
- 6). Sebagai Tim penulis buku Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Propinsi Jawa Timur, tahun 2001
- 7). Sebagai anggota tim penyusun buku tentang Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya, Tahun 2001
- 8). Sebagai anggota tim penulis buku tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Propinsi Jawa Timur tahun 2002
- 9). Penulis buku tentang Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Industri di wilayah kabupaten Tuban, Jawa Timur tahun 2002
- 10). Sebagai tim penyusun Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Dini di 6 kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur (program UNICEF) tahun 2002
- 11). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya, tahun 2003
- 12). Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (PPM) SLTP Jawa Timur, tahun 2003
- 13). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten Blitar, tahun 2004
- 14). Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya, tahun 2004
- 15). Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Jawa Timur, Tahun 2005
- 16). Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, tahun 2005
- 7). Pengetahuan, Sikap dan Praktek Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB; Kerja sama dengan UNICEF, 2006
- 8). Penyusunan Kebijakan dan Program Penanggulangan Masalah Pengangguran di Jawa Timur; 2006; Kerjasama LPPM Unair dengan Bappeprov Jawa Timur; 2006

Surabaya, 27 Oktober 2009

Drs. Septi Ariadi, NIA